

LAPORAN AKTUALISASI

PENINGKATAN

DISTRIBUSI SUNTIK

DAN PIL

**PADA SUB BIDANG BINA KESERTAAN KB JALUR
PEMERINTAH DAN SWASTA
BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI
BKKBN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Oleh:

UMI LUTFIAH

NIP : 199108312019022007

PELATIHAN DASAR CALON PNS GOLONGAN III

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
JAKARTA, TAHUN 2019

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PNS GOLONGAN III**

PENINGKATAN DISTRIBUSI SUNTIK DAN PIL

Nama : Umi Lutfiah
NIP : 19910831 201902 2 007
Unit Kerja/Tempat Magang : Sub Bidang Bina Kesertaan KB Jalur
Pemerintah dan Swasta
Bidang Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi
Perwakilan BKKBN Provinsi DIY

Telah Disetujui untuk Mengikuti Seminar
Pada Hari Selasa tanggal 5 November 2019

Mentor,

Coach,

Ratna Anita Sari, S.Si., M.Sc.
NIP. 19820614 200901 2 003

Shinta Armayani, S.Psi., M.Pd.
NIP. 19801103 200802 2 001

**BERITA ACARA
LAPORAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PNS GOLONGAN III**

PENINGKATAN DISTRIBUSI SUNTIK DAN PIL

Nama : Umi Lutfiah
NIP : 19910831 201902 2 007
Unit Kerja/Tempat Magang : Sub Bidang Bina Kesertaan KB Jalur
Pemerintah dan Swasta
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi
Perwakilan BKKBN Provinsi DIY

Telah diuji di depan Tim Penguji
Pada Hari Selasa tanggal 5 November 2019

Penguji,

Coach,

Tarman Budianto, S.Pd., M.Pd

Shinta Armayani, S.Psi., M.Pd.

NIP. 19830704 201001 1 013

NIP. 19801103 200802 2 001

Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kependudukan dan Keluarga Berencana

Ir. Hermansyah, MA

NIP. 19600117 198001 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Alloh SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan Rancangan Aktualisasi ini. Peserta diklatan Rancangan Aktualsiasii ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk lulus dalam Pelatihan Dasar CPNS BKKBN Angkatan 2018. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak maka akan sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan rancangan ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ratna Anita Sari, S.Si., M.Sc., selaku mentor saya yang menyediakan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan rancangan ini.
2. Shinta Armayani, S.Psi., M.Pd., selaku *coach* yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga membantu memudahkan saya dalam teknis pembuatan rancangan serta presentasi.
3. Tarman Budiarto, S.Pd., M.Pd., selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan yang bersifat membangun sehingga rancangan ini dapat menjadi bekal yang lebih lengkap selama masa habituasi nanti.
4. Bidang KB-KR Perwakilan BKKBN DIY, yang telah memberikan banyak dukungan, semangat, motivasi sehingga saya masih terus dapat semangat dalam menjalani setiap proses Pelatihan Dasar CPNS BKKBN Angkatan 2018.
5. Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN DIY, yang telah menyelenggarakan pelatihan dengan baik sehingga mampu memberikan ilmu yang optimal bagi saya sebagai bekal dalam menjalankan habituasi.
6. Ibu Dra. Rubidah dan Alm. Bapak Husein, B.A., yang telah memberikan dorongan, doa, semangat yang tak terkira tidak hanya dalam penyusunan Rancangan Akutualisasi ini, tetapi juga untuk keseluruhan kasih sayang selama ini, terima kasih.
7. Teman-teman seperjuangan Pelatihan Dasar BKKBN Golongan III Gelombang 1, terima kasih atas semua dukungan dan semangatnya.

Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semuanya. Semoga rancangan ini dapat membawa manfaat tidak hanya bagi diri saya pribadi, namun juga bagi organisasi dan masyarakat.

Yogyakarta, 19 September 2019

Umi Lutfiah

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
BERITA ACARA	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. Profil Lembaga.....	8
B. Visi Misi Organisasi.....	9
C. Tugas dan Fungsi Organisasi	9
D. Tugas Pokok dan Fungsi ASN/PNS.....	14
E. Tujuan dan Manfaat.....	15
Tujuan.....	15
Manfaat	15
Bagi Diri Sendiri.....	15
Bagi Organisasi	15
BAB II RANCANGAN AKTUALISASI.....	16
A. Analisa Lingkungan Kerja.....	16
B. Matrik Analisa Lingkungan Kerja.....	19
C. Deskripsi Gagasan /Kegiatan	24
D. Matrik Rancangan Aktualisasi.....	36
E. Jadwal Rencana Aktualisasi	50
F. Rencana Antisipasi Kendala yang Dihadapi	52
BAB III CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	53
A. Gambaran Umum Pelaksanan Aktualisasi.....	53
B. Analisa Dampak jika Isu Tidak Dilaksanakan	54
C. Matriks Pelaksanaan Aktualisasi.....	58
BAB IV PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	97
C. Rencana Tindak Lanjut.....	98

DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	102
OUTPUT KEGIATAN DAN PENGUATAN KOMPETENSI BIDANG	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Profil Lembaga

Perpres RI No. 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyebutkan bahwa BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Saat ini BKKBN dipimpin oleh dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG(K). BKKBN Pusat memiliki lima deputi bidang, satu sekretariat utama dan satu inspektorat utama.

BKKBN memiliki tiga nilai Revolusi Mental, yaitu: (www.bkkbn.go.id, 11/09/2019)

1. Integritas (jujur, dipercaya, disiplin, bertanggung jawab, dan tidak munafik).
2. Etos kerja (kerja keras, kerja cerdas, berdaya saing, optimis, inovatif dan produktif).
3. Gotong royong (kerja sama, solidaritas, komunal, dan berorientasi pada kemaslahatan umum).

Sedangkan Perwakilan BKKBN Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki 5 nilai sebagai berikut: (www.yogya.bkkbn.go.id, 11/09/2019)

1. **Cerdas**, adalah perilaku untuk mampu bertindak optimal secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi.
2. **Tangguh**, adalah perilaku memiliki semangat pantang menyerah untuk mencapai tujuan.
3. **Kerjasama**, adalah perilaku untuk membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, percaya, sinergis, serta

menghargai melalui komunikasi yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama.

4. **Integritas**, adalah perilaku untuk berbuat jujur, terbuka, dan konsisten antara pikiran, perkataan, dan perbuatan.
5. **Ikhlas**, adalah perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tulus dan sungguh-sungguh.

B. Visi Misi Organisasi

Visi

“Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.”

Misi

1. Mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan.
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga.
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

C. Tugas dan Fungsi Organisasi

- Tugas Pokok dan Fungsi BKKBN

“Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BKKBN menyelenggarakan fungsi: (www.bkkbn.go.id, 11/09/2019)

1. Perumusan kebijakan nasional, pepaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang KKB.
2. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KKB.

3. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB.
4. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang KKB.
5. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional.
6. Penyusunan desain Program KKBPK.
7. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
8. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) nasional.
9. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga.
10. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR).
11. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
12. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
13. Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
14. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
15. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitas di bidang KKB.

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut, BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang KKB.

2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN.
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN.
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN.
5. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang KKB.

- Tugas Pokok dan Fungsi Kedeputian BKKBN

Bagian Kelima pasal 16 Peraturan Presiden RI Nomor 62 tahun 2010 menyebutkan bahwa Deputy Bidang KB-KR (Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Sedangkan fungsi Deputy Bidang KB-KR memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang KB-KR.
2. Pelaksana kebijakan teknis di bidang KB-KR.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KB-KR.
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang KB-KR.
5. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang KB-KR.

- Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat/Perwakilan BKKBN Provinsi

Tugas pokok Perwakilan BKKBN Provinsi DIY sama dengan tugas pokok BKKBN pusat, yaitu “Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BKKBN menyelenggarakan fungsi: (www.yogya.bkkbn.go.id, 17/09/2019)

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
 2. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
 3. Pelaksana advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
 4. Penyelenggara komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
 5. Penyelenggara pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
 6. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitas di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
 7. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
 8. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN.
 9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN.
 10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN
 11. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- Tugas Pokok dan Fungsi Bidang/Bagian
Perka (Peraturan Kepala) BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi pasal 14, Bidang KB-KR mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang KB-KR. Dalam menjalankan tugas tersebut,

Bidang KB-KR menyelenggarakan fungsi sesuai pasal 15 dalam peraturan yang sama, sebagai berikut:

1. Penyimpanan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah dan swasta.
2. Penyimpanan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan KB jalur wilayah dan sasaran khusus.
3. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang KR.

- Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang/Sub Bagian

Bidang KB-KR terdiri dari 3 subbidang, yaitu Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta, Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah Sasaran Khusus, dan Subbidang KR. Pasal 17 Perka BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 poin 1 menjelaskan tugas Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta. Adapun beberapa tugas tersebut adalah melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah swasta.

Sedangkan fungsi dari jabatan tersebut adalah sebagai berikut:
(Sihana, 2019)

1. Sebagai penyedia dan distributor alat/obat kontrasepsi kepada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
2. Monitoring alat/obat kontrasepsi.

3. Penyelenggara pelatihan/peningkatan kualitas pelayanan KB.
4. Penyalur dan evaluator dana penggerakan.

D. Tugas Pokok dan Fungsi ASN/PNS

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta. Adapun rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta di provinsi.
2. Menyiapkan bahan untuk konsep rencana kerja dan rencana kegiatan pelaksanaan kebijakan pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta di provinsi.
3. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan dan anggaran pelaksanaan kebijakan pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta.
4. Menyiapkan bahan untuk konsep evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta.
5. Melakukan penyiapan koordinasi hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait pelaksanaan pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta.
6. Menyampaikan laporan kepada atasan.
7. Melaksanakan tugas kegiatan penyiapan pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta, serta tugas lainnya sesuai petunjuk atasan.

E. Tujuan dan Manfaat

Tujuan

Meningkatkan distribusi alat kontrasepsi suntik dan pil di Gudang Perwakilan BKKBN Provinsi DI. Yogyakarta

Manfaat

- **Bagi Diri Sendiri**

1. Mengetahui tugas pokok dan fungsi jabatan.
2. Memahami penerapan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi dalam pelaksanaan tugas pokok jabatan.
3. Mengaplikasikan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi dalam pelaksanaan tugas pokok jabatan.

- **Bagi Organisasi**

1. Terdistribusinya *overstock* alkon suntik dan pil yang menumpuk di gudang provinsi.
2. Mengoptimalkan penggunaan anggaran Subbid Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta (Jalpemswa).
3. Terjalannya kerjasama yang baik dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dalam hal penyerapan alkon suntik.
4. Terjalannya kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat terkait re-alokasi alkon pil.
5. Terjalannya kerjasama dengan Provinsi Papua terkait re-alokasi alkon suntik.

BAB II

RANCANGAN AKTUALISASI

F. Analisa Lingkungan Kerja

Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Ratna Anita Sari, S.Si, M.Sc. Terdapat tiga orang staf pada subbid ini, yaitu drg. Yurni, Wiyono, dan Umi Lutfiah, S.KM.

Lingkungan kerja yang tercipta di subbidang ini sangat kondusif. Kerjasama antar pelaksana maupun pelaksana dengan pengawas sangat baik. Komunikasi juga terjalin dengan baik. Pengawas dan pelaksana di kantor mampu memberikan bimbingan kepada pelaksana yang baru untuk semangat dan cepat dalam belajar tugas-tugas keseharian baik yang bersifat substantif maupun administratif.

Berdasarkan pengalaman bekerja selama tiga minggu membantu pimpinan, dirasakan beberapa hal yang dapat diperbaiki, yaitu:

1. Belum semua fasilitas kesehatan mendistribusikan alat kontrasepsi ke jejaring.
2. Belum semua fasilitas kesehatan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregister dalam sistem pencatatan dan pelaporan.
3. Belum maksimalnya pemanfaatan anggaran kemitraan untuk peningkatan kesertaan KB.
4. Belum maksimalnya anggaran bidang untuk bakti sosial pelayanan KB.
5. Belum semua fasilitas kesehatan mempunyai provider yang bisa melayani MOP (Metode Operasi Pria).
6. Belum updatenya data dokter yang sudah pernah dilatih MOP (Metode Operasi Pria).
7. Belum maksimalnya distribusi alkon pil dan suntik di gudang provinsi.

Tujuh isu tersebut dimasukkan dalam matrik seperti tertera dalam Bab II Bagian B. Kemudian dilakukan *scoring* dengan Analisa USG (*Urgency-Seriousness-Growth*). Isu yang masuk ke dalam tiga besar adalah (1) belum semua fasilitas kesehatan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregister dalam sistem pencatatan dan pelaporan; (2) belum semua fasilitas kesehatan mempunyai provider yang bisa melayani MOP; (3) belum maksimalnya distribusi alkon pil dan suntik di gudang provinsi.

- *Belum semua fasilitas kesehatan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregister dalam sistem pencatatan dan pelaporan*

Isu ini masuk ke dalam permasalahan pelayanan publik, di mana fasilitas kesehatan yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan belum teregister tidak dapat menerima alkon dari BKKBN. Total skor Analisa USG 12.

- *Belum semua fasilitas kesehatan mempunyai provider yang bisa melayani MOP*

Isu ini masuk ke dalam permasalahan manajemen ASN dan pelayanan publik, di mana fasilitas kesehatan seharusnya dapat menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan kinerja, kompetensi dan kualifikasi. Total skor Analisa USG untuk isu ini adalah 12.

- *Belum maksimalnya distribusi alkon pil dan suntik di gudang provinsi*

Isu ini masuk ke dalam permasalahan pelayanan publik dan *Whole of Government*, di mana jika alkon tidak terdistribusi maksimal maka pelayanan KB pil dan suntik juga tidak akan maksimal. Total skor Analisa USG untuk isu ini adalah 14.

Berdasarkan list isu dan Analisa USG, disimpulkan bahwa isu belum maksimalnya distribusi alkon pil dan suntik di gudang provinsi merupakan isu yang terpilih. Jika isu ini tidak segera dipecahkan akan menyebabkan:

1. Batas kadaluarsa alkon pil dan suntik yang semakin dekat, apabila diberikan kepada akseptor bisa mengakibatkan kegagalan kontrasepsi.

2. Masa tunggu alkon pil dan suntik sebelum digunakan oleh akseptor lebih singkat.
3. Rawan terjadinya kadaluarsa baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun fasilitas kesehatan.
4. Program KB tidak efisien karena dengan sumber daya yang banyak namun cakupan program belum maksimal.
5. Kredibilitas sumber daya dan institusi dipertanyakan dengan banyaknya *overstock* yang terjadi.

Melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah dan swasta merupakan tugas Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta berdasarkan Perka BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 Pasal 17 poin (1). Pelaksanaan tugas tersebut salah satunya dilakukan melalui distribusi alkon (alat kontrasepsi) kepada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB Kabupaten/Kota.

Distribusi *overstock* alkon pil dan suntik secara cepat dan tepat harus diperhatikan dalam pelaksanaan tugas jabatan pelaksana khususnya di Subbid Bina Kesertaan KB Jalpemsawa (Jalur Pemerintah dan Swasta) BKKBN. Maka gagasan pemecahan isu yang diusulkan adalah **Peningkatan Distribusi Suntik dan Pil pada Subbid Bina Kesertaan KB Jalpemsawa BKKBN DIY.**

G. Matrik Analisa Lingkungan Kerja

NO	URAIAN TUGAS	PERMASALAHAN	URGENCY	SERIOUSNESS	GROWTH	TOTAL	Keterkaitan dengan Substansi (Manajemen ASN, Pelayanan Publik, WoG)	GAGASAN/KEGIATAN PEMECAHAN ISU
1	Mengolah data kesertaan ber KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB-KR yang sesuai dengan standar pelayanan	a.) Belum semua fasilitas kesehatan mendistribusikan alat kontrasepsi ke jejaring	4	4	3	11		
		b.) Belum semua fasilitas kesehatan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregister dalam sistem pencatatan dan pelaporan	4	4	4	12	Pelayanan publik	

NO	URAIAN TUGAS	PERMASALAHAN	URGENCY	SERIOUSNESS	GROWTH	TOTAL	Keterkaitan dengan Substansi (Manajemen ASN, Pelayanan Publik, WoG)	GAGASAN/KEGIATAN PEMECAHAN ISU
		c.) Belum maksimalnya pemanfaatan anggaran kemitraan untuk peningkatan kesertaan KB	3	3	3	9		
		d.) Belum maksimalnya anggaran bidang untuk bhaksos pelayanan KB	3	3	3	9		

NO	URAIAN TUGAS	PERMASALAHAN	URGENCY	SERIOUSNESS	GROWTH	TOTAL	Keterkaitan dengan Substansi (Manajemen ASN, Pelayanan Publik, WoG)	GAGASAN/KEGIATAN PEMECAHAN ISU
2	Mengolah data pergerakan dan pemantapan kesertaan ber-KB MKJP	a.) Belum semua fasilitas kesehatan mempunyai provider yang bisa melayani MOP	4	5	3	12	Manajemen ASN, Pelayanan Publik	
		b.) Belum updatenya data dokter yang sudah pernah dilatih MOP	4	3	3	10		

NO	URAIAN TUGAS	PERMASALAHAN	URGENCY	SERIOUSNESS	GROWTH	TOTAL	Keterkaitan dengan Substansi (Manajemen ASN, Pelayanan Publik, WoG)	GAGASAN/KEGIATAN PEMECAHAN ISU
3	Mengolah data perencanaan jaminan ketersediaan alkon	Belum maksimalnya distribusi alkon pil dan suntik di gudang provinsi	5	5	4	14	Pelayanan Public, <i>Whole of Government</i>	1.) Membantu melakukan revisi anggaran kegiatan di Subbid Jalpemswa untuk mendukung bhaksos melalui PD IBI DIY; 2.) Mengumpulkan bahan kerjasama bakti sosial suntik dengan PD IBI DIY;

NO	URAIAN TUGAS	PERMASALAHAN	URGENCY	SERIOUSNESS	GROWTH	TOTAL	Keterkaitan dengan Substansi (Manajemen ASN, Pelayanan Publik, WoG)	GAGASAN/KEGIATAN PEMECAHAN ISU
								3.) Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi pil dengan Provinsi Jawa Barat;
								4.) Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi suntik dengan Provinsi Papua.

H. Deskripsi Gagasan /Kegiatan

Kegiatan, tahapan kegiatan, output, keterkaitan substansi mata pelatihan, kontribusi terhadap visi misi dan tujuan organisasi, serta penguatan nilai organisasi akan dijelaskan berikut ini. Menyadari bahwa isu ini bersifat kompleks, maka diusulkan beberapa kegiatan pemecahan masalah sebagai satu rangkaian kegiatan besar. Kegiatan yang diusulkan untuk memecahkan isu adalah sebagai berikut:

1. Membantu melakukan revisi anggaran kegiatan di Subbid Jalpemswa untuk mendukung bhaksos melalui PD IBI DIY;

Kegiatan ini penting dilakukan untuk mendapatkan dana kegiatan bhaksos suntik yang akan dilaksanakan dengan PD IBI DIY. Sub kegiatan I yaitu menyiapkan draft bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam revisi anggaran mengandung nilai Akuntabilitas, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Saya akan memastikan tidak ada kesalahan peserta diklatan dan isi dalam penyusunan draft bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini merupakan bagian dari prinsip Akuntabilitas di mana setiap tugas harus kita selesaikan dengan teliti. Memastikan bahwa tidak ada kesalahan juga menjadikan waktu yang kita perlukan untuk mengerjakan menjadi lebih singkat tanpa mengurangi kualitas hasil. Hal ini merupakan prinsip dari nilai Komitmen Mutu. Setelah draft dibuat, maka hasil dari draft tersebut juga diberikan kepada atasan. Memberikan laporan merupakan salah satu dimensi akuntabilitas, yaitu dimensi akuntabilitas membutuhkan laporan.

Saya juga turut serta membantu memastikan dengan cermat ketersediaan anggaran subbidang. Hal ini sesuai dengan prinsip Akuntabilitas. Sedangkan dalam membantu menyesuaikan bentuk kegiatan dengan ketersediaan anggaran, saya memastikan bahwa tidak ada agenda kegiatan lain yang dikorbankan dengan adanya revisi anggaran yang dilakukan. Konsep ini merupakan konsep adil, di mana adil merupakan

salah satu bentuk Nasionalisme. Membantu proses penyesuaian anggaran juga saya lakukan dengan penuh tanggung jawab. Konsep tanggung jawab sesuai dengan nilai Akuntabilitas dan Anti Korupsi. Selain itu, dalam membantu segala proses penyesuaian bentuk kegiatan dengan ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan baik, santun kepada atasan ketika menyampaikan pendapat. Prinsip ini termasuk ke dalam nilai Etika Publik.

Proses membantu revisi anggaran yang dilakukan harus dapat memastikan bahwa tidak akan mempengaruhi agenda kegiatan lain agar tidak mengganggu program kerja yang telah disepakati. Konsep ini sesuai dengan konsep adil dalam nasionalisme. Selain itu, hal ini juga membantu memastikan bahwa pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu. Konsep ini sesuai dengan prinsip Pelayanan Publik. Proses ini juga akan saya lakukan dengan teliti, memastikan tidak ada kesalahan peserta diklatan angka/jumlah dalam membantu revisi anggaran. Hal ini sesuai dengan prinsip nilai Akuntabilitas. Selanjutnya, saya akan memastikan dalam proses ini tidak ada konflik kepentingan sehingga adanya revisi ini benar-benar dilakukan demi kepentingan bersama/umum. Konsep ini sesuai dengan nilai Akuntabilitas dan Etika Publik.

Proses pembuatan draf pengajuan revisi anggaran dari bidang ke PPK dan dari PPK ke KPA harus dilakukan berdasarkan hasil yang telah disepakati sebagai bentuk Anti Korupsi. Proses pembuatan draft juga harus dilaporkan kepada atasan sebagai bentuk Akuntabilitas. Selain itu, saya akan menyelesaikan draf sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan melaporkan hasil kepada atasan. Tindakan ini sesuai dengan prinsip Akuntabilitas. Selain itu, saya akan menyampaikan laporan revisi anggaran langsung kepada Subbag keuangan dan BMN untuk menjamin bahwa surat benar diterima oleh pihak yang bersangkutan dengan waktu yang lebih cepat. Konsep ini sesuai dengan nilai Komitmen Mutu.

Adapun tahapan kegiatan pelaksanaan revisi anggaran ini akan dilakukan dengan:

- a. Menyiapkan draf bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan.
- b. Membantu mencermati ketersediaan anggaran.
- c. Membantu menyesuaikan bentuk kegiatan dengan ketersediaan anggaran.
- d. Membantu revisi anggaran.
- e. Membuat draf pengajuan revisi anggaran dari bidang KB-KR ke PPK.
- f. Membuat draf pengajuan revisi anggaran dari PPK ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).
- g. Membuat draf surat persetujuan KPA atas revisi anggaran.
- h. Melaporkan hasil revisi ke Subbag Keuangan dan BMN.

Dalam rangka mencapai visi BKKBN mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Dengan merevisi anggaran subbidang, diharapkan dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan bhaksos. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperluas cakupan kepesertaan KB.

Melakukan revisi anggaran subbidang harus dilakukan secara efektif dan efisien, di mana efektif dan efisien merupakan unsur dalam nilai BKKBN, yaitu CERDAS. Dalam proses revisi, dibutuhkan kerjasama, sinergisitas, saling percaya antar star dalam satu subbidang maupun di luar subbidang (KERJASAMA). Proses revisi anggaran harus pula dilakukan secara jujur, terbuka, dan sungguh-sungguh (INTEGRITAS dan IKHLAS). Selain itu, dalam pelaksanaannya harus pantang menyerah jika ada kesulitan/hambatan (TANGGUH).

2. Mengumpulkan bahan kerjasama perencanaan bakti sosial suntik dengan PD IBI DIY;

Setelah adanya dana untuk bhaksos, maka langkah selanjutnya adalah menjalin kerjasama dengan PD IBI DIY. Kerjasama ini penting dalam rangka menghindari *overstock* pil dan suntik serta meningkatkan kepesertaan KB. Menjalinkan kerjasama dengan instansi lain dalam mencapai sebuah tujuan merupakan penerapan *Whole of Government*.

Saya akan memastikan tidak ada kesalahan tulisan dan konten dalam penyusunan draf surat permohonan koordinasi sebagai perwujudan nilai Akuntabilitas dan Komitmen Mutu. Setelah itu, saya akan meminta apraf atasan, paraf kepala bidang, dan tanda tangan Plt. Kepala Perwakilan sebagai bentuk Anti Korupsi. Saya juga akan meminta nomer surat dan cap lembaga berkoordinasi dengan bagian Sekretariat. Konsep ini sejalan dengan nilai *Whole of Government*. Dalam melaksanakan koordinasi, saya melakukan dengan sopan santun, ramah sebagai bentuk pengamalan nilai Etika Publik.

Pengarsipan juga dilakukan segera setelah surat dikeluarkan agar tidak terjadi kelalaian dalam pengarsipan. Hal ini sejalan dengan konsep Akuntabilitas. Selain itu, pengarsipan juga dilakukan tanpa menggunakan cap basah lembaga, agar jika sewaktu-waktu diperlukan surat masih bisa digunakan dengan cap basah. Konsep ini sejalan dengan Komitmen Mutu.

Tahapan kegiatan selanjutnya adalah mengirimkan surat ke Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Saya akan mengarsipkan bukti pengiriman surat dan melampirkan buti penerimaan surat sebagai perwujudan nilai Akuntabilitas. Proses pengiriman surat akan saya lakukan dengan bantuan kurir. Sopan ketika meminta bantuan mengirimkan surat merupakan pengamalan nilai Etika Publik.

Tahapan kegiatan selanjutnya adalah membantu kelancaran Rapat Koordinasi dengan IBI DIY. Saya akan menyiapkan kebutuhan bahan rapat koordinasi dengan penuh tanggung jawab dan melakukan *job desk* pada hari pelaksanaan secara mandiri. Hal ini merupakan pengamalan nilai Akuntabilitas dan Anti Korupsi. Setelah itu, tahapan kegiatan yang dilakukan adalah membuat notulensi hasil rapat koordinasi dengan IBI. Saya akan memastikan notulensi yang dibuat sudah mencakup semua hal yang didiskusikan dalam kegiatan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan prinsip nilai Akuntabilitas. Membuat notulen juga akan saya lakukan secara mandiri atas inisiatif sendiri jika memang nantinya tidak ada penugasan khusus dari atasan. Inisiatif dan profesionalisme dalam bekerja merupakan salah satu pengamalan nilai Nasionalisme. Selain itu, saya juga akan membuat template notulen yang memudahkan kita dalam memahami hasil serta rencana tindak lanjut kegiatan. Membuat template yang mudah dipahami merupakan salah satu wujud inovasi, di mana inovasi termasuk salah satu komponen dari Komitmen Mutu.

Tahapan selanjutnya adalah melaporkan hasil notulensi kepada atasan segera setelah rapat selesai dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan konsep Akuntabilitas dan Anti Korupsi. Selain itu, dalam memberikan laporan kepada atasan dilakukan dengan sikap ramah dan sopan. Hal ini sesuai dengan konsep Etika Publik.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalin kerjasama ini adalah:

- a. Membuat draf surat permohonan koordinasi dengan PD IBI DIY.
- b. Meminta paraf atasan, paraf kepala bidang, dan tanda tangan Plt. Kepala Perwakilan.
- c. Melakukan penomoran surat dan cap lembaga berkoordinasi dengan Sekretariat.
- d. Melakukan pengarsipan pada surat keluar bidang.
- e. Mengirimkan surat ke IBI.

- f. Membantu kelancaran Rapat Koordinasi dengan PD IBI DIY.
- g. Membuat notulensi hasil rapat koordinasi dengan IBI.
- h. Melaporkan hasil notulensi rapat kepada atasan.

Dalam rangka mencapai visi BKKBN mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Menjalin kemitraan dengan PD IBI DIY merupakan salah satu cara memanfaatkan stok alkon suntik yang melimpah dan meningkatkan kesertaan KB khususnya jenis suntik.

Menjalin kerjasama (KERJASAMA), pantang menyerah jika belum ada kepastian dalam pelaksanaan kerjasama bhaksos (TANGGUH), bekerja untuk mencapai satu tujuan walaupun dengan tenggat waktu dan sumber daya yang terbatas (CERDAS), setiap tahapan kegiatan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, tulus, dan sungguh-sungguh (IKHLAS).

3. Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi pil dengan Provinsi Jawa Barat;

Kerjasama re-alokasi/distribusi dinamis alkon pil dengan kantor perwakilan BKKBN yang lain merupakan penerapan *Whole of Government*. Tahap pertama adalah melakukan koordinasi dengan Subbag Keuangan dan BMN terkait kesiapan anggaran re-alokasi alkon pil. Saya akan sesegera mungkin melakukan koordinasi untuk memastikan dana segera siap sehingga re-alokasi pil dapat dilaksanakan secepatnya. Koordinasi dengan subbag lain merupakan bentuk penerapan *Whole of Government*. Sedangkan tujuan dari distribusi alkon dilakukan secepatnya agar alkon tidak kadaluarsa dan memiliki masa tunggu/masa pakai yang lebih lama. Konsep ini sesuai dengan nilai Komitmen Mutu dan Pelayanan Publik. Ketika melakukan koordinasi dengan Subbag Keuangan dan BMN, saya akan menjaga sopan santun saya dan tidak

memaksakan kehendak saya. Konsep ini sejalan dengan prinsip Etika Publik.

Tahapan selanjutnya adalah membuat draf surat perintah mengeluarkan barang ke BMN. Saya akan memastikan bahwa draf yang saya buat sesuai jumlah alkon pada rencana distribusi. Sikap ini merupakan ketelitian yang masuk ke dalam nilai Akuntabilitas. Selanjutnya saya juga akan melaporkan hasilnya kepada atasan sebagai bentuk Akuntabilitas. Pembuat draf ini juga akan saya kerjakan secara mandiri dengan inisiatif sendiri walaupun atasan belum menginstruksikan kepada saya. Konsep ini sejalan dengan nilai Anti Korupsi, yaitu mandiri.

Tahapan terakhir yang akan saya lakukan adalah membuat draf laporan penerimaan alkon pil ke Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN. Saya akan memastikan draf laporan penerimaan alkon dibuat sesegera mungkin ketika alkon sudah diterima oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan nilai Nasionalisme, Akuntabilitas, dan Anti Korupsi. Setelah draf selesai, maka saya akan melaporkan kepada atasan sebagai pengamalan Akuntabilitas.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalin kerjasama terkait re-alokasi alkon pil adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Subbag Keuangan dan BMN terkait kesiapan anggaran untuk re-alokasi/distribusi dinamis.
- b. Membuat draf rencana distribusi pil ke Provinsi Jawa Barat.
- c. Membuat draf surat perintah mengeluarkan barang ke BMN.
- d. Setelah alkon diterima oleh Provinsi Jawa Barat, membuat draf laporan ke Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara.

Dalam rangka mencapai visi BKKBN mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Re-alokasi alkon/ distribusi dinamis merupakan salah satu

cara untuk memenuhi kebutuhan alkon pil di Jawa Barat sampai tahun 2021. Antisipasi kekurangan alkon ini dapat mencegah gagalnya akseptor untuk ber-KB. Dengan kata lain, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan target mCPR. Selain itu, kegiatan ini bertujuan menghindari adanya alkon yang kadaluarsa dan tidak termanfaatkan sampai tahun 2021.

Menjalin kerjasama dengan perwakilan BKKBN provinsi lain merupakan bentuk KERJASAMA. Re-alokasi juga penerapan dari memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil maksimal (CERDAS), setiap tahapan kegiatan yang dilakukan didasari rasa tanggung jawab, terbuka, jujur (INTEGRITAS), serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas (IKHLAS).

4. Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi suntik dengan Provinsi Papua;

Kerjasama re-alokasi/distribusi dinamis alkon suntik dengan kantor perwakilan BKKBN yang lain merupakan penerapan *Whole of Government*. Tahap pertama adalah melakukan koordinasi dengan Subbag Keuangan dan BMN terkait kesiapan anggaran re-alokasi alkon suntik. Saya akan sesegera mungkin melakukan koordinasi untuk memastikan dana segera siap sehingga re-alokasi suntik dapat dilaksanakan secepatnya. Koordinasi dengan subbag lain merupakan bentuk penerapan *Whole of Government*. Sedangkan tujuan dari distribusi alkon dilakukan secepatnya agar alkon tidak kadaluarsa dan memiliki masa tunggu/masa pakai yang lebih lama. Konsep ini sesuai dengan nilai Komitmen Mutu dan Pelayanan Publik. Ketika melakukan koordinasi dengan Subbag Keuangan dan BMN, saya akan menjaga sopan santun saya dan tidak memaksakan kehendak saya. Konsep ini sejalan dengan prinsip Etika Publik.

Tahapan selanjutnya adalah membuat draf surat perintah mengeluarkan barang ke BMN. Saya akan memastikan bahwa draf yang saya buat sesuai jumlah alkon pada rencana distribusi. Sikap ini merupakan ketelitian yang masuk ke dalam nilai Akuntabilitas. Selanjutnya saya juga akan melaporkan hasilnya kepada atasan sebagai bentuk Akuntabilitas. Pembuat draf ini juga akan saya kerjakan secara mandiri dengan inisiatif sendiri walaupun atasan belum menginstruksikan kepada saya. Konsep ini sejalan dengan nilai Anti Korupsi, yaitu mandiri.

Tahapan terakhir yang akan saya lakukan adalah membuat draf laporan penerimaan alkon suntik ke Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN. Saya akan memastikan draf laporan penerimaan alkon dibuat sesegera mungkin ketika alkon sudah diterima oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan nilai Nasionalisme, Akuntabilitas, dan Anti Korupsi. Setelah draf selesai, maka saya akan melaporkan kepada atasan sebagai pengamalan Akuntabilitas.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalin kerjasama terkait re-alokasi alkon pil adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Subbag Keuangan dan BMN terkait kesiapan anggaran untuk re-alokasi/distribusi dinamis.
- b. Membuat draf rencana distribusi suntik ke Provinsi Papua.
- c. Membuat draf surat perintah mengeluarkan barang ke BMN.
- d. Setelah alkon diterima oleh Provinsi Papua, membuat draf laporan ke Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara.

Dalam rangka mencapai visi BKKBN mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Re-alokasi alkon/distribusi dinamis merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan alkon suntik di Papua yang mengalami kekurangan sampai tahun 2021. Antisipasi kekurangan alkon ini dapat

mencegah gagalnya akseptor untuk ber-KB. Dengan kata lain, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan target mCPR. Selain itu, kegiatan ini bertujuan menghindari adanya alkon yang kadaluarsa dan tidak termanfaatkan sampai tahun 2021.

Menjalin kerjasama dengan perwakilan BKKBN provinsi lain merupakan bentuk KERJASAMA. Re-alokasi juga penerapan dari memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil maksimal (CERDAS), setiap tahapan kegiatan yang dilakukan didasari rasa tanggung jawab, terbuka, jujur (INTEGRITAS), serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas (IKHLAS).

5. Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi pil dengan Provinsi Papua Barat;

Kerjasama re-alokasi/distribusi dinamis alkon pil dengan kantor perwakilan BKKBN yang lain merupakan penerapan *Whole of Government*. Tahap pertama adalah membuat draf perubahan rencana distribusi pil kepada Sekretaris utama BKKBN dan Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN. Saya akan memastikan bahwa draf yang saya buat telah sesuai dengan surat dari Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat. Selain itu, saya juga akan melaporkan draf tersebut kepada atasan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh kepala bidang dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BKKBN DIY. Hal ini sejalan dengan nilai Akuntabilitas, di mana akuntabilitas terkait dengan sikap teliti dan juga memerlukan laporan. Saya akan menjalin komunikasi yang baik dan sopan dengan pihak BKKBN Provinsi Papua barat terkait re-alokasi alkon pil dan suntik jika didapatkan informasi yang kurang jelas. Komunikasi dengan baik dan sopan merupakan pengamalan nilai Etika Publik.

Tahapan selanjutnya adalah membuat draf surat perintah mengeluarkan barang ke BMN. Saya akan memastikan bahwa draf yang saya buat sesuai jumlah alkon pada rencana distribusi. Sikap ini merupakan ketelitian yang masuk ke dalam nilai Akuntabilitas. Selanjutnya saya juga akan melaporkan hasilnya kepada atasan sebagai bentuk Akuntabilitas. Pembuat draf ini juga akan saya kerjakan secara mandiri dengan inisiatif sendiri walaupun atasan belum menginstruksikan kepada saya. Konsep ini sejalan dengan nilai Anti Korupsi, yaitu mandiri.

Tahapan terakhir yang akan saya lakukan adalah membuat draf laporan penerimaan alkon pil ke Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN. Saya akan memastikan draf laporan penerimaan alkon dibuat sesegera mungkin ketika alkon sudah diterima oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat. Hal ini sejalan dengan nilai Nasionalisme, Akuntabilitas, dan Anti Korupsi. Setelah draf selesai, maka saya akan melaporkan kepada atasan sebagai pengamalan Akuntabilitas.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalin kerjasama terkait re-alokasi alkon pil adalah sebagai berikut:

- a. Membuat draf perubahan rencana distribusi pil kepada Sekretaris Utama BKKBN dan Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN.
- b. Membuat draf rencana distribusi pil ke Provinsi Papua Barat.
- c. Membuat draf surat perintah mengeluarkan barang ke BMN.
- d. Setelah alkon diterima oleh Provinsi Papua Barat, membuat draf laporan ke Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara.

Dalam rangka mencapai visi BKKBN mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Re-alokasi alkon/ distribusi dinamis merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan alkon pil di Papua Barat sampai tahun 2021. Antisipasi kekurangan alkon ini dapat mencegah gagalnya akseptor

untuk ber-KB. Dengan kata lain, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan target mCPR. Selain itu, kegiatan ini bertujuan menghindari adanya alkon yang kadaluarsa dan tidak termanfaatkan sampai tahun 2021.

Menjalin kerjasama dengan perwakilan BKKBN provinsi lain merupakan bentuk KERJASAMA. Re-alokasi juga penerapan dari memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil maksimal (CERDAS), setiap tahapan kegiatan yang dilakukan didasari rasa tanggung jawab, terbuka, jujur (INTEGRITAS), serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas (IKHLAS).

I. Matrik Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja: : **Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta Perwakilan BKKBN DIY**

Identifikasi Isu :

1. Belum semua fasilitas kesehatan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregister dalam sistem pencatatan dan pelaporan.
2. Belum semua fasilitas kesehatan mempunyai provider yang bisa melayani MOP.
3. Belum maksimalnya distribusi pil dan suntik di gudang provinsi.

Isu yang Diangkat : **Belum maksimalnya distribusi pil dan suntik yang tersedia di gudang provinsi**

Gagasan/Kegiatan Pemecahan Isu :

1. Membantu melakukan revisi anggaran kegiatan di Subbidang Bina Kesertaan KB Jalpemswa untuk mendukung bakti sosial melalui PD IBI DIY.
2. Mengumpulkan bahan kerjasama persiapan bakti sosial suntik dengan PD IBI DIY.
3. Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi pil dengan Provinsi Jawa Barat.
4. Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi suntik dengan Provinsi Papua.
5. Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi pil dengan Provinsi Papua Barat.

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI	KONTRIBUSI VISI/MISI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Membantu melakukan revisi anggaran kegiatan di Subbid Jalpemswa untuk mendukung bhaksos melalui PD IBI DIY (Kegiatan ini mencerminkan nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan bahan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan. 2. Membantu mencermati ketersediaan anggaran. 3. Membantu menyesuaikan bentuk kegiatan dengan ketersediaan anggaran. 4. Membantu revisi anggaran. 5. Membuat draf pengajuan revisi anggaran dari bidang KB-KR ke PPK. 6. Membuat draf pengajuan revisi anggaran dari PPK ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). 7. Membuat draf surat persetujuan KPA atas revisi anggaran. 8. Melaporkan hasil revisi ke Subbag 	<p>Dokumen rencana kegiatan</p> <p>Dokumen draf pengajuan revisi anggaran subbidang</p> <p>Dokumen draf pengajuan revisi anggaran</p> <p>Dokumen draf surat persetujuan KPA atas revisi anggaran</p>	<p>Sub Kegiatan I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan tidak ada kesalahan tulis dan konten dalam penyusunan draf bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan (Akuntabilitas dan Komitmen Mutu) 2. Memberikan hasil draf yang dibuat kepada atasan sebagai bentuk tanggung jawab kita (Anti Korupsi) <p>Sub Kegiatan II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu memastikan dengan cermat ketersediaan anggaran subbidang (Akuntabilitas) <p>Sub Kegiatan III</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan tidak ada agenda kegiatan lain yang dikorbankan dengan adanya revisi anggaran ini (Nasionalisme) 2. Membantu proses 	<p>Dalam rangka mencapai visi BKKBN mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Dengan merevisi anggaran subbidang, diharapkan dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan bhaksos. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperluas cakupan kepesertaan KB.</p>	<p>Melakukan revisi anggaran subbidang harus dilakukan secara efektif dan efisien, di mana efektif dan efisien merupakan unsur dalam nilai BKKBN, yaitu CERDAS. Dalam proses revisi, dibutuhkan kerjasama, sinergisitas, saling percaya antar star dalam satu subbidang maupun di luar subbidang (KERJASAMA). Proses revisi anggaran harus pula dilakukan secara jujur, terbuka, dan sungguh-sungguh (INTEGRITAS)</p>

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI	KONTRIBUSI VISI/MISI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
		Keuangan dan BMN.		<p>penyesuaian anggaran dengan penuh tanggung jawab (Akuntabilitas dan Anti Korupsi)</p> <p>3. Berkomunikasi dengan baik, santun kepada atasan ketika menyampaikan pendapat (Etika Publik)</p> <p>Sub Kegiatan IV</p> <p>1. Memastikan revisi anggaran yang dilakukan tidak mempengaruhi agenda kegiatan lain agar tidak mengganggu program (Nasionalisme)</p> <p>2. Memastikan tidak ada kesalahan peserta diklatan angka/jumlah dalam membantu merevisi anggaran (Akuntabilitas)</p> <p>3. Memastikan dalam proses ini tidak ada konflik kepentingan (Akuntabilitas, Etika Publik)</p>		dan IKHLAS). Selain itu, dalam pelaksanaannya harus pantang menyerah jika ada kesulitan/hambatan (TANGGUH).

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI	KONTRIBUSI VISI/MISI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
				Sub Kegiatan V 1. Membuat draf revisi anggaran berdasarkan hasil yang telah disepakati (Anti Korupsi) 2. Memberikan draf revisi anggaran kepada atasan (Akuntabilitas) 3. Menyelesaikan draf sesuai dengan waktu yang ditentukan (Akuntabilitas) Sub Kegiatan VI 1. Membuat draf revisi anggaran berdasarkan hasil yang telah disepakati (Anti Korupsi) 2. Memberikan draf revisi anggaran kepada atasan (Akuntabilitas) 3. Menyelesaikan draf sesuai dengan waktu yang ditentukan (Akuntabilitas) Sub Kegiatan VII 1. Memastikan bahwa		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI	KONTRIBUSI VISI/MISI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
				<p>tidak ada kesalahan peserta diklatan dalam draf surat persetujuan KPA atas revisi anggaran (Akuntabilitas, Komitmen Mutu)</p> <p>2. Memastikan bahwa draf surat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan (Akuntabilitas)</p> <p>Sub Kegiatan VIII</p> <p>1. Memastikan laporan sampai ke Subbag Keuangan dan BMN tepat waktu (Akuntabilitas, Etika Publik)</p> <p>2. Memberikan laporan langsung kepada Subbag Keuangan dan BMN (Komitmen Mutu)</p> <p>3. Menyampaikan laporan apa adanya sesuai dengan keputusan revisi anggaran yang</p>		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI	KONTRIBUSI VISI/MISI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
				telah disetujui (Nasionalisme)		
2.	Mengumpulkan bahan kerjasama persiapan bakti sosial suntik dengan PD IBI DIY (Kegiatan ini mencerminkan nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi, <i>Whole of Government</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat draf surat permohonan koordinasi dengan PD IBI DIY. 2. Meminta paraf atasan, paraf kepala bidang, dan tanda tangan Plt. Kepala Perwakilan. 3. Melakukan penomoran surat dan cap lembaga berkoordinasi dengan Sekretariat. 4. Melakukan pengarsipan surat keluar bidang. 5. Mengirimkan surat ke IBI. 6. Membantu kelancaran Rapat Koordinasi dengan PD IBI DIY. 7. Membuat notulensi hasil rapat koordinasi dengan IBI. 8. Melaporkan hasil notulensi rapat ke 	<p>Dokumen</p> <p>Dokumen</p> <p>Dokumen</p> <p>Dokumen</p> <p>Laporan</p> <p>Dokumen</p>	<p>Sub Kegiatan I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan tidak ada kesalahan tulis dan konten dalam penyusunan draf surat permohonan koordinasi (Akuntabilitas dan Komitmen Mutu) <p>Sub Kegiatan II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan hasil draf yang dibuat kepada atasan sebagai bentuk tanggung jawab kita (Anti Korupsi) <p>Sub Kegiatan III</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penomoran dan cap lembaga dilakukan atas dasar koordinasi dengan bagian Sekretariat (<i>Whole of Government</i>) 2. Koordinasi dilakukan dengan sopan, santun, dan ramah (Etika Publik) 	<p>Dalam rangka mencapai visi BKKBN mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Menjalin kemitraan dengan PD IBI DIY merupakan salah satu cara memanfaatkan stok alkon suntik yang melimpah dan meningkatkan kepesertaan KB khususnya jenis suntik.</p>	<p>Menjalin kerjasama (KERJASAMA), pantang menyerah jika belum ada kepastian dalam pelaksanaan kerjasama bhksos (TANGGUH), bekerja untuk mencapai satu tujuan walaupun dengan tenggat waktu dan sumber daya yang terbatas (CERDAS), setiap tahapan kegiatan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, tulus, dan sungguh-sungguh (IKHLAS).</p>

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI	KONTRIBUSI VISI/MISI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
		atasan.		<p>Sub Kegiatan IV</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarsipan dilakukan segera setelah surat dikeluarkan agar tidak terjadi kelalaian dalam pengarsipan surat (Akuntabilitas). 2. Pengarsipan juga dilakukan tanpa menggunakan cap lembaga, agar jika sewaktu-waktu diperlukan surat masih bisa digunakan dengan cap basah (Komitmen Mutu). <p>Sub Kegiatan V</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarsipkan bukti kirim surat (Akuntabilitas) 2. Melampirkan bukti terima surat (Akuntabilitas) 3. Meminta bantuan kurir kantor untuk mengirimkan surat dengan sopan (Etika Publik) 		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI	KONTRIBUSI VISI/MISI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
				Sub Kegiatan VI 1. Menyiapkan kebutuhan bahan rapat koordinasi dengan penuh tanggung jawab (Akuntabilitas dan Anti Korupsi) 2. Melakukan <i>job desk</i> pada hari pelaksanaan koordinasi secara mandiri (Anti Korupsi) Sub Kegiatan VII 1. Memastikan notulensi yang dibuat sudah mencakup semua hal yang didiskusikan dalam kegiatan (Akuntabilitas) 2. Membuat notulen secara mandiri dan inisiatif jika memang tidak ditunjuk untuk menjadi notulen (Nasionalisme) 3. Membuat template notulen yang memudahkan memahami hasil dan		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI	KONTRIBUSI VISI/MISI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
				rencana tindak lanjut kegiatan (Komitmen Mutu) Sub Kegiatan VIII 1. Melaporkan hasil notulensi segera setelah rapat dilaksanakan (Akuntabilitas dan Anti Korupsi) 2. Memberikan laporan kepada atasan dilakukan dengan sikap ramah dan sopan (Etika Publik)		
3.	Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi pil dengan Provinsi Jawa Barat (Kegiatan ini mencerminkan nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi, <i>Whole</i>	1. Melakukan koordinasi dengan Subbag Keuangan dan BMN terkait kesiapan anggaran untuk re-alokasi/distribusi dinamis. 2. Membuat draf rencana distribusi pil ke Provinsi Jawa Barat. 3. Membuat draf surat perintah mengeluarkan barang ke BMN.	Laporan Dokumen Dokumen	Sub Kegiatan I 1. Sesegera mungkin melakukan koordinasi untuk memastikan dana segera siap (Pelayanan Publik dan <i>Whole of Government</i>) 2. Sopan ramah tidak memaksa ketika melakukan koordinasi (Etika Publik) Sub Kegiatan II 1. Memastikan bahwa draf yang dibuat sesuai dengan jumlah yang	Dalam rangka mencapai visi BKKBN mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Re-alokasi alkon/	Menjalin kerjasama dengan perwakilan BKKBN provinsi lain merupakan bentuk KERJASAMA. Re-alokasi juga penerapan dari memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil maksimal (CERDAS),

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI	KONTRIBUSI VISI/MISI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
	<i>of Government)</i>	4. Setelah alkon diterima oleh Provinsi Jawa Barat, membuat draf laporan ke Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara.	Laporan	<p>telah disepakati (Akuntabilitas)</p> <p>2. Melaporkan kepada atasan (Akuntabilitas)</p> <p>Sub Kegiatan III</p> <p>1. Memastikan bahwa draf yang dibuat sesuai dengan jumlah alkon pada rencana distribusi (Akuntabilitas)</p> <p>2. Melaporkan kepada atasan (Akuntabilitas)</p> <p>3. Membuat draf tidak usah menunggu instruksi dari atasan dan harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan (Anti Korupsi)</p> <p>Sub Kegiatan IV</p> <p>1. Memastikan draf laporan penerimaan alkon dibuat sesegera mungkin ketika alkon sudah diterima oleh provinsi terkait (Nasionalisme, Akuntabilitas, Anti</p>	<p>distribusi dinamis merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan alkon pil di Jawa Barat sampai tahun 2021. Antisipasi kekurangan alkon ini dapat mencegah gagalnya akseptor untuk ber-KB. Dengan kata lain, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan target mCPR. Selain itu, kegiatan ini bertujuan menghindari adanya alkon yang kadaluarsa dan tidak termanfaatkan sampai tahun 2021.</p>	<p>setiap tahapan kegiatan yang dilakukan didasari rasa tanggung jawab, terbuka, jujur (INTEGRITAS), serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas (IKHLAS)</p>

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI	KONTRIBUSI VISI/MISI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
				Korupsi) 2. Melaporkan kepada atasan (Akuntabilitas)		
4.	Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi suntik dengan Provinsi Papua (Kegiatan ini mencerminkan nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi, <i>Whole of Government</i>)	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan Subbag Keuangan dan BMN terkait kesiapan anggaran untuk re-alokasi/distribusi dinamis. Membuat draf rencana distribusi suntik ke Provinsi Papua. Membuat draf surat perintah mengeluarkan barang ke BMN. Setelah alkon diterima oleh Provinsi Papua, membuat draf laporan ke Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara. 	<p>Laporan</p> <p>Dokumen</p> <p>Dokumen</p> <p>Laporan</p>	<p>Sub Kegiatan I</p> <ol style="list-style-type: none"> Sesegera mungkin melakukan koordinasi untuk memastikan dana segera siap (Pelayanan Publik dan <i>Whole of Government</i>) Sopan ramah tidak memaksa ketika melakukan koordinasi (Etika Publik) <p>Sub Kegiatan II</p> <ol style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa draf yang dibuat sesuai dengan jumlah yang telah disepakati (Akuntabilitas) Melaporkan kepada atasan (Akuntabilitas) <p>Sub Kegiatan III</p> <ol style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa draf yang dibuat sesuai dengan jumlah alkon 	Dalam rangka mencapai visi BKKBN mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Re-alokasi alkon/ distribusi dinamis merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan alkon suntik di Papua yang mengalami kekurangan sampai	Menjalin kerjasama dengan perwakilan BKKBN provinsi lain merupakan bentuk KERJASAMA. Re-alokasi juga penerapan dari memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil maksimal (CERDAS), setiap tahapan kegiatan yang dilakukan didasari rasa tanggung jawab, terbuka, jujur (INTEGRITAS), serta dilaksanakan

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI	KONTRIBUSI VISI/MISI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
				<p>pada rencana distribusi (Akuntabilitas)</p> <p>2. Melaporkan kepada atasan (Akuntabilitas)</p> <p>3. Membuat draf tidak usah menunggu instruksi dari atasan dan harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan (Anti Korupsi)</p> <p>Sub Kegiatan IV</p> <p>1. Memastikan draf laporan penerimaan alkon dibuat sesegera mungkin ketika alkon sudah diterima oleh provinsi terkait (Nasionalisme, Akuntabilitas, Anti Korupsi)</p> <p>2. Melaporkan kepada atasan (Akuntabilitas)</p>	<p>tahun 2021. Antisipasi kekurangan alkon ini dapat mencegah gagalnya akseptor untuk ber-KB. Dengan kata lain, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan target mCPR. Selain itu, kegiatan ini bertujuan menghindari adanya alkon yang kadaluarsa dan tidak termanfaatkan sampai tahun 2021.</p>	<p>dengan sungguh-sungguh dan ikhlas (IKHLAS)</p>
5.	Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi pil dengan Provinsi Papua Barat	1. Membuat draf perubahan rencana distribusi pil kepada Sekretaris Utama BKKBN dan Biro Keuangan dan	Dokumen draf surat perubahan rencana distribusi pil	Sub Kegiatan I 1. Memastikan bahwa draf yang dibuat sesuai dengan jumlah yang telah disepakati (Akuntabilitas)	Dalam rangka mencapai visi BKKBN mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan	Menjalin kerjasama dengan perwakilan BKKBN provinsi lain merupakan bentuk

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI	KONTRIBUSI VISI/MISI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
	(Kegiatan ini mencerminkan nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Anti Korupsi, <i>Whole of Government</i>)	<p>Pengelolaan BMN BKKBN.</p> <p>2. Membuat rencana distribusi alkon pil ke Sekretaris BKKBN DIY.</p> <p>3. Membuat surat perintah mengeluarkan barang kepada bendahara materiil.</p> <p>4. Setelah alkon diterima oleh Provinsi Papua Barat, membuat draf laporan ke Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara.</p>	<p>Draf surat</p> <p>Draf SPMB</p> <p>Draf surat laporan</p>	<p>2. Melaporkan kepada atasan (Akuntabilitas)</p> <p>3. Menjalin komunikasi yang baik dan sopan kepada BKKBN Provinsi Papua Barat (Etika Publik)</p> <p>Sub Kegiatan II</p> <p>1. Memastikan bahwa draf yang dibuat sesuai dengan jumlah yang telah disepakati (Akuntabilitas)</p> <p>2. Melaporkan kepada atasan (Akuntabilitas)</p> <p>Sub Kegiatan III</p> <p>1. Memastikan bahwa draf yang dibuat sesuai dengan jumlah alkon pada rencana distribusi (Akuntabilitas)</p> <p>2. Melaporkan kepada atasan (Akuntabilitas)</p> <p>3. Membuat draf tidak usah menunggu instruksi dari atasan dan harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan</p>	<p>keluarga berkualitas maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Re-alokasi alkon/ distribusi dinamis merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan alkon pil di Papua Barat sampai tahun 2021. Antisipasi kekurangan alkon ini dapat mencegah gagalnya akseptor untuk ber-KB. Dengan kata lain, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan target mCPR. Selain itu, kegiatan ini bertujuan</p>	<p>KERJASAMA. Re-alokasi juga penerapan dari memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil maksimal (CERDAS), setiap tahapan kegiatan yang dilakukan didasari rasa tanggung jawab, terbuka, jujur (INTEGRITAS), serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas (IKHLAS)</p>

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI	KONTRIBUSI VISI/MISI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
				(Anti Korupsi) Sub Kegiatan IV 1. Memastikan draf laporan penerimaan alkon dibuat sesegera mungkin ketika alkon sudah diterima oleh provinsi terkait (Nasionalisme, Akuntabilitas, Anti Korupsi) 2. Melaporkan kepada atasan (Akuntabilitas)	menghindari adanya alkon yang kadaluarsa dan tidak termanfaatkan sampai tahun 2021.	

J. Jadwal Rencana Aktualisasi

No	Kegiatan	September		Oktober			
		III	IV	I	II	III	IV
KEGIATAN 1							
1	Mengumpulkan bahan penyusunan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan.		23				
	Membantu mencermati ketersediaan anggaran		23				
	Membantu menyesuaikan bentuk kegiatan dengan ketersediaan anggaran		23				
	Membantu revisi anggaran		23				
	Membuat draf pengajuan revisi anggaran dari bidang KB-KR ke PPK		23				
	Membuat draf pengajuan revisi anggaran dari PPK ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)		24				
	Membuat draf surat persetujuan KPA atas revisi anggaran		24				
	Melaporkan hasil revisi ke Subbag Keuangan dan BMN		24				
KEGIATAN 2							
2	Membuat draf surat permohonan koordinasi dengan PD IBI DIY.		25				
	Meminta paraf atasan, paraf kepala bidang, dan tanda tangan Plt. Kepala Perwakilan.		26				
	Melakukan penomoran surat dan cap lembaga berkoordinasi dengan Sekretariat.		27				
	Melakukan pengarsipan surat keluar bidang.		27				
	Mengirimkan surat ke IBI.		27				
	Membantu kelancaran Rapat Koordinasi dengan PD IBI DIY.		3				
	Membuat notulensi hasil rapat koordinasi dengan IBI.		3				
	Melaporkan hasil notulensi rapat ke atasan.		3				

KEGIATAN 3 DAN 4							
3	Melakukan koordinasi dengan Subbag Keuangan dan BMN terkait kesiapan anggaran untuk re-alokasi/distribusi dinamis				8		
	Membuat draf rencana distribusi pil ke Provinsi Jawa Barat				9		
	Membuat draf surat perintah mengeluarkan barang ke BMN				9		
	Setelah alkon diterima oleh Provinsi Jawa Barat, membuat draf laporan ke Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara						30
	Melakukan koordinasi dengan Subbag Keuangan dan BMN terkait kesiapan anggaran untuk re-alokasi/distribusi dinamis					8	
	Membuat draf rencana distribusi suntik ke Provinsi Papua					9	
	Membuat draf surat perintah mengeluarkan barang ke BMN					9	
	Setelah alkon diterima oleh Provinsi Papua, membuat draf laporan ke Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara						30
KEGIATAN 5							
4	Membuat draf perubahan rencana distribusi pil kepada Sekretaris Utama BKKBN dan Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN.				3		
	Membuat rencana distribusi alkon pil ke Sekretaris BKKBN DIY.				4		
	Membuat surat perintah mengeluarkan barang kepada bendahara materiil.				4		
	Setelah alkon diterima oleh Provinsi Papua Barat, membuat draf laporan ke Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara.						30

K. Rencana Antisipasi Kendala yang Dihadapi

No	Tahapan Kegiatan	Kendala	Antisipasi
1	Membantu menyesuaikan bentuk kegiatan dengan ketersediaan anggaran	Ketersediaan anggaran tidak mencukupi pembiayaan bhaksos secara penuh	Sistem pembiayaan subsidi
2	Membantu melakukan revisi anggaran kegiatan	Pejabat yang berwenang tugas luar kota	-Konfirmasi kehadiran pejabat yang berwenang di kantor melalui Sekretaris -Mempersiapkan dokumen sebelumnya
3	Membuat draf laporan hasil revisi ke Subbag Keuangan dan BMN	Usulan revisi terkadang membutuhkan waktu yang lama untuk masuk dalam aplikasi di bendahara	Melakukan konfirmasi yang intensif
4	Membantu terselenggarakannya rapat koordinasi dengan PD IBI DIY	Penyesuaian jadwal antara Kabid KB-KR dengan PD IBI DIY	Melakukan konfirmasi melalui sekretaris PD IBI DIY
5	Membuat draf rencana distribusi dan membuat SPMB untuk melakukan distribusi alkon suntik ke IBI melalui OPD KB Kabupaten/Kota	Belum adanya permintaan alkon suntik dari PD IBI DIY	Melakukan konfirmasi melalui sekretaris PD IBI DIY
6	Melakukan persiapan pelaksanaan bhaksos	Belum terdistribusinya alkon suntik ke IBI melalui faskes	Melakukan koordinasi dengan OPD KB Kabupaten/Kota
7	Membantu pelaksanaan bhaksos suntik	Kesiapan jumlah akseptor mempengaruhi pelaksanaan kegiatan sehingga ada kemungkinan pelaksanaan tidak sesuai jadwal	Melakukan koordinasi dengan OPD KB agar PKB menggerakkan akseptor guna mengikuti bhaksos
8	Melakukan koordinasi dengan Subbag Keuangan dan BMN terkait kesiapan anggaran untuk re-alokasi/distribusi dinamis	Revisi anggaran belum selesai	Melakukan koordinasi dengan Subbag Keuangan dan BMN

BAB III

CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Aktualisasi

Secara umum, pelaksanaan aktualisasi berjalan lancar. Dukungan seluruh komponen Bidang KBKR Perwakilan BKKBN DIY dalam bentuk arahan, kesempatan belajar, fasilitas, dan bimbingan mentor sangat membantu peserta diklat dalam menyelesaikan rancangan aktualisasi dengan baik. Selain itu, sub bidang lain, yaitu Subbidang Keuangan dan BMN mampu bekerjasama dengan baik terkait kegiatan distribusi dinamis alat kontrasepsi suntik dan pil yang dikirimkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Papua, dan Papua Barat. Namun, dalam pelaksanaan distribusi dinamis terdapat perbedaan jumlah yang dikirimkan dengan rencana awal distribusi. Kasus distribusi pil yang seharusnya dikirimkan sebanyak 225.000 cycle ke Provinsi Jawa Barat hanya dikirimkan sebanyak 175.000 cycle. Hal ini dikarenakan Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat meminta pil sebanyak 50.000 cycle. Distribusi suntik yang seharusnya dikirimkan sebanyak 327.000 vial ke Perwakilan BKKBN Provinsi Papua hanya dikirimkan 200.000 vial. Hal ini dikarenakan Perwakilan BKKBN Provinsi Papua hanya mampu menerima 200.000 vial melalui pemberitahuan surat Nomor 2880/SP.03.02/2019 tanggal 9 Oktober 2019 tentang realokasi Kontrasepsi Suntik.

Proses pelaksanaan aktualisasi tidak berjalan tanpa kendala. Beberapa kendala yang dialami antara lain:

- Pelaporan hasil revisi anggaran ke Subbag Keuangan dan BMN dilaksanakan tanggal 27 September 2019, mundur dari jadwal seharusnya yaitu 24 September 2019. Hal ini dikarenakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak berada di tempat pada tanggal 24 Oktober 2019 dan baru berada di tempat tanggal 27 Oktober 2019.

- Rapat koordinasi dengan PD IBI DIY dilaksanakan tanggal 7 Oktober 2019, mundur dari jadwal seharusnya yaitu 3 Oktober 2019. Hal ini dikarenakan pada tanggal 3 Oktober 2019 Bidang KBKR Perwakilan BKKBN DIY melaksanakan bakti sosial pelayanan KB MOW di RS HappyLand.
- Tahapan kegiatan 2-3 pada kegiatan 3 dan 4 baru bisa dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2019, seharusnya tanggal 9 Oktober 2019. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan jumlah pil dan suntik yang harus didistribusikan ke masing-masing kantor perwakilan Jawa Barat dan Papua. Kondisi ini mengharuskan Subbid Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta harus berkoordinasi intensif dengan Subbag keuangan dan BMN, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Papua, dan Papua Barat, serta dengan BKKBN Pusat.

B. Analisa Dampak jika Isu Tidak Dilaksanakan

Nilai Akuntabilitas jika tidak melekat pada pelaksanaan kegiatan 1 sampai kegiatan 5 akan menyebabkan perkembangan pelaksanaan yang dilakukan tidak dapat diketahui oleh atasan, karena tidak ada laporan kepada atasan atas apa yang telah kita laksanakan. Kondisi ini akan menyebabkan jika kita mengalami kendala, maka atasan tidak mengetahui dan tidak mampu memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Kendala yang tidak terselesaikan dengan baik akan mengakibatkan pelaksanaan kegiatan menjadi mundur bahkan tidak berhasil. Jika kegiatan mundur dari jadwal yang semestinya, maka pil dan suntik akan semakin mendekati masa kadaluarsa. Potensi kegagalan pelayanan KB menjadi lebih tinggi, di mana dengan sumber daya yang melimpah (*over stock*) tidak mampu meningkatkan cakupan pelayanan KB. Hal ini akan berdampak terhadap kredibilitas organisasi.

Nilai Nasionalisme, dalam hal ini adil dan berorientasi terhadap kepentingan publik jika tidak diaplikasikan dalam pelaksanaan kegiatan akan

mengakibatkan pelayanan KB tidak mencakup masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hal ini mengakibatkan angka *unmet need* sulit diturunkan.

Etika Publik ditunjukkan dalam bentuk sopan santun ketika berkoordinasi, ramah ketika berkoordinasi, dan tidak memaksakan kehendak ketika tujuan koordinasi kita belum tercapai. Nilai ini jika tidak diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan 1 sampai kegiatan 5 akan menghambat proses koordinasi dan kerjasama, baik antar subbidang dalam satu bidang, antar subbidang di luar bidang, antar kantor perwakilan BKKBN, BKKBN dengan mitra kerja, dan antara kantor perwakilan dengan BKKBN Pusat. Proses koordinasi dan kerjasama yang terhambat akan mengancam kelancaran dan kecepatan pelaksanaan distribusi dinamis pil dan suntik. Semakin lama proses pelaksanaan distribusi dinamis ini, maka masa tunggu pil dan suntik akan semakin singkat. Masa tunggu yang semakin singkat jika tetap digunakan akan mengurangi efektivitas metode kontrasepsi. Dengan kata lain, kemungkinan untuk mengalami kegagalan kontrasepsi lebih tinggi. Kegagalan kontrasepsi akan menyebabkan kinerja institusi dipertanyakan.

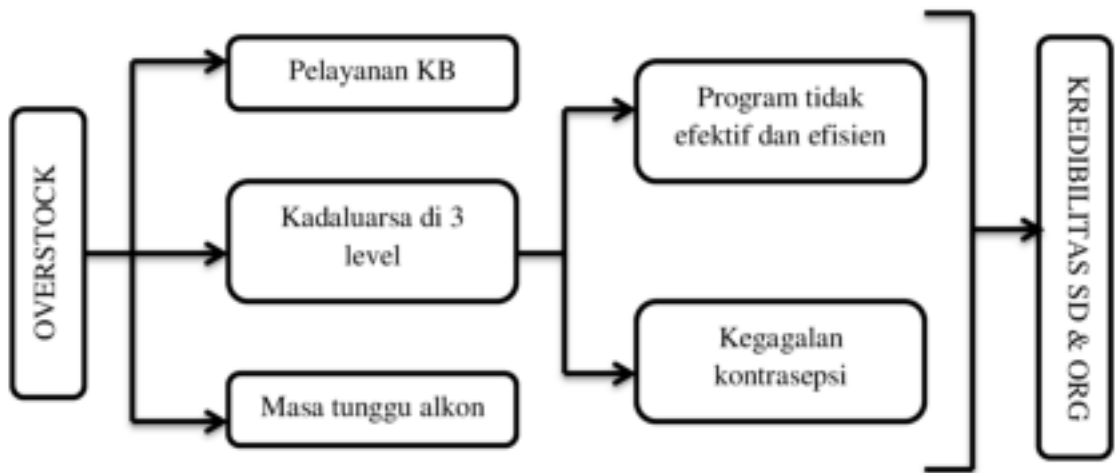
Selain itu, nilai *Whole of Government* jika tidak dilaksanakan maka distribusi dinamis tidak akan dapat terlaksana. Alkon suntik dan pil akan menumpuk di gudang BKKBN DIY, namun di Provinsi Jawa Barat, Papua, dan Papua Barat justru mengalami kekosongan. Kekosongan yang terjadi di 3 provinsi tersebut akan mengakibatkan pelayanan KB terganggu, bahkan berpotensi meningkatkan *unmet need* dan juga gagal meningkatkan *mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Ratio)*.

Peserta pelatihan dasar juga tidak akan memahami konsep Komitmen Mutu jika pelaksanaan kegiatan 1 sampai kegiatan 5 tidak didasarkan atas nilai tersebut. Dalam pengiriman surat permohonan koordinasi ke PD IBI DIY misalnya, dapat dilakukan bersamaan dengan pengiriman surat lain yang juga harus dikirimkan ke PD IBI DIY. Jika konsep efisiensi ini tidak dilaksanakan, maka waktu pengiriman menjadi lebih lama dan sumber daya yang digunakan

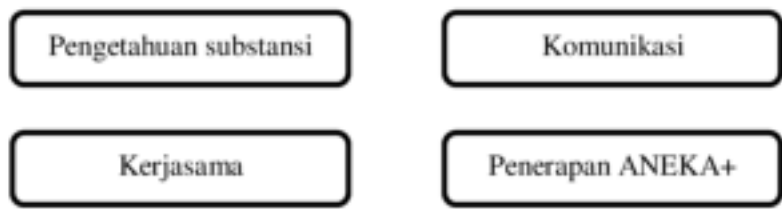
juga lebih banyak. Sebagai contoh, harus kembali ke kantor PD IBI DIY untuk mengirimkan surat yang berbeda, padahal hal tersebut bisa dilakukan secara bersamaan. Jika tidak bisa mengirimkan surat secara langsung, bisa jadi kita harus mengirimkan lewat kurir atau pos dengan biaya tambahan. Sedangkan jika dikirimkan bersamaan dengan surat lain maka akan menghemat biaya, tenaga, dan waktu yang dibutuhkan.

Nilai Anti Korupsi memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, Anti Korupsi memastikan bahwa alkon suntik dan pil yang dikirimkan ke Provinsi Papua Barat, Jawa Barat, dan Papua jumlahnya sesuai dengan jumlah yang tertera dalam surat permintaan dari provinsi terkait. Jika nilai Anti Korupsi tidak diterapkan, maka pelaksanaan rangkaian kegiatan menjadi terganggu. Hal ini akan berakibat masa kadaluarsa alkon lebih dekat, mengingat alkon akan kadaluarsa pada tahun 2020 untuk suntik dan tahun 2021 untuk pil. Jika jumlah yang dikirimkan tidak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam surat permintaan, maka akan mengakibatkan pelayanan KB di provinsi penerima menjadi terganggu jika jumlah alkon yang diterima kurang. Namun, jika alkon yang diterima jumlahnya berlebih, maka akan menjadi temuan di Provinsi DIY karena jumlah barang masuk tidak sesuai dengan jumlah abrang keluar ditambah dengan jumlah stok alkon di gudang provinsi. Hal ini jelas akan menimbulkan permasalahan baru bagi BKKBN DIY.

ORGANSIASI



INDIVIDU



C. Matriks Pelaksanaan Aktualisasi

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<p>Membantu melakukan revisi anggaran kegiatan Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta untuk mendukung bhaksos suntik melalui PD IBI DIY</p> <p>Kegiatan ini mencerminkan nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi, Pelayanan Publik, dan <i>Whole of Government</i></p>	Mengumpulkan bahan penyusunan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan.	23 September 2019	Dokumen rencana kegiatan (Output 1.1) dan gambar 1.1			<p>1. Menyesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat, di mana bhaksos ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat khususnya di kabupaten tempat pelaksanaan bhaksos. Hal ini dikarenakan terdapat 3 kabupaten di DIY yang belum mempunyai dana bhaksos, yaitu Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Melakukan kegiatan yang dilaksanakan sesuai kepentingan masyarakat dan bukan hanya kepentingan golongan merupakan prinsip Nasionalisme, yaitu ASN sebagai pelayan publik.</p> <p>2. Mengumpulkan bahan penyusunan bentuk kegiatan juga dilakukan</p>	<p>Dalam rangka mencapai visi BKKBN mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Dengan merevisi anggaran subbidang, diharapkan dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan bhaksos. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperluas cakupan</p>	<p>Revisi anggaran subbidang dilakukan dalam rangka mengetahui pos anggaran mana yang masih memiliki sisa anggaran untuk dapat digunakan pada kegiatan lainnya. Hal ini sangat penting untuk mengefisienkan anggaran. Konsep efisiensi ini merupakan unsur dalam nilai BKKBN, yaitu CERDAS.</p> <p>Mengumpulkan bahan penyusunan bentuk kegiatan (bhaksos) dilakukan dengan bertanya kepada</p>

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							<p>dengan koordinasi dengan atasan. Pelaksanaan persiapan ini dilakukan dengan komunikasi yang baik, sopan, santun, dan mau menerima setiap ilmu baru yang didapatkan. Konsep ini sejalan dengan nilai Etika Publik.</p> <p>3. Mengumpulkan bahan juga dilakukan dengan bertanya kepada subbidang lain. Hal ini dikarenakan bentuk kegiatan bhaksos umumnya dilakukan oleh Subbidang Bina Kesertaan KB Jawilsus. Konsep kerjasama ini sejalan dengan nilai <i>Whole of Government</i> (WoG).</p> <p>4. Menyusun draf kegiatan yang akan dilaksanakan juga dilakukan dengan memastikan tidak adanya kesalahan tulisan dan</p>	<p>kepesertaan KB. Memperluas cakupan kepesertaan KB masuk ke dalam misi BKKBN menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.</p>	<p>subbidang lain terkait komponen apa saja yang harus disiapkan. Dalam pelaksanaan bhaksos, umumnya ada belanja bahan, belanja sewa, belanja jasa lainnya, dan belanja perjalanan biasa. Kerjasama, sinergisitas antar staf dalam satu subbidang maupun antar subbidang sesuai dengan nilai BKKBN, yaitu KERJASAMA.</p> <p>Proses revisi anggaran harus pula dilakukan secara jujur, terbuka, dan sungguh-sungguh. Proses ini juga harus dilaporkan kepada Subbagian Keuangan dan BMN. Konsep ini</p>

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							<p>konten. Aspek ketelitian ini masuk dalam nilai Komitmen Mutu.</p> <p>5. Setelah draf selesai dibuat, draf juga dikomunikasikan kepada atasan. Hal ini sesuai dengan nilai Akuntabilitas, dimana salah satu dimensi akuntabilitas adalah akuntabilitas memerlukan laporan.</p>		<p>sesuai dengan nilai BKKBN INTEGRITAS.</p> <p>Menjalankan semua tahapan kegiatan dilakukan dengan hati yang gembira, tidak banyak mengeluh, dan bekerja untuk ibadah. Konsep ini sejalan dengan nilai BKKBN yaitu IKHLAS.</p> <p>Membantu mencermati ketersediaan anggaran dan menyesuaikan bentuk kegiatan dengan ketersediaan anggaran memerlukan pengalaman, kecermatan, dan pemahaman. Belum lamanya peserta</p>

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
									diklat berada di subbid terkait menjadikan pemahaman sedikit sulit untuk dicapai. Namun, peserta diklat tidak putus asa, terus bertanya. Konsep ini sejalan dengan nilai BKKBN yaitu TANGGUH.
		Membantu mencermati ketersediaan anggaran	23 September 2019	Dokumen (output 1.2) dan gambar 1.2			<p>1. Secara cermat melihat dan menghitung berapa anggaran yang telah terpakai, untuk apa saja, dan pada item mana saja anggaran yang masih dapat direvisi. Proses ini dilakukan secara cermat agar tidak terjadi kesalahan hitung. Prinsip ini sejalan dengan nilai Akuntabilitas.</p> <p>2. Meminimalisir kesalahan juga bertujuan mengurangi proses lamanya pengerjaan membantu revisi</p>		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							anggaran. Dengan kata lain, efisiensi menjadi hal yang diperhatikan. Hal ini sejalan dengan nilai Komitmen Mutu, di mana efisiensi merupakan salah satu unsur dalam Komitmen Mutu.		
		Membantu menyesuaikan bentuk kegiatan dengan ketersediaan anggaran	23 September 2019	Dokumen (output 1.2) dan gambar 1.3			<p>1. Membantu proses penyesuaian anggaran dengan penuh tanggung jawab, mengerjakan setiap pekerjaan yang ditugaskan dengan tanggung jawab. Rasa tanggung jawab dalam bekerja merupakan salah satu nilai Akuntabilitas. Selain itu, rasa tanggung jawab merupakan satu dari Sembilan konsep Anti Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Modul Anti Korupsi)</p> <p>2. Menyampaikan gagasan dengan baik, santun kepada atasan. Aspek ini masuk dalam nilai Etika</p>		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							Publik.		
		Membantu revisi anggaran	23 September 2019	Dokumen (output 1.2) dan gambar 1.4			<p>1. Memastikan tidak ada agenda kegiatan lain yang tidak dapat terlaksana dengan adanya revisi anggaran. Hal ini dapat dipastikan karena sisa anggaran yang ada merupakan hasil dari anggaran yang sudah digunakan untuk kegiatan. Konsep ini sejalan dengan rasa adil yang merupakan salah satu nilai dari Nasionalisme.</p> <p>2. Menyesuaian dengan aturan yang berlaku, di mana akun dengan kode awal 524 tidak boleh direvisi menjadi nilai yang lebih besar. Konsep ini sejalan dengan Etika Publik kita sebagai ASN dan sikap Anti Korupsi.</p> <p>3. Memastikan tidak ada kesalahan peserta diklat dalam membantu revisi</p>		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							<p>anggaran. Ketelitian masuk dalam nilai Akuntabilitas. Ketelitian juga berguna dalam mempercepat kinerja sebagai bentuk efisiensi. Efisiensi merupakan salah satu nilai dalam Komitmen Mutu.</p> <p>4. Merevisi anggaran subbidang juga dilakukan sesuai tujuan awal, yaitu mencari dana untuk kegiatan bhaksos suntik dari sisa dana kegiatan lain. Hal ini semata-mata agar kegiatan bhaksos dapat dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Konsep ini sesuai dengan konsep Nasionalisme dan Pelayanan Publik.</p>		
		Membuat draf pengajuan revisi anggaran dari Bidang KB-KR ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	23 September 2019	Dokumen draf pengajuan revisi anggaran (output 1.5)			1. Menyelesaikan draf pengajuan revisi anggaran sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penyelesaian tugas dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							<p>Akuntabilitas dan Anti Korupsi.</p> <p>2. Pembuatan draf revisi anggaran disesuaikan dengan jumlah hasil revisi yang telah disepakati, tidak menambah ataupun mengurangi. Konsep ini sesuai dengan nilai Anti Korupsi.</p> <p>3. Setelah draf selesai dibuat, draf dilaporkan kepada atasan sebagai bagian dari Akuntabilitas dan kendali mutu dari pengawas kepada pelaksana. Kendali mutu ini sesuai dengan nilai Komitmen Mutu.</p>		
		Membuat draf pengajuan revisi anggaran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	24 September 2019	Dokumen draf pengajuan revisi anggaran (output 1.6)			1. Menyelesaikan draf pengajuan revisi anggaran sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penyelesaian tugas dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai Akuntabilitas dan Anti		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							<p>Korupsi.</p> <p>2. Pembuatan draf revisi anggaran disesuaikan dengan jumlah hasil revisi yang telah disepakati, tidak menambah ataupun mengurangi. Konsep ini sesuai dengan nilai Anti Korupsi.</p> <p>3. Setelah draf selesai dibuat, draf dilaporkan kepada atasan sebagai bagian dari Akuntabilitas dan kendali mutu dari pengawas kepada pelaksana. Kendali mutu ini sesuai dengan nilai Komitmen Mutu.</p>		
		Membuat draf surat persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran atas revisi anggaran	24 September 2019	Dokumen draf surat persetujuan (output 1.7)			0 Memastikan bahwa draf surat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab terhadap pekerjaan, di mana tanggung jawab merupakan nilai dalam Akuntabilitas		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							<p>dan Anti Korupsi.</p> <p>1 Memastikan bahwa tidak ada kesalahan ketik dalam draf surat persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas revisi anggaran. Konsep ketelitian ini sejalan dengan nilai Akuntabilitas. Tidak adanya kesalahan peserta diklatan juga mengurangi waktu pengerjaan sehingga menjadi lebih efisien. Selain itu, sumber daya tinta dan kertas menjadi lebih hemat. Konsep efisiensi ini sejalan dengan nilai Komitmen Mutu.</p>		
		Melaporkan hasil revisi ke Subbag Keuangan dan BMN	27 September 2019	Dokumen laporan hasil revisi (output 1.2 dan 1.8) dan gambar 1.5	Mundurinya jadwal pelaporan dikarenakan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak berada di tempat	Melakukan koordinasi dengan sekretaris KPA serta menyiapkan dokumen yang diperlukan terlebih	1. Memberikan laporan tertulis sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas. Konsep ini sejalan dengan nilai Akuntabilitas itu sendiri dan juga Etika Publik. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua aspek dalam dimensi		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
						dahulu agar jika KPA sudah berada di kantor, dokumen cepat diproses.	<p>modalitas. Sedangkan dimensi modalitas merupakan satu dari tiga dimensi Etika Publik.</p> <p>2. Memberikan laporan tersebut secara langsung kepada Subbagian Keuangan dan BMN agar laporan cepat sampai dan diterima oleh pihak terkait. Hal ini sesuai dengan prinsip WoG.</p> <p>3. Menyampaikan laporan apa adanya berdasarkan hasil keputusan sebelumnya, tidak ada penambahan dan pengurangan. Konsep ini sejalan dengan nilai Anti Korupsi. Selain itu, mengerjakan pekerjaan sesuai fakta di lapangan merupakan bentuk integritas dan profesionalisme. Kedua nilai ini masuk ke dalam prinsip Nasionalisme.</p>		
2	Mengumpulkan	Membuat draf	24 September	Dokumen	Pelaksanaan		1. Memastikan tidak ada	Dalam rangka	Bhaksos suntik

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
	<p>bahan kerjasama persiapan bakti sosial suntik dengan PD IBI DIY</p> <p>Kegiatan ini mencerminkan nilai Akuntabilitas, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi, dan <i>Whole of Government</i></p>	surat permohonan koordinasi dengan PD IBI DIY	2019	(output 2.1)	lebih cepat dari jadwal, karena sekaligus akan diserahkan bersamaan dengan surat lainnya karena tujuan yang sama yaitu Ketua PD IBI DIY		<p>kesalahan tulis dan konten dalam penyusunan draf surat permohonan koordinasi, dengan kata lain proses ini dilakukan dengan teliti. Teliti merupakan salah satu nilai dari Akuntabilitas. Meminimalisir kesalahan juga menjadikan waktu yang diperlukan dalam proses pembuatan menjadi lebih singkat, kertas dan tinta yang digunakan lebih sedikit sehingga akan lebih efisien. Efisien masuk ke dalam konsep Komitmen Mutu.</p> <p>2. Memberikan draf kepada atasan langsung untuk dikoreksi sebagai bentuk Akuntabilitas. Selain itu, draf juga diberikan kepada kepala bidang sebelum dimintakan tanda tangan Plt. Kepala Perwakilan. Hal ini sebagai bentuk</p>	<p>mencapai visi BKKBN mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Dengan merevisi anggaran subbidang, diharapkan dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan bhaksos. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperluas cakupan kepesertaan KB. Memperluas cakupan kepesertaan KB</p>	<p>dilaksanakan dengan mitra kerja PD IBI DIY sebagai penerapan salah satu nilai BKKBN, yaitu KERJASAMA.</p> <p>Proses kerjasama mulai dari rapat koordinasi ini dilaksanakan dengan penyesuaian jadwal antara Bidang KB-KR dengan PD IBI DIY. Proses ini dilalui dengan konfirmasi berkala yang dilakukan dengan rasa pantang menyerah. Hal ini sesuai dengan nilai BKKBN yaitu TANGGUH.</p> <p>Bhaksos suntik dengan PD IBI DIY dilaksanakan</p>

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							<p>profesionalisme kerja dan sebagai kendali mutu dari administrator-pengawas-pelaksana. Sikap profesionalisme dan kendali mutu termasuk ke dalam nilai Komitmen Mutu.</p> <p>3. Membuat draf dengan penuh rasa tanggung jawab dan dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Rasa tanggung jawab masuk ke dalam nilai Akuntabilitas dan Anti Korupsi.</p>	<p>masuk ke dalam misi BKKBN menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.</p>	<p>sebagai salah satu bentuk memanfaatkan alkon dan dana hasil revisi. Alkon suntik dan pil di gudang perwakilan yang sangat banyak harus dimanfaatkan untuk pelayanan agar tidak sampai kadaluarsa. Selain itu, tujuan meningkatkan akseptor KB (mCPR/Modern Contraceptive Prevalence Rate) dapat tercapai. Bekerja secara efektif dan efisien merupakan salah satu pengamalan nilai BKKBN, yaitu CERDAS.</p> <p>Setiap tahapan kegiatan walaupun harus melakukan revisi draf surat</p>

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
									berkali-kali dan melakukan <i>follow up</i> berkali-kali naun tetap harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tulus, dan sungguh-sungguh. Hal ini sesuai dengan salah satu nilai BKKBN yaitu IKHLAS.
		Meminta paraf atasan, paraf kepala bidang, dan tanda tangan Plt. Kepala Perwakilan BKKBN DIY	25 September 2019	Dokumen surat (output 2.2)			1. Meminta paraf kepada atasan dan kepala bidang sebelum ditandatangani oleh Plt. Kepala Perwakilan merupakan salah satu bentuk kendali mutu berjenjang, di mana atasan dan kepala bidang bisa mengoreksi draf surat yang dibuat sebelum dimintakan tanda tangan kepada Plt. Kepala Perwakilan. Konsep ini sejalan dengan Komitmen Mutu dan Akuntabilitas. 2. Dalam meminta tanda tangan dan paraf		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							dilakukan dengan sopan sanun, ramah, dan senyum. Hal ini sejalan dengan nilai Etika Publik.		
		Melakukan penomoran surat dan cap lembaga berkoordinasi dengan Sekretariat	25 September 2019	Dokumen surat (output 2.3)			<ol style="list-style-type: none"> 1. Penomoran dan cap lembaga dilakukan atas dasar koordinasi dengan bagian Sekretariat, yaitu Bagian Arsiparis Sekretariat. Konsep kerjasama dengan bidang lain termasuk dalam pengalaman nilai <i>Whole of Government</i>. 2. Koordinasi dengan bagian Arsiparis dilakukan dengan sopan, santun, ramah. Konsep ini sejalan dengan nilai Etika Publik. 		
		Melakukan pengarsipan surat keluar bidang	25 September 2019	Dokumen surat (output 2.3)			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarsipan dilakukan segera setelah surat dikeluarkan agar tidak terjadi kelalaian dan tertib administrasi dalam pengarsipan. Konsep ini sejalan dengan Akuntabilitas. 2. Pengarsipan juga 		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							dilakukan tanpa menggunakan cap lembaga, agar jika sewaktu-waktu diperlukan surat masih bisa digunakan dengan cap basah. Konsep ini sejalan dengan Komitmen Mutu.		
		Mengirimkan surat ke PD IBI DIY	25 September 2019	Dokumen surat (output 2.3)	Bukti penerimaan tidak bisa didapatkan karena kantor PD IBI DIY kosong saat surat diantarkan. Bukti pengiriman juga tidak bisa diperoleh karena dikirimkan langsung oleh rekan kerja (sesama pelaksana subbidang kami)	Koordinasi via WA dengan PD IBI DIY jika surat sudah dikirimkan	1. Pengiriman surat koordinasi ke PD IBI DIY dilakukan bersamaan dengan pengiriman surat undangan <i>International Conference on Indonesia Family Planning and Reproductive Health (ICIFPRH)</i> . Hal ini sesuai dengan konsep efisiensi, di mana efisiensi termasuk dalam Komitmen Mutu. 2. Pengiriman surat dilakukan oleh rekan pelaksana. Komunikasi untuk meminta bantuan dilakukan dengan sopan, senyum, dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Prinsip ini sesuai		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							dengan nilai Etika Publik.		
		Membantu kelancaran Rapat Koordinasi dengan PD IBI DIY	7 Oktober 2019	Foto (Gambar 2.1 dan gambar 2.2)	Waktu pelaksanaan mundur dikarenakan pada tanggal 3 September 2019 (jadwal yang sesungguhnya) Bidang KB-KR memiliki agenda kegiatan lain	Merubah jadwal pelaksanaan menjadi tanggal 7 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan kebutuhan bahan rapat koordinasi dengan penuh tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prinsip Akuntabilitas dan Anti Korupsi. 2. Melakukan <i>job desk</i> (notulen) pada hari pelaksanaan koordinasi secara mandiri, termasuk memastikan perangkat laptop yang digunakan dalam kondisi prima. Kemandirian merupakan salah satu nilai Anti Korupsi. 3. Melakukan kerjasama dengan staf subbidang lain terkait persiapan rakor karena rakor tidak hanya membahas bhaksos yang diselenggarakan Subbid Bina Kesertaan KB Jalpemswa, namun juga bhaksos dari Subbid Kespro yang juga 		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							bekerjasama dengan PD IBI DIY. Konsep ini sejalan dengan <i>Whole of Government</i> dan Komitmen Mutu.		
		Membuat notulensi hasil rapat koordinasi dengan IBI	7 Oktober 2019	Notulensi hasil rapat koordinasi (output 2.4)			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan notulensi yang dibuat sudah mencakup semua hal yang didiskusikan dalam kegiatan. Selain itu, juga dipastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam pembuatan notulensi. Ketelitian dalam bekerja merupakan aspek Akuntabilitas dan Anti Korupsi. 2. Membuat notulen secara mandiri dan inisiatif, walaupun tidak diminta untuk menjadi notulen. Sikap mandiri dan inisiatif merupakan bentuk pengalaman Anti Korupsi. 3. Membuat <i>template</i> notulen yang memudahkan memahami 		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							hasil dan rencana tindak lanjut kegiatan, hal ini sejalan dengan nilai Komitmen Mutu.		
		Melaporkan hasil notulensi rapat kepada atasan	7 Oktober 2019	Output 2.4			<p>1. Melaporkan hasil notulensi segera setelah rapat dilaksanakan. Konsep ini sejalan dengan Akuntabilitas. Selain itu, melaporkan hasil notulensi dengan segera bermanfaat untuk mempercepat rangkaian kegiatan yang lain sebagai bentuk persiapan pelaksanaan bakti sosial. Hal ini sejalan dengan nilai Anti Korupsi.</p> <p>2. Memberikan laporan kegiatan dengan sikap ramah, senyum, dan sopan santun. Hal ini sesuai dengan nilai Etika Publik.</p>		
3	Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi pil	Melakukan koordinasi dengan Subbagian Keuangan dan BMN terkait	27 September 2019	Gambar 3.1	Dilakukan lebih awal	Antisipasi revisi anggaran dari Bagian Perencanaan	1. Sesegera mungkin melakukan koordinasi dengan Subbagian Keuangan dan BMN untuk memastikan dana	Dalam rangka mencapai visi BKKBN mewujudkan penduduk tumbuh	Menjalin kerjasama dengan perwakilan BKKBN provinsi lain, dalam hal ini Perwakilan

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
	<p>dengan Provinsi Jawa Barat</p> <p>Kegiatan ini mencerminkan nilai WoG, Etika Publik, Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Anti Korupsi, Komitmen Mutu, dan Nasionalisme.</p>	kesiapan anggaran untuk re-alokasi/distribusi dinamis.				belum selesai	<p>segera siap. Hal ini sesuai dengan konsep <i>Whole of Government</i> dan Pelayanan Publik.</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan Subbagian Keuangan dan BMN secara sopan, ramah, tidak memaksakan kehendak ingin cepat-cepat selesai. Konsep ini sesuai dengan Etika Publik.</p>	<p>seimbang dan keluarga berkualitas maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Re-alokasi alkon/distribusi dinamis merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan alkon pil di Jawa Barat sampai tahun 2021. Antisipasi kekurangan alkon ini dapat mencegah gagalnya akseptor untuk ber-KB. Dengan kata lain, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan</p>	<p>BKKBN Provinsi Jawa Barat masuk dalam nilai BKKBN yaitu KERJASAMA.</p> <p>Re-alokasi atau distribusi dinamis juga merupakan penerapan dari memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil maksimal. Hal ini juga untuk meminimalisir kemungkinan kadaluarsa alkon. Konsep ini sejalan dengan nilai BKKBN yaitu CERDAS.</p> <p>Pelaksanaan tahapan kegiatan dari mulai koordinasi dengan Subbagian Keuangan dan BMN sampai</p>

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
								<p>target mCPR. Selain itu, kegiatan ini bertujuan menghindari adanya alkon yang kadaluarsa dan tidak dimanfaatkan sampai tahun 2021.</p>	<p>membuat draf laporan dilakukan dengan rasa tanggung jawab dan terbuka. Konsep ini sejalan dengan nilai BKKBN yaitu INTEGRITAS.</p> <p>Setiap tahapan kegiatan yang dilakukan, dijalani dengan sungguh-sungguh, ikhlas agar bernilai ibadah. Konsep ini sejalan dengan nilai BKKBN yaitu IKHLAS.</p> <p>Koordinasi dengan Subbagian Keuangan dan BMN untuk memantau kesiapan revisi anggaran terkait sumber dana untuk re-alokasi alkon dilakukan secara intensif dan</p>

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
									tidak mudah menyerah. Konsep ini sejalan dengan nilai BKKBN yaitu TANGGUH.
		Membuat draf rencana distribusi pil ke Provinsi Jawa Barat	10 Oktober 2019	Draf rencana distribusi (output 3.2)	Pelaksanaan menunggu surat revisi jumlah pengiriman, jadi rensi baru dapat dibuat tanggal 10 Oktober 2019	Menunda pembuatan rensi, sambil terus berkoordinasi dengan Subbag Keuangan dan BMN	1. Memastikan bahwa draf rencana distribusi pil ke Provinsi Jawa Barat dibuat sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, yaitu sejumlah 175.000 vial. Hal ini dikarenakan Perwakilan Provinsi Papua Barat meminta 50.000 vial pil sehingga jumlah yang dikirimkan ke Jawa Barat berkurang dari 225.000 vial menjadi 175.000 vial. Ketelitian termasuk ke dalam nilai Akuntabilitas. Ketelitian juga mengurangi waktu pembuatan draf serta mempersingkat proses distribusi dinamis. Hal ini sejalan dengan nilai Anti Korupsi. 2. Melaporkan kepada		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							atasan sebelum draf rencana distribusi ditandatangani oleh kepala bidang dan plt sekretaris. Hal ini sejalan dengan nilai transparansi yang masuk ke dalam dimensi modalitas, di mana dimensi modalitas termasuk ke dalam nilai Etika Publik.		
		Membuat draf surat perintah mengeluarkan barang ke bendahara materiil	10 Oktober 2019	Draf surat perintah mengeluarkan barang (output 3.3)	Pelaksanaan menunggu surat revisi jumlah pengiriman, jadi rensi baru dapat dibuat tanggal 10 Oktober 2019	Menunda pembuatan surat perintah mengeluarkan barang, sambil terus berkoordinasi dengan Subbag Keuangan dan BMN	<p>1. Memastikan bahwa draf yang dibuat sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat rencana distribusi. Hal ini sesuai dengan nilai Akuntabilitas. Ketelitian dalam menuliskan jumlah barang yang tertera dalam surat perintah mengeluarkan barang akan mempercepat proses distribusi barang. Hal ini sejalan dengan nilai Anti Korupsi.</p> <p>2. Memastikan bahwa dalam surat perintah mengeluarkan barang tertulis informasi batas</p>		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							<p>tahun produksi dan tahun kadaluarsa sesuai dengan kondisi riil di gudang provinsi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas dari alkon dan merupakan bagian dari prinsip Komitmen Mutu. Selain itu, kualitas alkon akan menunjang pelayanan program KB. Hal ini sejalan dengan nilai nasionalisme yaitu ASN pelayan publik.</p> <p>3. Melaporkan kepada atasan draf yang telah dibuat sebelum ditandatangani oleh kepala bidang KB-KR dan Plt. Sekretaris. Hal ini sejalan dengan nilai Akuntabilitas.</p> <p>4. Proses pembuatan draf tidak usah menunggu instruksi atasan. Inisiatif sendiri segera setelah mendapatkan info dari Subbag Keuangan dan BMN jika dana untuk</p>		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							distribusi dinamis telah siap. Inisiatif akan memangkas waktu pelaksanaan tahapan kegiatan. Hal ini sejalan dengan konsep Anti Korupsi.		
		Membuat draf laporan ke Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	28 Oktober 2019	Output 3.4 dan bukti 3.4, gambar 3.2-3.4	Dilakukan lebih awal dari jadwal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pembuatan draf surat laporan dilakukan bersamaan dengan kegiatan 4 dan 5, yaitu distribusi ke Perwakilan BKKBN Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini untuk efisiensi pelaporan. Efisiensi pelaporan termasuk dalam nilai Komitmen Mutu. 2. Sebelum surat dimintakan tanda tangan Plt. Kepala Perwakilan, terlebih dahulu diperiksa oleh atasan. Hal ini sejalan dengan konsep Akuntabilitas. 3. Mencantumkan tanggal diterimanya alkon oleh provinsi penerima dengan 		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							berkoordinasi dengan Subbid Keuangan dan BMN. Hal ini sesuai dengan nilai <i>Whole of Government</i> . 4. Mencantumkan tahun kadaluarsa alkon di draf surat laporan sebagai bentuk menjaga mutu alkon. Hal ini sesuai dengan nilai Komitmen Mutu. Selain itu, informasi tahun kadaluarsa alkon sangat penting dalam memastikan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Konsep ini sejalan dengan nilai pelayanan publik, di mana nilai pelayanan publik termasuk dalam nilai Nasionalisme.		
4	Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi suntik dengan Provinsi Papua	Melakukan koordinasi dengan Subbagian Keuangan dan BMN terkait kesiapan anggaran untuk re-	27 September 2019	Gambar 4.1	Dilakukan lebih awal	Antisipasi revisi anggaran dari Bagian Perencanaan belum selesai	1. Sesegera mungkin melakukan koordinasi dengan Subbagian Keuangan dan BMN untuk memastikan dana segera siap. Hal ini sesuai dengan konsep <i>Whole of</i>	Dalam rangka mencapai visi BKKBN mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga	Menjalin kerjasama dengan perwakilan BKKBN provinsi lain, dalam hal ini Perwakilan BKKBN Provinsi Papua masuk dalam

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
	Kegiatan ini mencerminkan nilai WoG, Etika Publik, Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Anti Korupsi, Komitmen Mutu, dan Nasionalisme.	alokasi/distribusi dinamis.					<p><i>Government</i> dan Pelayanan Publik.</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan Subbagian Keuangan dan BMN secara sopan, ramah, tidak memaksakan kehendak ingin cepat-cepat selesai. Konsep ini sesuai dengan Etika Publik.</p>	berkualitas maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Re-alokasi alkon/distribusi dinamis merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan alkon pil di Jawa Barat sampai tahun 2021. Antisipasi kekurangan alkon ini dapat mencegah gagalnya akseptor untuk ber-KB. Dengan kata lain, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan target Modern <i>Contraceptive</i>	<p>nilai BKKBN yaitu KERJASAMA.</p> <p>Re-alokasi atau distribusi dinamis juga merupakan penerapan dari memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil maksimal. Hal ini juga untuk meminimalisir kemungkinan kadaluarsa alkon. Konsep ini sejalan dengan nilai BKKBN yaitu CERDAS.</p> <p>Pelaksanaan tahapan kegiatan dari mulai koordinasi dengan Subbagian Keuangan dan BMN sampai membuat draf laporan dilakukan dengan rasa</p>

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
								<p><i>Prevalence Rate</i> (mCPR). Selain itu, kegiatan ini bertujuan menghindari adanya alkon yang kadaluarsa dan tidak dimanfaatkan sampai tahun 2021.</p>	<p>tanggung jawab dan terbuka. Konsep ini sejalan dengan nilai BKKBN yaitu INTEGRITAS.</p> <p>Setiap tahapan kegiatan yang dilakukan, dijalani dengan sungguh-sungguh, ikhlas agar bernilai ibadah. Konsep ini sejalan dengan nilai BKKBN yaitu IKHLAS.</p> <p>Koordinasi dengan Subbagian Keuangan dan BMN untuk memantau kesiapan revisi anggaran terkait sumber dana untuk re-alokasi alkon dilakukan secara intensif dan tidak mudah menyerah. Konsep</p>

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
									ini sejalan dengan nilai BKKBN yaitu TANGGUH.
		Membuat draf rencana distribusi suntik ke Provinsi Papua	10 Oktober 2019	Draf rencana distribusi (output 4.2)	Pelaksanaan menunggu surat revisi jumlah pengiriman, jadi rensi baru dapat dibuat tanggal 10 Oktober 2019	Menunda pembuatan rensi, sambil terus berkoordinasi dengan Subbag Keuangan dan BMN	1. Memastikan bahwa draf rencana distribusi suntik ke Provinsi Papua dibuat sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, yaitu sejumlah 200.000 cycle. Hal ini dikarenakan Perwakilan Provinsi Papua hanya sanggup menerima 200.000 cycle sehingga jumlah yang dikirimkan ke Papua berkurang dari 327.000 vial menjadi 200.000 vial lengkap dengan Autodisposable sebanyak 100.000 buah. Ketelitian termasuk ke dalam nilai Akuntabilitas. Ketelitian juga mengurangi waktu pembuatan draf serta mempersingkat proses distribusi dinamis. Hal ini sejalan dengan nilai Anti Korupsi. 2. Melaporkan kepada		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							atasan sebelum draf rencana distribusi ditandatangani oleh kepala bidang dan plt sekretaris. Hal ini sejalan dengan nilai transparansi yang masuk ke dalam dimensi modalitas, di mana dimensi modalitas termasuk ke dalam nilai Etika Publik.		
		Membuat draf surat perintah mengeluarkan barang ke bendahara materiil	10 Oktober 2019	Draf surat perintah mengeluarkan barang (output 4.3)	Pelaksanaan menunggu surat revisi jumlah pengiriman, jadi rensi baru dapat dibuat tanggal 10 Oktober 2019	Menunda pembuatan surat perintah mengeluarkan barang, sambil terus berkoordinasi dengan Subbag Keuangan dan BMN	1. Memastikan bahwa draf yang dibuat sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat rencana distribusi. Hal ini sesuai dengan nilai Akuntabilitas. Ketelitian dalam menuliskan jumlah barang yang tertera dalam surat perintah mengeluarkan barang akan mempercepat proses distribusi barang. Hal ini sejalan dengan nilai Anti Korupsi. 2. Memastikan bahwa dalam surat perintah mengeluarkan barang tertulis informasi batas		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							<p>tahun produksi dan tahun kadaluarsa sesuai dengan kondisi riil di gudang provinsi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas dari alkon dan merupakan bagian dari prinsip Komitmen Mutu. Selain itu, kualitas alkon akan menunjang pelayanan program KB. Hal ini sejalan dengan nilai nasionalisme yaitu ASN pelayan publik.</p> <p>3. Melaporkan kepada atasan draf yang telah dibuat sebelum ditandatangani oleh kepala bidang KB-KR dan Plt. Sekretaris. Hal ini sejalan dengan nilai Akuntabilitas.</p> <p>4. Proses pembuatan draf tidak usah menunggu instruksi atasan. Inisiatif sendiri segera setelah mendapatkan info dari Subbag Keuangan dan BMN jika dana untuk</p>		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							distribusi dinamis telah siap. Inisiatif akan memangkas waktu pelaksanaan tahapan kegiatan. Hal ini sejalan dengan konsep Anti Korupsi.		
		Membuat draf laporan ke Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	28 Oktober 2019	Output 4.4 dan bukti 4.4, gambar 4.2	Dilakukan lebih awal dari jadwal		<p>1. Proses pembuatan draf surat laporan dilakukan bersamaan dengan kegiatan 3 dan 5, yaitu distribusi ke Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat dan Papua Barat. Hal ini untuk efisiensi pelaporan. Efisiensi pelaporan termasuk dalam nilai komitmen mutu.</p> <p>2. Sebelum surat dimintakan tanda tangan Plt. Kepala Perwakilan, terlebih dahulu diperiksa oleh atasan. Hal ini sejalan dengan konsep Akuntabilitas.</p> <p>3. Mencantumkan tanggal diterimanya alkon oleh provinsi penerima dengan</p>		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							berkoordinasi dengan Subbid Keuangan dan BMN. Hal ini sesuai dengan nilai <i>Whole of Government</i> . 4. Mencantumkan tahun kadaluarsa alkon di draf surat laporan sebagai bentuk menjaga mutu alkon. Hal ini sesuai dengan nilai Komitmen Mutu. Selain itu, informasi tahun kadaluarsa alkon sangat penting dalam memastikan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Konsep ini sejalan dengan nilai Pelayanan Publik, di mana menyadari akan ASN sebagai pelayan public merupakan salah satu sifat Nasionalisme.		
5	Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi pil dengan	Membuat draf perubahan rencana distribusi pil kepada Sekretaris Utama BKKBN dan Biro	3 Oktober 2019	Dokumen surat perubahan rencana distribusi (output 5.1)	Dilakukan atas permintaan Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat		1. Segera membuat draf surat perubahan rencana distribusi pil kepada Sekretaris Utama BKKBN dan Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN	Dalam rangka mencapai visi BKKBN mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan	Menjalin kerjasama dengan perwakilan BKKBN provinsi lain, dalam hal ini Perwakilan BKKBN Provinsi

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
	Provinsi Papua Barat Kegiatan ini masuk dalam nilai Komitmen Mutu, Akuntabilitas, Anti Korupsi, Etika public, WoG, Pelayanan Publik, dan Nasionalisme.	Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN					<p>BKKBN setelah mendapatkan surat permintaan pil dari BKKBN Provinsi Papua Barat. Hal ini sesuai dengan konsep Komitmen Mutu, di mana kita segera menindaklanjuti permintaan dari provinsi terkait.</p> <p>2. Memastikan bahwa jumlah yang tertera dalam perubahan rencana distribusi dinamis pil sudah sesuai dengan perhitungan yang ada. Provinsi Papua Barat meminta 50.000 cycle pil, sementara kami merubah kesediaan distribusi dinamis pil ke Provinsi Jawa Barat dari 225.000 cycle menjadi 175.000 cycle. Hal ini sesuai dengan nilai Akuntabilitas dan Anti Korupsi.</p> <p>3. Menjalin komunikasi yang baik dan sopan dengan</p>	<p>keluarga berkualitas maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Re-alokasi alkon/ distribusi dinamis merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan alkon pil di Papua Barat sampai tahun 2021. Antisipasi kekurangan alkon ini dapat mencegah gagalnya akseptor untuk ber-KB. Dengan kata lain, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan target mCPR.</p>	<p>Papua Barat masuk dalam nilai BKKBN yaitu KERJASAMA.</p> <p>Re-alokasi atau distribusi dinamis juga merupakan penerapan dari memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil maksimal. Hal ini juga untuk meminimalisir kemungkinan kadaluarsa alkon. Konsep ini sejalan dengan nilai BKKBN yaitu CERDAS.</p> <p>Pelaksanaan tahapan kegiatan dari mulai koordinasi dengan Subbagian Keuangan dan BMN sampai membuat draf</p>

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat terkait kepastian tanggal pengambilan pil ke gudang Provinsi DIY. Konsep ini sejalan dengan nilai Etika Publik.	Selain itu, kegiatan ini bertujuan menghindari adanya alkon yang kadaluarsa dan tidak dimanfaatkan sampai tahun 2021.	<p>laporan dilakukan dengan rasa tanggung jawab dan terbuka. Konsep ini sejalan dengan nilai BKKBN yaitu INTEGRITAS.</p> <p>Setiap tahapan kegiatan yang dilakukan, dijalani dengan sungguh-sungguh, ikhlas agar bernilai ibadah. Konsep ini sejalan dengan nilai BKKBN yaitu IKHLAS.</p> <p>Koordinasi dengan Subbagian Keuangan dan BMN untuk memantau kesiapan revisi anggaran terkait sumber dana untuk re-alokasi alkon dilakukan secara intensif dan tidak mudah</p>

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
									menyerah. Konsep ini sejalan dengan nilai BKKBN yaitu TANGGUH.
		Membuat rencana distribusi pil ke Sekretaris BKKBN DIY	4 Oktober 2019	Dokumen rensi (output 5.2)			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan draf rensi yang dibuat sesuai dengan jumlah yang telah dilaporkan dalam surat perubahan rencana aksi dan sesuai surat permintaan dari BKKBN Provinsi Papua Barat, yaitu 50.000 cycle. Konsep ini sejalan dengan Akuntabilitas dan Anti Korupsi. 2. Melaporkan draf rensi kepada atasan sebagai bentuk kendali mutu sebelum ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan. Konsep ini sejalan dengan Akuntabilitas dan Komitmen Mutu. 		
		Membuat draf surat perintah mengeluarkan barang ke BMN	4 Oktober 2019	Dokumen SPMB (output 5.3)			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan draf yang dibuat sesuai dengan jumlah alkon yang tertera dalam dokumen rencana 		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							<p>distribusi. Konsep ini sejalan dengan Akuntabilitas dan Anti Korupsi.</p> <p>2. Memastikan draf tersebut tidak ada kesalahan peserta diklatan sehingga mempercepat proses pengeluaran barang dapat segera dilaksanakan. Konsep ini sejalan dengan nilai Akuntabilitas dan Anti Korupsi.</p> <p>3. Melaporkan draf SPMB kepada atasan sebagai bentuk kendali mutu sebelum ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan. Konsep ini sejalan dengan Akuntabilitas dan Komitmen Mutu.</p>		
		Membuat draf laporan ke Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	28 Oktober 2019	Output 5.4 Gambar 5.1- Gambar 5.5 dan Bukti Dokumen 5.4	Dilakukan lebih awald ari jadwal yang direncanakan		1. Proses pembuatan draf surat laporan dilakukan bersamaan dengan kegiatan 3 dan 4, yaitu distribusi ke Perwakilan BKKBN Provinsi Papua		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							<p>dan Jawa Barat. Hal ini untuk efisiensi pelaporan. Efisiensi pelaporan termasuk dalam nilai Komitmen Mutu.</p> <p>2. Sebelum surat dimintakan tanda tangan Plt. Kepala Perwakilan, terlebih dahulu diperiksa oleh atasan. Hal ini sejalan dengan konsep Akuntabilitas.</p> <p>3. Mencantumkan tanggal diterimanya alkon oleh provinsi penerima dengan berkoordinasi dengan Subbid Keuangan dan BMN. Hal ini sesuai dengan nilai <i>Whole of Government</i>.</p> <p>4. Mencantumkan tahun kadaluarsa alkon di draf surat laporan sebagai bentuk menjaga mutu alkon. Hal ini sesuai dengan nilai Komitmen</p>		

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
							Mutu. Selain itu, informasi tahun kadaluarsa alkon sangat penting dalam memastikan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Konsep ini sejalan dengan nilai pelayanan publik, di mana sadar ASN sebagai pelayan public termasuk bentuk Nasionalisme.		

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Isu belum terdistribusinya alkon pil dan suntik secara maksimal di gudang Perwakilan BKKBN Provinsi DIY merupakan salah satu isu krusial yang dihadapi oleh BKKBN secara nasional, di mana alkon pil dan suntik akan kadaluarsa di tahun 2021 dan 2020.
- Kelima kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa tahapan kegiatan dilakukan mundur dari jadwal yang telah direncanakan.
- Kegiatan-kegiatan yang dilakukan, terutama terkait distribusi dinamis alkon suntik dan pil mampu meningkatkan kualitas pelayanan KB di DIY, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat karena alkon dapat digunakan sebelum masa kadaluarsa.
- Kegiatan-kegiatan tersebut mampu berjalan dengan baik sebagai hasil dari komunikasi dan kerjasama yang baik antar pelaksana dengan pengawas, antar sub bidang dalam satu bidang, antar sub bidang dan antar bidang, antar perwakilan BKKBN, antara Perwakilan BKKBN Provinsi DIY dengan BKKBN Pusat, serta antara Perwakilan BKKBN Provinsi DIY dengan mitra kerja PD IBI DIY dan OPD KB Kabupaten. Selain itu, penerapan nilai-nilai ANEKA+ sangat membantu peserta diklat dalam memahami tugas dan fungsi Analisis Sarana Program KB di Sub Bidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta.

B. Saran

- Mempertahankan budaya kerjasama (*whole of government*) baik yang dilakukan antar sub bidang dalam satu bidang maupun sub bidang antar bidang. Kerjasama yang baik juga harus selalu dibina dengan mitra kerja,

dalam hal ini adalah PD IBI DIY dan OPD KB Kabupaten. Selain itu, kerjasama juga harus dilanjutkan antar perwakilan BKKBN, dalam hal ini antara Perwakilan BKKBN DIY dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Papua, dan Papua Barat. Selain itu, dapat diterapkan pula nilai-nilai ANEKA+ yang lain dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan.

- Dasar penghitungan kebutuhan alat kontrasepsi didasarkan atas rata-rata pengeluaran alat kontrasepsi, bukan berdasarkan PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat). Hal ini dikarenakan penghitungan berdasarkan PPM belum memperhitungkan jumlah akseptor yang melakukan KB mandiri (alat kontrasepsi diperoleh secara mandiri, atau alat kontrasepsi yang bukan berasal dari BKKBN).

C. Rencana Tindak Lanjut

Distribusi dinamis suntik direncanakan akan dilaksanakan ke Provinsi Papua sebanyak 327.000 vial. Akan tetapi, realisasi pengiriman hanya 200.000 vial karena permintaan dari Provinsi Papua. Dampak yang ditimbulkan adalah Perwakilan BKKBN DIY memiliki sisa suntik sebanyak 125.000 vial yang akan kadaluarsa 2020. Oleh karena itu, Sub Bidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta Bidang KBKR Perwakilan BKKBN DIY akan bersurat kepada BKKBN Pusat. Harapannya, BKKBN Pusat akan melakukan pemetaan kembali terkait distribusi dinamis agar alkon suntik di gudang provinsi dapat dimanfaatkan dengan baik dan terhindar dari kadaluarsa.

Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh Sub Bidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta Bidang KBKR Perwakilan BKKBN DIY adalah melaksanakan bakti sosial bekerja sama dengan PD IBI DIY. Hal ini dalam rangka menindaklanjuti kegiatan kedua, yaitu mengumpulkan bahan kerjasama bakti sosial suntik dengan PD IBI DIY. Sebanyak 3 kegiatan akan dilaksanakan dengan dana Sub Bidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta, sedangkan 2 kegiatan akan

dilaksanakan dengan dana Sub Bidang Kesehatan Reproduksi. Berikut pelaksanaan bakti sosial yang akan dilakukan di 5 kabupaten/kota:

- Tanggal 14 November 2019 di Kabupaten Bantul
- Tanggal 18 November 2019 di Kota Yogyakarta
- Tanggal 19 November 2019 di Kabupaten Kulonprogo
- Tanggal 20 November 2019 di Kabupaten Sleman
- Tanggal 21 November 2019 di Kabupaten Gunungkidul

DAFTAR PUSTAKA

- Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Akuntabilitas: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. LAN RI, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Nasionalisme: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. LAN RI, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Etika Publik: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. LAN RI, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Komitmen Mutu: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. LAN RI, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Anti Korupsi: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. LAN RI, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Manajemen ASN: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. LAN RI, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Whole of Government: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. LAN RI, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Pelayanan Publik: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. LAN RI, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Habitulasi: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. LAN RI, Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi. Jakarta: BKKBN.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Profil BKKBN, www.bkkbn.go.id, diakses pada 11 September 2019.

Profil Perwakilan BKKBN Provinsi D.I. Yogyakarta, www.yogya.bkkbn.go.id, diakses pada 11 September 2019.

Sihana. 2019. Kebijakan, Program, dan Kegiatan Bidang KB-KR. Materi dipresentasikan pada Kegiatan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2018, Juli 29, Yogyakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Form Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama : Umi Lutfiah
 NIP : 19910831 201902 2 007
 Unit Kerja : Subbid Bina Kesertaan KB Jalpemswa, Bidang KB-KR
 Jabatan : Analis Sarana Program KB
 Isu : Belum maksimalnya distribusi suntik dan pil di gudang provinsi
 Kegiatan 1 : Membantu melakukan revisi anggaran kegiatan

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahapan Kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan draf bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan. 2. Membantu mencermati ketersediaan anggaran. 3. Membantu menyesuaikan bentuk kegiatan dengan ketersediaan anggaran. 4. Membantu revisi anggaran. 5. Membuat draf pengajuan revisi anggaran dari bidang KB-KR ke PPK. 6. Membuat draf pengajuan revisi anggaran dari PPK ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). 7. Membuat draf surat persetujuan KPA atas revisi anggaran. 8. Melaporkan hasil revisi ke Subbag Keuangan dan BMN. ✓ Output kegiatan terhadap pemecahan isu; Output 1.1,1.2,1.5,1.6,1.7,1.8 ✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi, Pelayanan Publik, dan <i>Whole of Government</i> ✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; Menyelenggarakan KB dan Kespro ✓ Penguatan Nilai Organisasi; Cerdas, Kerjasama, Integritas, Ikhlas, Tangguh 	<p>Tahapan kegiatan 8 yaitu melaporkan hasil revisi ke Subbagian Keuangan dan BMN dilakukan pada tanggal 27 September 2019 karena Kuasa Pengguna Anggaran baru berada di tempat pada tanggal tersebut.</p>	

Kegiatan 2 : Mengumpulkan bahan kerjasama bakti sosial suntik dengan PD IBI
DIY

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p>✓ Tahapan Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat draf surat permohonan koordinasi dengan PD IBI DIY. 2. Meminta paraf atasan, paraf kepala bidang, dan tanda tangan Plt. Kepala Perwakilan. 3. Melakukan penomoran surat dan cap lembaga berkoordinasi dengan Sekretariat. 4. Melakukan pengarsipan dalam surat keluar bidang. 5. Mengirimkan surat ke IBI. 6. Membantu kelancaran Rapat Koordinasi dengan PD IBI DIY. 7. Membuat notulensi hasil rapat koordinasi dengan IBI. 8. Melaporkan hasil notulensi rapat kepada atasan. <p>✓ Output kegiatan terhadap pemecaha isu; Output 2.1,2.2,2.3,2.4</p> <p>✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Akuntabilitas, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi, dan <i>Whole of Government</i></p> <p>✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; Menyelenggarakan KB dan Kespro</p> <p>✓ Penguatan Nilai Organisasi; Kerjasama, Tangguh, Cerdas, Ikhlas</p>	<p>Tahapan kegiatan 1 dan 2 dilakukan lebih awal untuk efisiensi (dikirimkan bersamaan dengan surat kegiatan lainnya). Bukti kirim dan bukti terima pengiriman surat tidak bisa didapatkan karena surat diantarkan langsung oleh rekan pelaksana subbid dan pada saat di lokasi tidak ada pihak IBI yang dapat menerima (kantor kosong).</p> <p>Tahapan kegiatan 6-8 dilakukan mundur dari jadwal sebelumnya, karena pada tanggal yang ditentukan, ada kegiatan bidang lain.</p>	

Kegiatan 3 : Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi pil dengan Provinsi Jawa Barat

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahapan Kegiatan: 1. Melakukan koordinasi dengan Subbag Keuangan dan BMN terkait kesiapan anggaran untuk re-alokasi/distribusi dinamis. 2. Membuat draf rencana distribusi pil ke Provinsi Jawa Barat. 3. Membuat draf surat perintah mengeluarkan barang ke BMN. 4. Setelah alkon diterima oleh Provinsi Jawa Barat, membuat draf laporan ke Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara ✓ Output kegiatan terhadap pemecahan isu; Output 3.2, 3.3,3.4 ✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; <i>Whole of Government</i>, Etika Publik, Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Anti Korupsi, Komitmen Mutu, dan Nasionalisme ✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; Menyelenggarakan KB dan Kespro ✓ Penguatan Nilai Organisasi; Kerjasama, Cerdas, Integritas, ikhlas, dan Tangguh 	<p>Tahapan kegiatan 1 dilakukan lebih awal dari jadwal yang ditentukan.</p> <p>Tahap kegiatan 2-3 dilakukan mundur 1 hari dikarenakan perubahan jumlah alkon yang diminta dari Provinsi Papua (pengiriman harus dilakukan 1 paket, jika terkendala 1 maka terkendala semuanya).</p> <p>Tahap 4 dilaksanakan 28 Oktober 2019.</p>	

Kegiatan 4 : Membantu mengiapkan bahan kerjasama re-alokasi suntik dengan Provinsi Papua

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahapan Kegiatan: 1. Melakukan koordinasi dengan Subbag Keuangan dan BMN terkait kesiapan anggaran untuk re-alokasi/distribusi dinamis. 2. Membuat draf rencana distribusi suntik ke Provinsi Papua. 3. Membuat draf surat perintah mengeluarkan barang ke BMN. 4. Setelah alkon diterima oleh Provinsi Papua, membuat draf laporan ke Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara ✓ Output kegiatan terhadap pemecahan isu; Output 4.2,4.3, 4.4 ✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; <i>Whole of Government</i>, Etika Publik, Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Anti Korupsi, Komitmen Mutu, dan Nasionalisme ✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; Menyelenggarakan KB dan Kespro ✓ Penguatan Nilai Organisasi; Kerjasama, Cerdas, Integritas, Ikhlas, dan Tangguh 	<p>Tahapan kegiatan 1 dilakukan lebih awal dari jadwal yang ditentukan.</p> <p>Tahap kegiatan2-3 dilakukan mundur 1 hari dikarenakan perubahan jumlah alkon yang diminta dari Provinsi Papua (pengiriman harus dilakukan 1 paket, jika terkendala 1 maka terkendala semuanya).</p> <p>Tahap 4 dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2019.</p>	

Kegiatan 5 : Membantu mengiapkan bahan kerjasama re-alokasi pil dengan Provinsi Papua Barat

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahapan Kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat draf revisi jumlah distribusi dinamis alkon pil. 2. Membuat draf rencana distribusi pil ke Provinsi Papua Barat. 3. Membuat draf surat perintah mengeluarkan barang ke BMN. 4. Setelah alkon diterima oleh Provinsi Papua Barat, membuat draf laporan ke Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara ✓ Output kegiatan terhadap pemecaha isu; Output 5.1,5.2,5.3,5.4 ✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Komitmen Mutu, Akuntabilitas, Anti Korupsi, Etika Publik, <i>Whole of Government</i>, Pelayanan Publik, dan Nasionalisme ✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi ; Menyelenggarakan KB dan Kespro ✓ Penguatan Nilai Organisasi; Kerjasama, Cerdas, Integritas, Ikhlas, Tangguh 	<p>Tahapan ini merupakan tahapan pengembangan (kegiatan 5) karena adanya permintaan khusus dari Provinsi Papua Barat.</p> <p>Tahapan 1-3 dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan</p> <p>Tahapan 4 dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2019.</p>	

Lampiran 2

Form Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

Nama : Umi Lutfiah
 NIP : 199108312019022007
 Unit Kerja : Subbid Bina Kesertaan KB Jalpemswa, Bidang KB-KR
 Jabatan : Analis Sarana Program KB
 Isu : Belum maksimalnya distribusi suntik dan pil di gudang provinsi
 Kegiatan 1 : Membantu melakukan revisi anggaran kegiatan

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahapan Kegiatan: 1. Menyiapkan draf bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan. 2. Membantu mencermati ketersediaan anggaran. 3. Membantu menyesuaikan bentuk kegiatan dengan ketersediaan anggaran. 4. Membantu revisi anggaran. 5. Membuat draf pengajuan revisi anggaran dari bidang KB-KR ke PPK. 6. Membuat draf pengajuan revisi anggaran dari PPK ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). 7. Membuat draf surat persetujuan KPA atas revisi anggaran. 8. Melaporkan hasil revisi ke Subbag Keuangan dan BMN. ✓ Output kegiatan terhadap pemecahan isu; Output 1.1,1.2,1.5,1.6,1.7,1.8 ✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi, Pelayanan Publik, dan <i>Whole of Government</i> ✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; Menyelenggarakan KB dan Kespro ✓ Penguatan Nilai Organisasi; ✓ Cerdas, Kerjasama, Integritas, Ikhlas, Tangguh 	<p>Tahapan kegiatan 8 yaitu melaporkan hasil revisi ke Subbagian Keuangan dan BMN dilakukan pada tanggal 27 September 2019 karena Kuasa Pengguna Anggaran baru berada di tempat pada tanggal tersebut.</p>	<p>27 September 2019 by grup WA</p>

Kegiatan 2 : Mengumpulkan bahan kerjasama bakti sosial suntik dengan PD IBI
DIY

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
<p>✓ Tahapan Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat draf surat permohonan koordinasi dengan PD IBI DIY. 2. Meminta paraf atasan, paraf kepala bidang, dan tanda tangan Plt. Kepala Perwakilan. 3. Melakukan penomoran surat dan cap lembaga berkoordinasi dengan Sekretariat. 4. Melakukan pengarsipan dalam surat keluar bidang. 5. Mengirimkan surat ke IBI. 6. Membantu kelancaran Rapat Koordinasi dengan PD IBI DIY. 7. Membuat notulensi hasil rapat koordinasi dengan IBI. 8. Melaporkan hasil notulensi rapat kepada atasan. <p>✓ Output kegiatan terhadap pemecaha isu; Output 2.1,2.2,2.3,2.4</p> <p>✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Akuntabilitas, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi, dan <i>Whole of Government</i></p> <p>✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; Menyelenggarakan KB dan Kespro</p> <p>✓ Penguatan Nilai Organisasi;</p> <p>✓ Kerjasama, Tangguh, Cerdas, Ikhlas</p>	<p>Tahapan kegiatan 1 dan 2 dilakukan lebih awal untuk efisiensi (dikirimkan bersamaan dengan surat kegiatan lainnya). Bukti kirim dan bukti terima pengiriman surat tidak bisa didapatkan karena surat diantarkan langsung oleh rekan pelaksana subbid dan pada saat di lokasi tidak ada pihak IBI yang dapat menerima (kantor kosong).</p> <p>Tahapan kegiatan 6-8 dilakukan mundur dari jadwal sebelumnya, karena pada tanggal yang ditentukan, ada kegiatan bidang lain.</p>	<p>Tahap 1 dan 2 27 September 2019 by grup WA</p> <p>Tahap 3 dan 4 11 Oktober 2019 by grup WA</p>

Kegiatan 3 : Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi pil dengan Provinsi Jawa Barat

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahapan Kegiatan: 1. Melakukan koordinasi dengan Subbag Keuangan dan BMN terkait kesiapan anggaran untuk re-alokasi/distribusi dinamis. 2. Membuat draf rencana distribusi pil ke Provinsi Jawa Barat. 3. Membuat draf surat perintah mengeluarkan barang ke BMN. 4. Setelah alkon diterima oleh Provinsi Jawa Barat, membuat draf laporan ke Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara ✓ Output kegiatan terhadap pemecahan isu; Output 3.2, 3.3,3.4 ✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; <i>Whole of Government</i>, Etika Publik, Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Anti Korupsi, Komitmen Mutu, dan Nasionalisme ✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; Menyelenggarakan KB dan Kespro ✓ Penguatan Nilai Organisasi; ✓ Kerjasama, Cerdas, Integritas, ikhlas, dan Tangguh 	<p>Tahapan kegiatan 1 dilakukan lebih awal dari jadwal yang ditentukan.</p> <p>Tahap kegiatan 2-3 dilakukan mundur 1 hari dikarenakan perubahan jumlah alkon yang diminta dari Provinsi Papua (pengiriman harus dilakukan 1 paket, jika terkendala 1 maka terkendala semuanya)</p> <p>Tahap kegiatan 4 dilaksanakan 28 Oktober 2019.</p>	<p>Tahap 1 27 September 2019 by grup WA</p> <p>Tahap 2-3 11 Oktober 2019 by grup WA</p> <p>Tahap 4 25 Oktober 2019 by grup WA</p>

Kegiatan 4 : Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi suntik dengan Provinsi Papua

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahapan Kegiatan: 1. Melakukan koordinasi dengan Subbag Keuangan dan BMN terkait kesiapan anggaran untuk re-alokasi/distribusi dinamis. 2. Membuat draf rencana distribusi suntik ke Provinsi Papua. 3. Membuat draf surat perintah mengeluarkan barang ke BMN. 4. Setelah alkon diterima oleh Provinsi Papua, membuat draf laporan ke Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara ✓ Output kegiatan terhadap pemecahan isu; Output 4.2,4.3, 4.4 ✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; <i>Whole of Government</i>, Etika Publik, Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Anti Korupsi, Komitmen Mutu, dan Nasionalisme ✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; Menyelenggarakan KB dan Kespro ✓ Penguatan Nilai Organisasi; ✓ Kerjasama, Cerdas, Integritas, Ikhlas, dan Tangguh 	<p>Tahapan kegiatan 1 dilakukan lebih awal dari jadwal yang ditentukan.</p> <p>Tahap kegiatan 2-3 dilakukan mundur 1 hari dikarenakan perubahan jumlah alkon yang diminta dari Provinsi Papua (pengiriman harus dilakukan 1 paket, jika terkendala 1 maka terkendala semuanya)</p> <p>Tahap kegiatan 4 dilakukan 28 Oktober 2019.</p>	<p>Tahap 1 27 September 2019 by grup WA</p> <p>Tahap 2-3 11 Oktober 2019 by grup WA</p> <p>Tahap 4 25 Oktober 2019 by grup WA</p>

Kegiatan 5 : Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi pil dengan Provinsi Papua Barat

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahapan Kegiatan: 1. Membuat draf revisi jumlah distribusi dinamis alkon pil. 2. Membuat draf rencana distribusi pil ke Provinsi Papua Barat. 3. Membuat draf surat perintah mengeluarkan barang ke BMN. 4. Setelah alkon diterima oleh Provinsi Papua Barat, membuat draf laporan ke Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara ✓ Output kegiatan terhadap pemecaha isu; Output 5.1,5.2,5.3,5.4 ✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Komitmen Mutu, Akuntabilitas, Anti Korupsi, Etika Publik, <i>Whole of Government</i>, Pelayanan Publik, dan Nasionalisme ✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi ; Menyelenggarakan KB dan Kespro ✓ Penguatan Nilai Organisasi; ✓ Kerjasama, Cerdas, Integritas, Ikhlas, Tangguh 	<p>Merupakan kegiatan tambahan karena permintaan Provinsi Papua Barat</p> <p>Tahap kegiatan 4 dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2019</p>	<p>Tahap 1-3 4 Oktober 2019 by grup WA</p> <p>Tahap 4 25 Oktober by grup WA</p>

Formulir 11 : Rekapitulasi Nilai Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas Pelatihan Dasar CPNS

REKAPITULASI NILAI PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS

Program : Peningkatan Distribusi Suntik dan Pil Pada Subbid Bina Kesertaan KB Jalpemswa
 Nama Peserta : Umi Lutfiah
 NIP : 19910831 201902 2 007
 Jabatan/Unit Kerja : Analis Sarana Program KB/ Subbid Bina Kesertaan KB Jalpemswa, Bidang KB-KR

No	Standar Kompetensi	Jenis Penguatan Kompetensi	Tujuan Penguatan	Strategi/Metoda Penguatan	Mata Pelatihan	Jumlah JP/ Hari	Tempat Pelaksanaan	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Memahami Program KBKR Tingkat Nasional	Menjadi peserta aktif dalam acara The 1 st International Conference on Indonesia Family Planning and Reproductive Health 2019	Mendiskusikan konsep, temuan baru, kebijakan, program, dan pembelajaran dari lapangan untuk meningkatkan kinerja program KB dan Kespro untuk mendukung penurunan AKI dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi peserta aktif dalam kegiatan The 1st International Conference on Indonesia Family Planning and Reproductive Health 2019 Membuat laporan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Inovasi meningkatkan akses dan kualitas KB serta kespro termasuk update teknologi KB terkini Kesehatan reproduksi remaja dan pernikahan anak Isu kesehatan reproduksi lain seperti HIV, kekerasan seksual, aborsi, kekerasan terhadap perempuan, dan kesejahteraan keluarga Pembiayaan program KB dan Kesehatan Reproduksi 	3 hari	Sahid Jaya Hotel Yogyakarta	

No	Standar Kompetensi	Jenis Penguatan Kompetensi	Tujuan Penguatan	Strategi/Metoda Penguatan	Mata Pelatihan	Jumlah JP/ Hari	Tempat Pelaksanaan	Nilai
					di Era JKN <ul style="list-style-type: none"> Isu KB dan Kesehatan Reproduksi di dalam system desentralisasi termasuk isu logistic, SDM, dan partisipasi masyarakat. 			
2.	Mengetahui urgensi dan alur sertifikasi melalui aplikasi MONIKA	Menjadi peserta dalam acara Sosialisasi Aplikasi MONIKA melalui Vicon	<ul style="list-style-type: none"> Memahami pentingnya sertifikasi bidan di Era JKN Memahami proses sertifikasi melalui aplikasi MONIKA Memahami tugas dan peran masing-masing komponen dalam MONIKA Mengetahui capaian bidan yang sudah tersertifikasi melalui aplikasi MONIKA 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi peserta aktif dalam kegiatan Sosialisasi Aplikasi MONIKA Membuat laporan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi pemetaan dan sertifikasi kompetensi dokter dan bidan Pengenalan aplikasi MONIKA 	6 JP	Ruang Kencana Lt.2, Perwakilan BKKBN DIY	
3.	Mengetahui capaian program dan anggaran Perwakilan BKKBN DIY	Menjadi peserta aktif dalam kegiatan Rapat Pengendalian Program dan Anggaran (Radalgram)	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui capaian program Perwakilan BKKBN DIY Mengetahui serapan anggaran Perwakilan BKKBN DIY 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi peserta aktif dalam acara Radalgram bulan Oktober 2019 Membuat laporan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Capaian Program Perwakilan BKKBN DIY per Oktober 2019 Serapan anggaran Perwakilan BKKBN DIY per Oktober 2019 	6 JP	Ruang Kencana Lt.2, Perwakilan BKKBN DIY	

No	Standar Kompetensi	Jenis Penguatan Kompetensi	Tujuan Penguatan	Strategi/Metoda Penguatan	Mata Pelatihan	Jumlah JP/ Hari	Tempat Pelaksanaan	Nilai
4.	Mengetahui program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di wilayah Perwakilan BKKBN DIY	Menjadi peserta aktif dalam kegiatan Workshop Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui apa SSK Mengetahui perkembangan SSK di wilayah kerja Perwakilan BKKBN DIY 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi peserta aktif dalam acara Workshop Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Sekolah Siaga Kependudukan (ssk) Membuat Laporan Kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Wajah Baru Pendidikan Kependudukan Monev Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan di Sekolah Siaga Kependudukan DIY 	9 JP	The Jayakarta Hotel Yogyakarta	
5.	Mengetahui Isu Kesehatan Reproduksi Berbasis Komunitas	Menjadi peserta aktif dalam kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Berbasis Komunitas DAS	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui Kesehatan reproduksi bagi PUS dan Penggunaan Kontrasepsi sebagai Pilihan ber-KB Kebijakan Program KKBPK DIY 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi peserta aktif dalam acara Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Berbasis Komunitas Membuat Laporan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan Reproduksi bagi Pasangan Usia Subur dan Penggunaan Metode Kontrasepsi sebagai Pilihan ber-KB Kebijakan Program KKBPK DIY 	6 JP	Ruang Kencana Lt.2, Perwakilan BKKBN DIY	
6.	Memahami pentingnya pre service	Menjadi peserta aktif dalam	<ul style="list-style-type: none"> Memahami pentingnya peningkatan standar 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi peserta aktif dalam acara 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Standar Kompetensi Dokter dalam Layanan Kontrasepsi 	9 JP	Indoluxe Hotel Jogjakarta	

No	Standar Kompetensi	Jenis Penguatan Kompetensi	Tujuan Penguatan	Strategi/Metoda Penguatan	Mata Pelatihan	Jumlah JP/ Hari	Tempat Pelaksanaan	Nilai
	training bagi institusi pendidikan	kegiatan Penguatan Pre Service Training Bagi Institusi Pendidikan	kompetensi dokter dalam layanan kontrasepsi <ul style="list-style-type: none"> Mengetahui peran perguruan tinggi dalam Pre Service Training KB Mahasiswa Kedokteran Mengetahui Best Practice Pelatihan Pre Service Training FK-KMK UGM 	Penguatan Pre Service Training bagi Institusi Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> Membuat laporan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Peran PT dalam Pre Service training KB Mahasiswa Kedokteran Best Practice Pelatihan Pre Service Training FK-KMK UGM 			
NILAI TOTAL (RATA-RATA)								
NILAI AKHIR (20%)								

Keenam kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi peserta, baik yang berhubungan langsung dengan Bidang KB-KR atau pun dari bidang di luar KB-KR akan tetapi pengembangan kompetensi tersebut dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih kompleks dan menyeluruh terkait Program KKBPK. Kegiatan peningkatan kompetensi yang berhubungan langsung dengan Bidang KB-KR antara lain yaitu: (1) *The 1st International Conference on Indonesia Family Planning and Reproductive Health 2019*; (2) Sosialisasi Aplikasi MONIKA melalui Vicon; (3) Rapat Pengendalian Program dan Anggaran (Radalgram); (4) Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Berbasis Komunitas DAS; dan (5) Penguatan Pre Service Training Bagi Institusi

Pendidikan. Kegiatan peningkatan kompetensi yang berhubungan tidak langsung dengan bidang KB-KR yaitu Workshop Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).



Lampiran 5
sertifikat e-learning

Lampiran 6

Gambar 1.1

Gambar 1.2



Gambar 1.3

Gambar 1.4



Gambar 1.5



Gambar 3.1



Gambar 4.1



Gambar 2.1



Gambar 2.2



Gambar 5.1



Gambar 5.2



Gambar 5.3



Gambar 5.4



Gambar 5.5



Gambar 3.2 Pil Kombinasi

Gambar 4.2 Suntik KB 3 Bulanan



Gambar 3.3 Pil mulai diangkat ke Truk



Gambar 3.4 Truk Pengangkut



**OUTPUT KEGIATAN
DAN
PENGUATAN KOMPETENSI
BIDANG**

Output 1.1 Dokumen Rencana Kegiatan Hasil Revisi Anggaran Kegiatan di Subbid Jalpemswa Tahun 2019

Salah satu tupoksi Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta (Jalpemswa) adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan. Untuk menjalankan tupoksi ini, subbid kami memiliki nomer akun khusus 233 dengan uraian faskes KB (Pemerintah dan Swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai SOP dan Kesehatan Reproduksi. Selain itu, kami juga memiliki nomer akun 235 dengan uraian pembinaan, monitoring, evaluasi, dan fasilitasi KB KR di Kabupaten/Kota. Akun 235 ini merupakan akun bersama, di mana dana dalam akun ini dapat digunakan oleh tiga subbidang, yaitu Subbidang Bina Kesertaan KB Jalpemswa, Subbidang Bina Kesertaan KB Jalsus, dan Subbidang Kesehatan Reproduksi.

Kegiatan revisi anggaran ini salah satunya digunakan untuk mendanai kegiatan bhaksos suntik kerjasama dengan PD IBI DIY. Anggaran yang direvisi meliputi anggaran untuk Pertemuan Koordinasi Penguatan Tim Jaga Mutu (A), Sosialisasi Forum Peningkatan KB MKJP di Faskes Pemerintah dan Swasta (C), Sinkronisasi Pemetaan Faskes Pemerintah dan Swasta (E), Pertemuan Kemitraan Tingkat Provinsi (F), dan Poin Konsultasi, Konsolidasi/Temu Kerja Bidang KB KR Tingkat Provinsi (merupakan dana bersama tiga subbid). Prinsip dalam melakukan revisi anggaran subbidang ini adalah akun dengan nomer 524 (belanja perjalanan). Akun dengan nomer ini jika direvisi untuk dijadikan bentuk kegiatan lain besarnya tidak boleh lebih besar dari semula.

Kegiatan bhaksos suntik kerjasama dengan PD IBI DIY akan masuk ke dalam akun 233 poin O dengan uraian Pelayanan KB Melalui Mitra Kerja. Kegiatan ini akan masuk ke dalam belanja bidang non-operasional lainnya dengan dukungan dana sebesar Rp 15,750,000.00. Dana ini akan dipergunakan untuk melaksanakan bhaksos sebanyak 3 frekuensi, dengan biaya dukungan operasional masing-masing frekuensi Rp 5,250,000.00. Bhaksos ini direncanakan 3 frekuensi karena dari 5 kabupaten/kota di DIY, terdapat 3 kabupaten/kota yang belum mempunyai dana bhaksos mandiri, yaitu Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Bantul. Penentuan lokasi pertama bhaksos akan ditentukan berdasarkan koordinasi dengan IBI pada Kegiatan 2 Aktualisasi ini.

Output 1.5 Draft Pengajuan Anggaran dari Bidang KB-KR ke PPK

Nomor : / RC.04.02 / J.3 / 2019
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : *Permohonan Revisi Rincian POK Program
KKBPK Bidang KB – KR Tahun 2019*

23 September 2019

Kepada Yth ;
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta
di –
Yogyakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah kami mencermati kegiatan dan jenis belanja pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Program KKBPK Tahun Anggaran 2019, khususnya pada *Output* Faskes KB (Pemerintah dan Swasta) yang memberikan Pelayanan KB sesuai dengan SOP dan Kesehatan Reproduksi, Peningkatan Promosi Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi KB KR di Kabupaten/Kota serta Peningkatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Kelompok Kegiatan, maka untuk mendukung pencapaian program terdapat beberapa kegiatan dan Akun yang perlu disesuaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengusulkan untuk dapat merevisi kegiatan dan Akun seperti tertulis pada lampiran surat ini.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bidang KB - KR
Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta

Dra. Joehananti Chriswandari



23 September 2019

Nomor : 3740 / RC.04.02 / J.3 / 2019
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : *Permohonan Revisi Rincian POK Program
KKBPK Bidang KB - KR Tahun 2019*

Kepada Yth ;
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta
di -
Yogyakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah kami mencermati kegiatan dan jenis belanja pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Program KKBPK Tahun Anggaran 2019, khususnya pada *Output Faskes KB (Pemerintah dan Swasta)* yang memberikan Pelayanan KB sesuai dengan SOP dan Kesehatan Reproduksi, Peningkatan Promosi Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi KB KR di Kabupaten/Kota serta Peningkatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Kelompok Kegiatan, maka untuk mendukung pencapaian program terdapat beberapa kegiatan dan Akun yang perlu disesuaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengusulkan untuk dapat merevisi kegiatan dan Akun seperti tertulis pada lampiran surat ini.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bidang KB - KR
Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta

Dra. Joehantanti Chriswandari /k



Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor : / RC.04.02 / J.3 / 2019
Lampiran : 1 (satu) Set
Perihal : *Permohonan Revisi Rincian POK Program
KKBPK Bidang KB-KR Tahun 2019*

24 September 2019

Kepada Yth ;
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta
di –
 YOGYAKARTA

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Kepala Bidang KB-KR Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Nomor :
...../ RC.04.02 / J3 / 2019 Tanggal : September 2019 Perihal : Permohonan Revisi
Rincian POK Program KKBPK Bidang KB-KR Tahun Anggaran 2019. Bersama ini kami
sampaikan bahwa untuk mendukung pencapaian program KKBPK di Daerah Istimewa
Yogyakarta terdapat beberapa Kegiatan dan Akun yang perlu disesuaikan dari Petunjuk
Operasional Kegiatan (POK) Program KKBPK Tahun 2019, khususnya pada *Output* Faskes KB
(Pemerintah dan Swasta) yang memberikan Pelayanan KB sesuai dengan SOP dan. Kesehatan
Reproduksi, Peningkatan Promosi Kesehatan dan Hak-Hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota
Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi KB KR di Kabupaten/Kota serta Peningkatan
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Kelompok Kegiatan, Sehubungan dengan hal
tersebut, kami mengusulkan untuk dapat direvisi Kegiatan dan Akun seperti tertulis pada lampiran
surat ini.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen
Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta

Ratna Anita Sari, S.Si, M.Sc.



25 September 2019

Nomor : 3791 / RC.04.02 / J3 / 2019
Lampiran : 1 (satu) Set
Perihal : *Permohonan Revisi Rincian POK Program
KKBPK Bidang KB-KR Tahun 2019*

Kepada Yth ;
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta
di -

YOGYAKARTA

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Kepala Bidang KB-KR Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Nomor : 3740 / RC.04.02 / J3 / 2019 Tanggal : 23 September 2019 Perihal : Permohonan Revisi Rincian POK Program KKBPK Bidang KB-KR Tahun Anggaran 2019. Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk mendukung pencapaian program KKBPK di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat beberapa Kegiatan dan Akun yang perlu disesuaikan dari Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Program KKBPK Tahun 2019, khususnya pada *Output* Faskes KB (Pemerintah dan Swasta) yang memberikan Pelayanan KB sesuai dengan SOP dan Kesehatan Reproduksi, Peningkatan Promosi Kesehatan dan Hak-Hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi KB KR di Kabupaten/Kota serta Peningkatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Kelompok Kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengusulkan untuk dapat direvisi Kegiatan dan Akun seperti tertulis pada lampiran surat ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen
Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta



Ratha Anita Sari, S.Si, M.Sc.

Nomor : / RC.04.02 / J1 / 2019
Lampiran : 1 (satu) Set
Perihal : *Persetujuan Revisi Rincian POK Program
KKBPK Bidang KB-KR Tahun 2019*

24 September 2019

*Kepada Yth ;
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta
di –
 YOGYAKARTA*

Dengan hormat,

Menjawab surat Saudara Nomor : / RC.04.02 / J.3 / 2019, tanggal : ... September 2019, perihal: Permohonan Revisi Rincian POK Program KKBPK Bidang KB-KR Tahun Anggaran 2019. Dengan ini kami menyetujui usulan revisi dimaksud dan agar dibaca serta dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

Adapun rincian revisi yang kami setujui sebagaimana terlampir.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran
Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta

Rohdhiana Sumariati, S.Sos, M.Sc



26 September 2019

Nomor : 3755 / RC.04.02 / J1 / 2019
Lampiran : 1 (satu) Set
Perihal : *Persetujuan Revisi Rincian POK Program
KKBPK Bidang KB-KR Tahun 2019*

*Kepada Yth ;
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta
di –*

YOGYAKARTA

Dengan hormat,

Menjawab surat Saudara Nomor : 3741/ RC.04.02 / J.3 / 2019, tanggal : 25 September 2019, perihal: Permohonan Revisi Rincian POK Program KKBPK Bidang KB-KR Tahun Anggaran 2019. Dengan ini kami menyetujui usulan revisi dimaksud dan agar dibaca serta dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

Adapun rincian revisi yang kami setuju sebagaimana terlampir.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran

Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta



Rohdiana Sumartani, S.Sos, M.Sc



26 September 2019

Nomor : 3755 / RC.04.02 / J1 / 2019
Lampiran : 1 (satu) Set
Perihal : *Persetujuan Revisi Rincian POK Program
KKBPK Bidang KB-KR Tahun 2019*

*Kepada Yth ;
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta
di -*

YOGYAKARTA

Dengan hormat,

Menjawab surat Saudara Nomor : 3741/ RC.04.02 / J.3 / 2019, tanggal : 25 September 2019, perihal: Permohonan Revisi Rincian POK Program KKBPK Bidang KB-KR Tahun Anggaran 2019. Dengan ini kami menyetujui usulan revisi dimaksud dan agar dibaca serta dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

Adapun rincian revisi yang kami setuju sebagaimana terlampir.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran

Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta



Rohidjiana Sumartani, S.Sos, M.Sc

Nomor : /KB.09.01/33/2019
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Koordinasi

24 September 2019

Yth.

Ketua PD IBI DIY,

di -

Yogyakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan kesertaan KB di masyarakat, Perwakilan BKKBN DIY bermaksud melaksanakan Pelayanan KB Melalui Mitra Kerja. Kegiatan Pelayanan KB Melalui Mitra Kerja direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 3 frekuensi. Terkait dengan kegiatan tersebut, Perwakilan BKKBN DIY perlu melakukan koordinasi dengan PD IBI DIY selaku salah satu mitra kerja Perwakilan BKKBN DIY. Koordinasi akan dilaksanakan pada **Hari Senin, 7 Oktober 2019.**

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara agar berkenan memfasilitasi kegiatan tersebut. **Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.**

Pt. Kepala *kebid KB-KP*

Rohdhiana Sumariati, S.Sos. M.Sc.



Nomor : /KB.09.01/J3/2019
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Koordinasi

24 September 2019

Yth.

Sutarti, S.Si.T.M.PH.
Ketua PD IBI DIY

di -

Yogyakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya ^{me} peningkatan kesertaan KB di ^{kan} masyarakat, Perwakilan BKKBN DIY bermaksud melaksanakan Pelayanan KB ~~Melalui~~ Mitra Kerja ~~bekerjasama dengan~~ PD IBI DIY. ^{kegiatan} Demi kelancaran kegiatan, kami bermaksud melakukan koordinasi dengan Ketua PD IBI DIY serta beberapa pengurus harian IBI DIY ~~sebagai salah satu mitra kerja Perwakilan BKKBN DIY.~~

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara berkenan menerima dan memfasilitasi rapat koordinasi ~~dimaksud~~ pada Senin, 7 Oktober 2019. Untuk konfirmasi hal-hal teknis harap menghubungi Ratna Anita Sari, S.Si., M.Sc. (081225795544).

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kabid KS-PK

dr. Iin Nadzifah Hamid *fk*



Nomor : 3735 /KB.09.01/13/2019
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Koordinasi

24 September 2019

Yth.

Sutarti, S.Si.T.M.PH.
Ketua PD IBI DIY

di -

Yogyakarta

Dengan hormat,

Dalam upaya meningkatkan kesertaan KB di D.I. Yogyakarta, Perwakilan BKKBN DIY bermaksud melaksanakan Pelayanan KB bersama Mitra Kerja PD IBI DIY dan melakukan koordinasi dengan Ketua PD IBI DIY serta beberapa pengurus harian.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara berkenan menerima dan memfasilitasi rapat koordinasi pada Senin, 7 Oktober 2019. Untuk konfirmasi hal-hal teknis harap menghubungi Ratna Anita Sari, S.Si., M.Sc. (081225795544).

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Kabid KS-PK

dr. Iin Nadzifah Hamid

Output 2.4 Monev/evaluasi Rapat Koordinasi dengan IBI

RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN BHA/RSOS KERJA SAMA BKKRN DIY- PD IBI DIY

Kapan	7 Oktober 2019
Sluip	Badang KIB-KR Perwakilan BKKRN DIY (6 orang) PD IBI DIY (5 orang)
Apa	Rapat koordinasi bha/RSOS kerjasama dengan PD IBI DIY
Mertapa Di mana	Overstock sumbu di gedung Perwakilan BKKRN DIY
Bagaimana	Ruang LBB Lt. 3 Perwakilan BKKRN DIY 100-21 sekutu <ul style="list-style-type: none">• Pelayanan KIB harus melalui fakes, apakah bisa jika poyandibanding (yang ada bidan/pesanya media) sekaligus pembinaan PA dalam rangka mengurangi angka putus paku? Saat ini pelayanan poyandu lebih cenderung pelayanan balita.• Standar pelayanan kompetensi pelayanan KIB → penting bagi pembedaan pelayanan KIB. Provider yang sudah memenuhi standar kompetensi tertentu diberikan melalui aplikasi MONIKA. Tahun 2011-2016 BKKRN sudah melalui tenaga provider sekitar 600-an (dokter dan bidan). Mereka yang sudah dilatih akan diberikan sertifikasi melalui MONIKA. Standar kompetensi sudah pernah diseleksi/terapkan baik melalui IBI dan di Ruang Kecewa. Pertemuan tersebut, beban berdiskusi secara maksimal terhadap capaian provider yang telah tersertifikasi. Kalau KIB-KR diharapkan akan ada bidan dari PD dan PC IBI untuk dapat hadir di acara vocan MONIKA tanggal 8 Oktober 2019. Harapannya, peserta dapat merumuskan informasi dan membuat tugas bidan lainnya. Selanjutnya, akan ada kegiatan lagi dengan 50 peserta (12 dari peserta video+38 peserta baru) untuk pendampingan akses aplikasi MONIKA.• Anggaran dibagikan data untuk monitoring pelayanan KIB sekitar 5 juta an per 1 kabupaten/kota.• Layanan KIB melalui bidan delima, keberadaan bidan delima (terutama merawat) harus dapat memotivasi bidan lain. Jika ada perhatian dan semangat, bidan delima ini lah yang diberikan pelatihan dan seminar. bidan delima ini lah yang diberikan pelatihan. Kabupaten memiliki 64 bidan delima, GK, KI, Bantul 92 bidan delima, Sleman 89 bidan delima, Kota 13 bidan delima. Setiap bidan delima mempunyai capaian atau akseptor yang telah terpenuhi KIB ke BKKRN setiap 3 bidan sekali, 6 bidan. bagaimana dengan bidan yang belum mendapatkan nilai kompetensi (tidak harus melalui pakejannya)?• Debetnya bidan di PD IBI ada yang praktik mandiri ada yang tidak.• Bidan Liru Muli dengan pakejannya, namun lainnya pelayanan perorangan, tidak termasuk pelayanan keluarga berencana. Hal ini menyebabkan bidan tersebut tidak mendapatkan akses dari BKKRN melalui pakejannya. Kalau ini mungkin terjadi karena

Output 2.4 Monev/evaluasi Rapat Koordinasi dengan IBI

- Melaksanakan dari pihak pakejannya dan memang mungkin perlu adanya review Muli (tidak hanya menyebarkan persalinan saja namun juga pelayanan KIB
- KIB PP hanya 20 persen.
- Isai/ bha/RSOS → monitoring 2, hari kehabisan dan PSK KIB Kes. Tahun lalu menyediakan fasilitas dari BKKRN → untuk Kalimantan, penggerak PLKB, pelaksanaan IBI/bidan delima, Tanggal 13 Nov (GK), 14 Nov (BI), 18 Nov (Kota), 19 (KP), 20 (Sleman) Spesifiknya tempatnya di mana belian tahu, Spesifik tempatnya di mana yang menentukan PSK Kecamatan, UnitK Kolongrejo dilaksanakan di Kecamatan Sanggaluh. PD IBI akan mencari tahu informasi kegiatan tempatnya. Pelaksanaan akan di pilih di tempat praktik bidan, PD IBI akan berusaha mencari lokasi-lukanya.
- Anggaran 5 juta ini untuk operasional, hari h, konsumsi kecuali kontrasepsi, Target jumlah tidak ada.
- Apa pelayanan yang dilayani dalam bha/RSOS MKJP dan non-MKJP, PA boleh, PG wajib.
- Bha/RSOS DIY atau sebuah IUD dan implant, saat ini MOP dan MOW, IUD lengkap sudah lancar dilayani di fakes karena terikat regulasi BPJS yang tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Jika dalam bha/RSOS nanti ada pendalaman MOP dan MOW, maka diadahi saja IBI meminta informasi di mana tempat MKJP dan MOW.
- 15-16 Bha/RSOS MOW di Hapoyband.
- RAB terkait SPJ bagumannya atau RAB diserahkan ke IBI.
- Isai/RSOS dibagikan, total bayaran 100 orang akan diberikan ke semua 100 orang, dll dan dikecual IBI.
- Rada/RSOS akan dititikan tentang masalah distribusi akses dari fakes ke jejaring, KP akan dipisahkan role model bha/RSOS komunitas yang telah dibagikan.
- Terkait akses yang untuk bha/RSOS ini akan dikomunikasikan dengan kabupaten/kota melalui di fakes wilayah KIB Kes. Koordinasi IBI berupa, koordinasi melalui fakes, dan OPD diminta drop ke fakes untuk dukungan bha/RSOS KIB Kes.
- Maner' bidan standar kompetensi melalui MONIKA akan dibakar oleh PD dan PC, PD akan mengingatkan kembali ke PC.
- Setelah nanti pertemuan peserta 50 orang, maka bidan-bidan tersebut harusnya di wilayah bergaris monitoring bidan-bidan untuk mempunyai sertifikat. PD IBI akan mencari peluang agar bidan-bidan tersebut bisa menjalankan program sertifikat ini.
- Bha/RSOS provinsi telah memberikan feedback bidan-bidan yang BKKRN provinsi telah memberikan feedback bidan-bidan kembali untuk disediakan pelatihan. Namun, PD IBI meminta kembali feedback tersebut (akan diberikan saat video).
- Ke depan, setiap pertemuan di BKKRN harusnya menyediakan sertifikat dan JNPK, bahkan dari P2KS.

Output 2.4 Notulen Rapat Koordinasi dengan III

- Bidan yang telah mendapatkan pelatihan tahun 2011-2016 baru mendapatkan sertifikat dari P2KS, belum dari INPK. Sertifikat dari P2KS badan sertifikat yang diakui.
- Penyelenggara MCONIKA tingkat MCONIKA pernah dilaksanakan sosialisasi, dari 50 peserta hanya 1 yang lulus. Sebelumnya bagaimana, ditunggu informasi dari videoon Selma, 8 Oktober 2019. Harapannya, secara besar tidak hanya sosialisasi namun juga on job training.
- Penanaman meja 5 penyusuk semest awal tertinggi pada PUS usia 40-an dan banyak di perkaru, mereka menggunakan publikasi secara mandiri di table-top. Rata-rata mereka tidak mau datang ke pelayanan kesehatan. Kita-kita bagaimana kalau melihat fakta tersebut, apakah koordinasi dengan entitas provinsi (agar layanan KB pil dan kondom bisa sampai ke pedang atau puding tidak melalui P2K3B).
- Timbunan sudah tidak ada pelayanan di penyusuk atau pusat Pelayanan KB pil dan kondom sudah alihgani sub-ppkb oleh kader, kader mendapatkan pil dan kondom dari P2K3B (terjadi di wilayah Perani).
- BPPM harus memiliki banner penyusuk, minimal 1 PAMB harus memiliki banner → kesediaan bidan di bawah PD EBT?
- Target per bidan 8-3 persen dari total target. Saat ini dengan bidan Juli baru 34 persen, artinya masih kurang ketersediaan capaian (belum sesuai road map). Target adanya percepatan, grafik akan bundar mengikuti capaian pada bidan-bidan sebelumnya → sinergi dengan PD EBT, sudah satunya optimalisasi penyusuk, tidak EBT, dll.
- Banyak BPPM menggiatkan tesnya jika ada pelatihan hanya bidan dari kecamatan, kemampuan untuk BPPM sudah minimal → akan disampaikan ke kabupaten BKKKS DRY
- KB Pesa akan masih rendah, bidan menggiatkan pelatihan sesuai WTD post-graduate.
- Tahun 2020 sudah bisa menjadi ketepatan pusat untuk pengisian pil nasyyunul.



TIM PENGGERAK DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ALAMAT : KOMPLEK KEPATIHAN DANUREJAN TELP. 562811 PESAWAT 1201
YOGYAKARTA 55213 Email : pkk.diy@gmail.com

Yogyakarta, 9 Oktober 2019

Nomor : 197/Pokja IV/PKK.DIY/X/2019

Lamp :

Perihal : Mohon Personil Tim Penilai

PKK – KKBPK – Kesehatan
Tingkat DIY Tahun 2019.

Kepada

- Yth. ① Kepala Kantor Perwakilan BKKbN DIY..
2. Kepala Dinas Kesehatan DIY
3. Kepala DP3AP2 DIY
4. Kepala Biro Pemberdayaan Masyarakat
DIY

Diberitahukan dengan hormat, bahwa sebagai tindak lanjut Pencanangan PKK – KKBPK – Kesehatan tingkat DIY Tahun 2019 maka TP PKK DIY akan mengadakan lomba kegiatan PKK – KKBPK – Kesehatan Tingkat DIY Tahun 2019 dengan jadwal sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Tanggal 14 November 2019 | Lokasi Kabupaten Bantul. |
| 2. Tanggal 18 November 2019 | Lokasi Kota Yogyakarta. |
| 3. Tanggal 19 November 2019 | Lokasi Kabupaten Kulon Progo. |
| 4. Tanggal 20 November 2019 | Lokasi Kabupaten Sleman. |
| 5. Tanggal 21 November 2019 | Lokasi Kabupaten Gunungkidul |

Sehubungan hal tersebut di atas mohon personil untuk menjadi Tim Yuri PKK –KKBPK – Kesehatan Tingkat DIY Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Kepala Kantor Perwakilan BKKbN DIY | : 5 orang. ✓ |
| 2. Kepala Dinas Kesehatan DIY | : 2 orang. |
| 3. Kepala DP3AP2 DIY | : 1 orang. |
| 4. Kepala Biro Pemberdayaan Masyarakat DIY | : 1 orang. |

Demikian atas perhatian serta kerjasamanya, diucapkan terimakasih.



Wakil Ketua IV
TP PKK DIY,

dr. H. Siswatiningsih, SU

Tembusan :

1. Ketua TP PKK DIY sebagai laporan.



Nomor : /KB.06.02/J.3/2019
 Lampiran : -
 Perihal : Distribusi Dinamis Pii

10 Oktober 2019

Kepada Yth.
 Sekretaris BKKBN DIY
 di -
 YOGYAKARTA

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor : 1231/I/KB.06.02/E1/2019 tanggal 12 September 2019 tentang Realokasi Kontrasepsi Suntik dan Pii, maka kami mohon untuk dapat dikirimkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Pii	175,000 cycle	Dikirimkan dengan hormat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
 Kepala Bidang KB-KR

Pelaksana
 Kasubbid Bina Kesertaan KB
 Jalur Pemerintah & Swasta

Dra. Joehananti Chriswandari

Ratna Anita Sari, S.Si, M.Sc



Nomor : 3992 /KB.06.02/J.3/2019
 Lampiran : -
 Perihal : Distribusi Dinamis Pil

10 Oktober 2019

Kepada Yth,
 Sekretaris BKKBN DIY
 di -
 YOGYAKARTA

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor : 1231/I/KB.06.02/E1/2019 tanggal 12 September 2019 tentang Realokasi Kontrasepsi Suntik dan Pil, maka kami mohon untuk dapat dikirimkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Pil	175,000 cycle	Dikirimkan dengan hormat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
 Kepala Bidang KB-KR



Dra. Joehantanti Chriswandari

Pelaksana
 Kasubbid Bina Kesertaan KB
 Jalur Pemerintah & Swasta


 Ratna Anita Sari, S.Si, M.Sc

Output 3.3

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
D. I. YOGYAKARTA
Jl. Kenari 58 Timoho Yogyakarta

SURAT PERINTAH MENGELUARKAN BARANG

Nomor : /KB.06.02/1.3/2019

Dari : Kepala Bidang KBKR

Kepada Yth : Bendahara Materil

Untuk : Pelayanan KB

Penerima : Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat

Alamat Lengkap : Jl. Surapati No.122, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaier, Kota Bandung,
Jawa Barat 40122

NO	KODE BARANG	NOMOR BATCH	NAMA BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	SBBM NOMOR	KETRANGAN TH. PRODUKSI EXP. DATE
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Pil	175,000 cycle	Rp 1,518		2021

Menyetujui,
Plt. Sekretaris,

Dra. Ita Suryani, M.Kes.

Yogyakarta, 10 Oktober 2019
Kepala Bidang KB-KR

Dra. Joehananti Chriswandari

Output 3.3

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
D. I. YOGYAKARTA
Jl. Kenari 58 Timoho Yogyakarta

SURAT PERINTAH MENGELUARKAN BARANG

Nomor: 3504 /KB.06.02/1.3/2019

Dari : Kepala Bidang KBKR

Kepada Yth : Bendahara Materil

Untuk : Pelayanan KB

Penerima : Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat

Alamat Lengkap : Jl. Surapati No.122, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung,
Jawa Barat 40122

NO	KODE BARANG	NOMOR BATCH	NAMA BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	SBBM NOMOR	KETRANGAN TH. PRODUKSI EXP. DATE
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Pil	175,000 cycle	Rp 1,518		2021

Yogyakarta, 14 Oktober 2019
Kepala Bidang KB-KR

Dra. Joehananti Chriswandari

Menyetujui,
Plt. Sekretaris,

Dra. Ita Suryani, M.Kes.



Nomor : /KB.09.01/J3/2019
Lampiran : - laporan
Perihal : Distribusi Dinamis Pil dan Suntik

November 2019

Yth.
Sekretaris Utama BKKBN
Cq. Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN
di -
Jakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor 1231/I/KB.06.02/E1/2019 tanggal 12 September 2019 perihal Realokasi Kontrasepsi Suntik dan Pil, surat dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat Nomor 1190/TU.05.02/J/2019 tanggal 2 Oktober 2019 Perihal Permohonan Studi Banding Kampung KB dan Mengambil Pil di Perwakilan BKKBN Provinsi DIY, dan surat dari Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nomor 2880/SP.03.02/J/2019 tanggal 9 Oktober 2019 perihal Realokasi Kontrasepsi Suntik, dengan ini kami ^{beritahukan} bahwa Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta telah ^{mengeluarkan} alat kontrasepsi pil dan suntik dari gudang provinsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Pil sebanyak 50.000 cycle (ed. 2021) ke Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat pada tanggal 7 Oktober 2019; ^{yg diambil order}
2. Pil sebanyak 175.000 cycle (ed. 2021) ke Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Oktober 2019; ^{yg ditentuin per tel.....}
3. Suntik KB 3 Bulanan 200.000 vial (ed. 2020) dan *Auto Disposable Syringe/ADS* 100.000 buah (ed.2021) ke Perwakilan BKKBN Provinsi Papua pada tanggal 21 Oktober 2019. ^{yg ditentuin per tel.....}

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala

Rohdhiana Sumariati, S.Sos. M.Sc.

Tambaran Yth :

1. Kepala AS - KA
2. Utama
3. Disalpen
4. Kepala Cabang (Kor pengirim ulg)



Nomor : /KB.09.01/J3/2019
Lampiran : -
Perihal : Laporan Distribusi Dinamis Pili dan Suntik

November 2019

Yth.
Sekretaris Utama BKKBN
Cq. Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN
di -
Jakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor 1231/I/KB.06.02/E1/2019 tanggal 12 September 2019 perihal Realokasi Kontrasepsi Suntik dan Pili, surat dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat Nomor 1190/TU.05.02/J/2019 tanggal 2 Oktober 2019 Perihal Permohonan Studi Banding Kampung KB dan Mengambil Pili di Perwakilan BKKBN Provinsi DIY, dan surat dari Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nomor 2880/SP.03.02/J/2019 tanggal 9 Oktober 2019 perihal Realokasi Kontrasepsi Suntik, dengan ini kami beritahukan bahwa Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta telah mengeluarkan alat kontrasepsi pili dan suntik dari gudang provinsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Pili sebanyak 50.000 cycle (ed. 2021) ke Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat yang diambil pada tanggal 7 Oktober 2019;
2. Pili sebanyak 175.000 cycle (ed. 2021) ke Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Oktober 2019 yang diterima pada tanggal
3. Suntik KB 3 Bulanan 200.000 vial (ed. 2020) dan *Auto Disposable Syringe/ADS* 100.000 buah (ed.2021) ke Perwakilan BKKBN Provinsi Papua pada tanggal 21 Oktober 2019 yang diterima pada tanggal

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala

Rohdhiana Sumariati, S.Sos. M.Sc.

Tembusan Yth.

1. Deputi KB-KR
2. Irtama
3. Dirjalpem
4. Deputi Latbang (sebagai Pembina wilayah)


SURAT BUKTI BARANG KELUAR
 Nomor : 12/SP.04/JI/2019

Kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat
 Nomor J. Surapati no 122, Cihaur geulis, kec. Cibaur yang kaler, kota Bandung 40122

Untuk keperluan Pelayanan Keluarga Berencana

BERDASARKAN SPMB Nomor 3902/KB.06/2013/2019 Tanggal 10 Oktober 2019

NO	NAMA BARANG	NO BATCH	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	UKURAN	TH. PRCD EXP. DATE
1	2	3	4	5	6	7
1	Pil kb Kumbinae	I 10B109 B	40.000	1.518		SEP 2016/SEP 2021
		H 10B134 B	44.400	1.518		AGT 2016/AGT 2021
		I 10B108 B	54.000	1.518		SEP 2016/SEP 2021
		I 10B185 B	28.600	1.518		SEP 2016/SEP 2021

	Yogyakarta yang menganggot/mengambil mengantar	Bandung yang menerima /
---	--	-----------------------------------

Jika barang yang diterima rusak/bekas/kurang agar diben catatn pada CDDK atau tidak ada catatn maka barang dianggap diterima dalam keadaan baik/kurus

Catatan



Nomor : /KB.06.02/J.3/2019
 Lampiran :-
 Perihal : Distribusi Dinamis Suntik

10 Oktober 2019

Kepada Yth.
 Sekretaris BKKBN DIY
 di -
 YOGYAKARTA

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nomor : 2880/SP.03.02/J/2019 tanggal 9 Oktober 2019 tentang Realokasi Kontrasepsi Suntik, maka kami mohon untuk dapat dikirimkan :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Suntikan KB 3 Bulanan	200,000 vial	Dikirimkan dengan hormat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
2	ADS	100,000 buah	

Mengetahui:
 Kepala Bidang KB-KR

Pelaksana
 Kasubbid Bina Kesertaan KB
 Jalur Pemerintah & Swasta

Dra. Joehananti Chriswandari

Ratna Anita Sari, S.Si, M.Sc



Nomor : 3990/KB.06.02/J.3/2019
 Lampiran :-
 Perihal : Distribusi Dinamis Suntik

10 Oktober 2019

Kepada Yth.
 Sekretaris BKKBN DIY
 di -
 YOGYAKARTA

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nomor : 2880/SP.03.02/J/2019 tanggal 9 Oktober 2019 tentang Realokasi Kontrasepsi Suntik, maka kami mohon untuk dapat dikirimkan :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Suntikan KB 3 Bulanan	200,000 vial	Dikirimkan dengan hormat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
2	ADS	100,000 buah	

Mengetahui:
 Kepala Bidang KB-KR



Dra. Joehantanti Chriswandari

Pelaksana
 Kasubbid Bina Kesertaan KB
 Jalur Pemerintah & Swasta


 Ratna Anita Sari, S.Si, M.Sc

Output 4.3

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
D. I. YOGYAKARTA
Jl. Kenari 58 Timoho Yogyakarta

SURAT PERINTAH MENGELUARKAN BARANG

Nomor : /KB.06.02/J.3/2019

Dari : Kepala Bidang KBKR

Kepada Yth : Bendahara Materil

Untuk : Pelayanan KB

Penerima : Perwakilan BKKBN Provinsi Papua

Alamat Lengkap : Jl. Abepura-Kotaraja Jayapura

NO	KODE BARANG	NOMOR BATCH	NAMA BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	SBBM NOMOR	KETRANGAN TH. PRODUKSI EXP. DATE
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Suntikan KB 3 Bulanan	200,000 vial	Rp 6,080		2015/2020
2			ADS	100,000 buah	Rp 1,215		2016/2021

Yogyakarta, 10 Oktober 2019
Kepala Bidang KB-KR

Menyetujui,
Ptt. Sekretaris,

Dra. Ita Suryani, M.Kes.

Dra. Joehananti Chriswandari

Output 4.3

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
D. I. YOGYAKARTA
Jl. Kenari 58 Timoho Yogyakarta

SURAT PERINTAH MENGELUARKAN BARANG

Nomor : 5993 /KB.06.02/I.3/2019

Dari : Kepala Bidang KBKR

Kepada Yth : Bendahara Materil

Untuk : Pelayanan KB

Penerima : Perwakilan BKKBN Provinsi Papua

Alamat Lengkap : Jl. Abepura-Kotaraja Jayapura

NO	KODE BARANG	NOMOR BATCH	NAMA BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	SBBM NOMOR	KETRANGAN TH. PRODUKSI EXP. DATE
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Suntikan KB 3 Bulanan	200,000 vial	Rp 6,080		2015/2020
2			ADS	100,000 buah	Rp 1,215		2016/2021

Yogyakarta, 14 Oktober 2019
Kepala Bidang KB-KR

Dra. Joehananti Chriswandari

Menyetujui,
Kepala Bidang KB-KR



Dra. Ita Suryani, M.Kes.

Nomor : /KB.09.01/J3/2019
Lampiran : - laporan
Perihal : Distribusi Dinamis Pil dan Suntik

November 2019

Yth.
Sekretaris Utama BKKBN
Cq. Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN
di -
Jakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor 1231/I/KB.06.02/E1/2019 tanggal 12 September 2019 perihal Realokasi Kontrasepsi Suntik dan Pil, surat dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat Nomor 1190/TU.05.02/J/2019 tanggal 2 Oktober 2019 Perihal Permohonan Studi Banding Kampung KB dan Mengambil Pil di Perwakilan BKKBN Provinsi DIY, dan surat dari Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nomor 2880/SP.03.02/J/2019 tanggal 9 Oktober 2019 perihal Realokasi Kontrasepsi Suntik, dengan ini kami ^{beritahukan} bahwa Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta telah ^{mengeluarkan} alat kontrasepsi pil dan suntik dari gudang provinsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Pil sebanyak 50.000 cycle (ed. 2021) ke Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat pada tanggal 7 Oktober 2019;
2. Pil sebanyak 175.000 cycle (ed. 2021) ke Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Oktober 2019; ^{yg ditentukan per tel.....}
3. Suntik KB 3 Bulanan 200.000 vial (ed. 2020) dan *Auto Disposable Syringe*/ADS 100.000 buah (ed.2021) ke Perwakilan BKKBN Provinsi Papua pada tanggal 21 Oktober 2019. ^{yg ditentukan per tel.....}

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala

Rohdhiana Sumariati, S.Sos. M.Sc.

- Tembusan Yth :
1. Peruli EA - HA
 2. Itama
 3. Ditjapem
 4. Peruli Kelong (Kor pengirim usg)



Nomor : /KB.09.01/J3/2019
Lampiran : -
Perihal : Laporan Distribusi Dinamis Pii dan Suntik

November 2019

Yth.
Sekretaris Utama BKKBN
Cq. Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN
di -
Jakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor 1231/I/KB.06.02/E1/2019 tanggal 12 September 2019 perihal Realokasi Kontrasepsi Suntik dan Pii, surat dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat Nomor 1190/TU.05.02/J/2019 tanggal 2 Oktober 2019 Perihal Permohonan Studi Banding Kampung KB dan Mengambil Pii di Perwakilan BKKBN Provinsi DIY, dan surat dari Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nomor 2880/SP.03.02/J/2019 tanggal 9 Oktober 2019 perihal Realokasi Kontrasepsi Suntik, dengan ini kami beritahukan bahwa Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta telah mengeluarkan alat kontrasepsi pil dan suntik dari gudang provinsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Pii sebanyak 50.000 cycle (ed. 2021) ke Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat yang diambil pada tanggal 7 Oktober 2019;
2. Pii sebanyak 175.000 cycle (ed. 2021) ke Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Oktober 2019 yang diterima pada tanggal
3. Suntik KB 3 Bulanan 200.000 vial (ed. 2020) dan *Auto Disposable Syringe*/ADS 100.000 buah (ed.2021) ke Perwakilan BKKBN Provinsi Papua pada tanggal 21 Oktober 2019 yang diterima pada tanggal

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Pit. Kepala

Rohdhiana Sumariati, S.Sos. M.Sc.

Tembusan Yth.
1. Deputy KB-KR
2. Irtama
3. Dirjalpem
4. Deputy Latbang (sebagai Pembina wilayah)

SURAT JALAN

Kepada: Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat
 Alamat: Jl. Kampung Kumbi Arfa II Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Barat, Merauke

NO	NAMA BARANG	NO BATCH	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	URURAN (kg/lot/ml)	TH PROD EXP DATE
1	2	3	4	5	6	7
1	Surtak KB	BH702112	22.500	0.080		AGT 2016-AGT 2021
		ES08201	24.500	0.080		OKT 2016-OKT 2021
		GE702203	73.000	0.080		MEL 2016-MEL 2021
		T24K16	62.000	0.080		OKT 2016-OKT 2021
		BH702211	18.000	0.080		AGT 2016-AGT 2021
2	Auto Disposable Syringe (ADS)	M310	100.000	1.210		SEP2016-AGT 2021



Yogyakarta yang mengangkut/mengantar
 mengantar
 Jakarta yang menerima
 NIP.

Jika barang yang diterima rusak/pecah/kurang agar diberi catatan pada SBPK, kalau tidak ada catatan maka barang dianggap diterima dengan keadaan baik/okup
 Catatan



Nomor : /KB.09.01/J3/2019
Lampiran : -
Perihal : Rencana Realokasi
Kontrasepsi Pil dan Suntik

3 Oktober 2019

Yth.
Sekretaris Utama BKKBN
Cq. Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN
di -
Jakarta

Dengan hormat,

Menyusuli surat kami nomor 3630/KB.09.01/J3/2019 tanggal 17 September 2019 Perihal Rencana Realokasi Kontrasepsi Suntik dan Pil bahwa sedianya Perwakilan BKKBN DIY akan merealokasikan pil ke Provinsi Jawa Barat sebanyak 225.500 cycle, lengkap dengan biaya pengiriman dan bongkar muat. Akan tetapi, menindaklanjuti surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat nomor 1190/TU.05.02/J/2019 tanggal 2 Oktober 2019 Perihal Permohonan Ijin Studi Banding Kampung KB dan Mengambil Pil di Perwakilan BKKBN Provinsi DIY bahwa Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat bermaksud mengambil sendiri pil sebanyak 50.000 cycle dari Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi DIY pada tanggal 6-9 Oktober 2019.

*225.500 cycle
karena memang
merealokasikan
ke provinsi
lainnya*

Sehubungan dengan hal tersebut, Perwakilan BKKBN DIY akan merealokasikan pil ke Provinsi Jawa Barat sebanyak 175.550 cycle lengkap dengan biaya pengiriman dan bongkar muat pada tanggal 14 Oktober 2019, ~~serta ke Provinsi Papua Barat~~ sebanyak 50.000 cycle. Selain itu, Perwakilan BKKBN DIY akan merealokasikan suntik ke Provinsi Papua sebanyak 327.000 vial pada tanggal 15 Oktober 2019.

perkiraan ini baru. akan diberikan pd.

⑦ Seandainya pil sebanyak 50.000 cycle akan direalokasikan ke prov. Papua Barat (kemungkinan no:)

Untuk realokasi suntik sebanyak 327.000 vial ke prov. Papua tetap harus dilaksanakan dan perlu. pengirim tgl 15 okt 2019

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala

Rohdhiana Sumariati, S.Sos. M.Sc.

Tembusan Yth.

1. Deputi Bidang KB-KR BKKBN
2. Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat
3. Kepala Perwakilan BKKBN Papua

→ Direktur Jafean

→ Kepala Papua Praker

Output 5.2

Nomor : /KB.06.02/J.3/2019
Lampiran :-
Perihal Distribusi Dinamis Pil

4 Oktober 2019

Kepada Yth.
Sekretaris BKKBN DIY
di -
YOGYAKARTA

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat Nomor : 1190/TU.05.02/J/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Permohonan Distribusi Dinamis Pil, maka kami mohon untuk dapat dikirimkan :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Pil	50.000 cycle	Agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Kepala Bidang KB-KR

Pelaksana
Kasubbid Bina Kesertaan KB
Jalur Pemerintah & Swasta

Dra. Joehananti Chriswandari

Ratna Anita Sari, S.Si, M.Sc



Nomor : 3666/KB.06.02/J.3/2019
 Lampiran : -
 Perihal : Distribusi Dinamis Pil

4 Oktober 2019

Kepada Yth.
 Sekretaris BKKBN DIY
 di -
 YOGYAKARTA

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat Nomor : 1190/TU.05.02/J/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Permohonan Distribusi Dinamis Pil, maka kami mohon untuk dapat dikirimkan :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Pil	50.000 cycle	Agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
 Kepala Bidang KB-KR



Dra. Joehantanti Chriswandari

Pelaksana

Kasubbid Bina Kesertaan KB
 Jalur Pemerintah & Swasta


 Ratna Anita Sari, S.Si, M.Sc

Output 5.3

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
D. I. YOGYAKARTA
Jl. Kenari 58 Timoho Yogyakarta

SURAT PERINTAH MENGELUARKAN BARANG

Nomor : /KB.06.02/J.3/2019

Dari : Kepala Bidang KBKR

Kepada Yth : Bendahara Materilil

Untuk : Pelayanan KB

Penerima : Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat

Alamat Lengkap Kampung Katebu Arfai II Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Barat

NO	KODE BARANG	NOMOR BATCH	NAMA BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	SBBM NOMOR	KETRANGAN TH. PRODUKSI EXP. DATE
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Pil	50.000 cycle	Rp 1.518		2021

Yogyakarta, 4 Oktober 2019
Kepala Bidang KB-KR

Menyetujui,
Pit. Sekretaris,

Dra. Ita Suryani, M.Kes.

Dra. Joehananti Chriswandari

Output 5.3

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
D. I. YOGYAKARTA
Jl. Kenari 58 Timoho Yogyakarta

SURAT PERINTAH MENGELUARKAN BARANG

Nomor : 3967 /KB.06.02/J.3/2019

Dari : Kepala Bidang KBKR

Kepada Yth : Bendahara Materil

Untuk : Pelayanan KB

Penerima : Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat

Alamat Lengkap : Kampung Katebu Arfai II Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Barat

NO	KODE BARANG	NOMOR BATCH	NAMA BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	SBBM NOMOR	KETRANGAN TH. PRODUKSI EXP. DATE
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Pil	50.000 cycle	Rp 1.518		2021

Yogyakarta, 4 Oktober 2019
Kepala Bidang KB-KR


Dra. Joehananti Chriswandari



Nomor : /KB.09.01/J3/2019
Lampiran : - laporan
Perihal : Distribusi Dinamis Pil dan Suntik

November 2019

Yth.
Sekretaris Utama BKKBN
Cq. Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN
di -
Jakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor 1231/I/KB.06.02/E1/2019 tanggal 12 September 2019 perihal Realokasi Kontrasepsi Suntik dan Pil, surat dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat Nomor 1190/TU.05.02/J/2019 tanggal 2 Oktober 2019 Perihal Permohonan Studi Banding Kampung KB dan Mengambil Pil di Perwakilan BKKBN Provinsi DIY, dan surat dari Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nomor 2880/SP.03.02/J/2019 tanggal 9 Oktober 2019 perihal Realokasi Kontrasepsi Suntik, dengan ini kami ^{beritahukan} bahwa Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta telah ^{mendistribusikan} mengeluarkan alat kontrasepsi pil dan suntik dari gudang provinsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Pil sebanyak 50.000 cycle (ed. 2021) ke Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat pada tanggal 7 Oktober 2019; ^{yg diambil order}
2. Pil sebanyak 175.000 cycle (ed. 2021) ke Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Oktober 2019; ^{yg diterima per tel.....}
3. Suntik KB 3 Bulanan 200.000 vial (ed. 2020) dan *Auto Disposable Syringe* ADS 100.000 buah (ed.2021) ke Perwakilan BKKBN Provinsi Papua pada tanggal 21 Oktober 2019. ^{yg diterima per tel.....}

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Pt. Kepala

Rohdhiana Sumariati, S.Sos. M.Sc.

Tembusan Yth.
1. Revisi LS - RA
2. Itama
3. Disalpin
4. Rambu Kelong (Kor pembina utg)



Nomor : /KB.09.01/J3/2019
Lampiran : -
Perihal : Laporan Distribusi Dinamis Pil dan Suntik

November 2019

Yth.
Sekretaris Utama BKKBN
Cq. Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN
di -
Jakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor 1231/I/KB.06.02/E1/2019 tanggal 12 September 2019 perihal Realokasi Kontrasepsi Suntik dan Pil, surat dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat Nomor 1190/TU.05.02/J/2019 tanggal 2 Oktober 2019 Perihal Permohonan Studi Banding Kampung KB dan Mengambil Pil di Perwakilan BKKBN Provinsi DIY, dan surat dari Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nomor 2880/SP.03.02/J/2019 tanggal 9 Oktober 2019 perihal Realokasi Kontrasepsi Suntik, dengan ini kami beritahukan bahwa Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta telah mengeluarkan alat kontrasepsi pil dan suntik dari gudang provinsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Pil sebanyak 50.000 cycle (ed. 2021) ke Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat yang diambil pada tanggal 7 Oktober 2019;
2. Pil sebanyak 175.000 cycle (ed. 2021) ke Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Oktober 2019 yang diterima pada tanggal
3. Suntik KB 3 Bulanan 200.000 vial (ed. 2020) dan *Auto Disposable Syringe/ADS* 100.000 buah (ed.2021) ke Perwakilan BKKBN Provinsi Papua pada tanggal 21 Oktober 2019 yang diterima pada tanggal

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala

Rohdhiana Sumariatl, S.Sos. M.Sc.

Tembusan Yth.

1. Deputi KB-KR
2. Irtama
3. Dirjalpem
4. Deputi Latbang (sebagai Pembina wilayah)



BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PERSEDIAAN

Nomor : 3876/SP/04/II/2019

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh, bulan Dua, ribu sembilan belas belas bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- | | | |
|-----|--------------|---|
| I. | Nama | Ulok Andes Herjantam, SE |
| | NIP | 198612262010012012 |
| | Pangkat/Gol | Penata III C |
| | Jabatan | Kasubag Keuangan dan BMN |
| | Status Kerja | Pewakilan BKKBN DIY Yogyakarta |
| | | untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA |
| II. | Nama | dr. Christina |
| | NIP | 196103252008022001 |
| | Pangkat/Gol | |
| | Jabatan | Kabid KB |
| | Instansi | Pewakilan BKKBN Provinsi Papua Barat |
| | | untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

telah melakukan serah terima Barang Milik Negara yang pengadaannya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab milik kuasa Penggunaan Barang satuan Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

- PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Barang Milik Negara berupa Alat Kontrasepsi Non Alat Kontrasepsi, dengan rincian terlampir
- PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Barang Milik Negara berupa Alat Kontrasepsi Non Alat Kontrasepsi, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir a

Pasal 2

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 berahib dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

Pasal 3

Ditentukan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

Perwakilan Barang
Milik Negara
Perwakilan BKKBN DIY
Kasubag Keuangan dan BMN



Ulok Andes Herjantam, SE
198612262010012012

PIHAK KEDUA

dr. Ketua Pengguna Barang
Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat
Kabid KB



dr. Christina
196103252008022001

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Kenari No.58 (Timoho) Yogyakarta Telp. (0274) 561215, 513422 Fax (0274) 600336 - 600337

BKNAPSGAN

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor : 3876/SP.04/11/ 2019

NO	URAIAN BARANG	KUANITAS	NILAI SATUAN	JUMLAH TOTAL
1	PSI KB Kombinasi	50.000	1.518	75.900.000
	JUMLAH			75.900.000



SURAT BUKTI BARANG KELUAR
 Nomor : 11/SP.04/JI/2019

Kepada Kepala Perwakilan BPKN Provinsi Papua Barat
 Kantor : Jl. Kampung Kaitu Arai II Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Barat Manokwari

URSAK Revisi : Perbaikan Keluarga Berencana

Berdasarkan SPMB Nomor : 385/KB/SP/2019 Tanggal : 4 Oktober 2019

NO	NAMA BARANG	NO. BATCH	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	URSAK (kg/calon)	TH PROD EXP DATE
1	2	3	4	5	6	7
1	PI KB Kumbay	1 HB110B	30.000	1.518		2018/Sep 2021
		1 HB135B	10.000	1.518		2018/Sep 2021
		2 HB003B	10.000	1.518		2018/Jun 2021

Yogyakarta 07 - 10 - 2019 Yang Menyampaikan Bersama Barang  Ti Yudianto NIP 19640130 198711 1 001	Yogyakarta yang mengangkut/mengantar barang  Murniah
---	--

Jika barang yang diterima rusak / pecatir kurang agar segera dilaporkan pada SPMB, kalau tidak ada catatan maka barang dianggap diterima dalam keadaan baik cukup.

Catatan

Nomor : 3855 /KB.09.01/J3/2019
 Lampiran : -
 Perihal : Rencana Realokasi
 Kontrasepsi Pil dan Suntik

3 Oktober 2019

Yth.
 Sekretaris Utama BKKBN
 Cq. Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN
 di -
 Jakarta

Dengan hormat,

Menyusuli surat kami nomor 3630/KB.09.01/J3/2019 tanggal 17 September 2019 Perihal Rencana Realokasi Kontrasepsi Suntik dan Pil bahwa sedianya Perwakilan BKKBN DIY akan merealokasikan pil ke Provinsi Jawa Barat sebanyak 225.500 cycle, lengkap dengan biaya pengiriman dan bongkar muat. Akan tetapi, menindaklanjuti surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat nomor 1190/TU.05.02/J/2019 tanggal 2 Oktober 2019 Perihal Permohonan Ijin Studi Banding Kampung KB dan Mengambil Pil di Perwakilan BKKBN Provinsi DIY bahwa Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat bermaksud mengambil sendiri pil sebanyak 50.000 cycle dari Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi DIY pada tanggal 6-9 Oktober 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perwakilan BKKBN DIY yang sedianya akan merealokasikan pil ke Provinsi Jawa Barat sebanyak 225.500 cycle hanya mampu merealokasikan sebanyak 175.550 cycle lengkap dengan biaya pengiriman dan bongkar muat, pengiriman direncanakan pada tanggal 14 Oktober 2019. Sedangkan pil sebanyak 50.000 cycle akan direalokasikan ke Provinsi Papua Barat (sesuai surat nomor 1190/TU.05.02/J/2019). Untuk merealokasikan suntik sebanyak 327.000 vial ke Provinsi Papua tetap kami laksanakan dan rencana pengiriman tanggal 15 Oktober 2019.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Bondriana Sumartati, S.Sos. M.Sc.

Tembusan Yth.

1. Deputi Bidang KB-KR BKKBN
2. Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat
4. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua
5. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat



Nomor : 3855 /KB.09.01/J3/2019
Lampiran : -
Perihal : Rencana Realokasi
Kontrasepsi Pil dan Suntik

3 Oktober 2019

Yth.
Sekretaris Utama BKKBN
Cq. Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN
di -
Jakarta

Dengan hormat,

Menyusuli surat kami nomor 3630/KB.09.01/J3/2019 tanggal 17 September 2019 Perihal Rencana Realokasi Kontrasepsi Suntik dan Pil bahwa sedianya Perwakilan BKKBN DIY akan merealokasikan pil ke Provinsi Jawa Barat sebanyak 225.500 cycle, lengkap dengan biaya pengiriman dan bongkar muat. Akan tetapi, menindaklanjuti surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat nomor 1190/TU.05.02/J/2019 tanggal 2 Oktober 2019 Perihal Permohonan Ijin Studi Banding Kampung KB dan Mengambil Pil di Perwakilan BKKBN Provinsi DIY bahwa Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat bermaksud mengambil sendiri pil sebanyak 50.000 cycle dari Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi DIY pada tanggal 6-9 Oktober 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perwakilan BKKBN DIY yang sedianya akan merealokasikan pil ke Provinsi Jawa Barat sebanyak 225.500 cycle hanya mampu merealokasikan sebanyak 175.550 cycle lengkap dengan biaya pengiriman dan bongkar muat, pengiriman direncanakan pada tanggal 14 Oktober 2019. Sedangkan pil sebanyak 50.000 cycle akan direalokasikan ke Provinsi Papua Barat (sesuai surat nomor 1190/TU.05.02/J/2019). Untuk merealokasikan suntik sebanyak 327.000 vial ke Provinsi Papua tetap kami laksanakan dan rencana pengiriman tanggal 15 Oktober 2019.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Rochmana Sumartono, S.Sos. M.Sc.

Tembusan Yth.

1. Deputi Bidang KB-KR BKKBN
2. Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat
4. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua
5. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat



Nomor : 3855 /KB.09.01/J3/2019
 Lampiran : -
 Perihal : Rencana Realokasi
 Kontrasepsi Pil dan Suntik

3 Oktober 2019

Yth.
 Sekretaris Utama BKKBN
 Cq. Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN
 di -
 Jakarta

Dengan hormat,

Menyusuli surat kami nomor 3630/KB.09.01/J3/2019 tanggal 17 September 2019 Perihal Rencana Realokasi Kontrasepsi Suntik dan Pil bahwa sedianya Perwakilan BKKBN DIY akan merealokasikan pil ke Provinsi Jawa Barat sebanyak 225.500 cycle, lengkap dengan biaya pengiriman dan bongkar muat. Akan tetapi, menindaklanjuti surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat nomor 1190/TU.05.02/J/2019 tanggal 2 Oktober 2019 Perihal Permohonan Ijin Studi Banding Kampung KB dan Mengambil Pil di Perwakilan BKKBN Provinsi DIY bahwa Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat bermaksud mengambil sendiri pil sebanyak 50.000 cycle dari Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi DIY pada tanggal 6-9 Oktober 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perwakilan BKKBN DIY yang sedianya akan merealokasikan pil ke Provinsi Jawa Barat sebanyak 225.500 cycle hanya mampu merealokasikan sebanyak 175.550 cycle lengkap dengan biaya pengiriman dan bongkar muat, pengiriman direncanakan pada tanggal 14 Oktober 2019. Sedangkan pil sebanyak 50.000 cycle akan direalokasikan ke Provinsi Papua Barat (sesuai surat nomor 1190/TU.05.02/J/2019). Untuk merealokasikan suntik sebanyak 327.000 vial ke Provinsi Papua tetap kami laksanakan dan rencana pengiriman tanggal 15 Oktober 2019.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Rendhiana Sumanati, S.Sos. M.Sc.

Tembusan Yth.

1. Deputi Bidang KB-KR BKKBN
2. Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat
4. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua
5. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat



Nomor : 3855 /KB.09.01/J3/2019
Lampiran : -
Perihal : Rencana Realokasi
Kontrasepsi Pil dan Suntik

3 Oktober 2019

Yth.
Sekretaris Utama BKKBN
Cq. Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN
di -
Jakarta

Dengan hormat,

Menyusuli surat kami nomor 3630/KB.09.01/J3/2019 tanggal 17 September 2019 Perihal Rencana Realokasi Kontrasepsi Suntik dan Pil bahwa sedianya Perwakilan BKKBN DIY akan merealokasikan pil ke Provinsi Jawa Barat sebanyak 225.500 cycle, lengkap dengan biaya pengiriman dan bongkar muat. Akan tetapi, menindaklanjuti surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat nomor 1190/TU.05.02/J/2019 tanggal 2 Oktober 2019 Perihal Permohonan Ijin Studi Banding Kampung KB dan Mengambil Pil di Perwakilan BKKBN Provinsi DIY bahwa Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat bermaksud mengambil sendiri pil sebanyak 50.000 cycle dari Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi DIY pada tanggal 6-9 Oktober 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perwakilan BKKBN DIY yang sedianya akan merealokasikan pil ke Provinsi Jawa Barat sebanyak 225.500 cycle hanya mampu merealokasikan sebanyak 175.550 cycle lengkap dengan biaya pengiriman dan bongkar muat, pengiriman direncanakan pada tanggal 14 Oktober 2019. Sedangkan pil sebanyak 50.000 cycle akan direalokasikan ke Provinsi Papua Barat (sesuai surat nomor 1190/TU.05.02/J/2019). Untuk merealokasikan suntik sebanyak 327.000 vial ke Provinsi Papua tetap kami laksanakan dan rencana pengiriman tanggal 15 Oktober 2019.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Rondhiana Sumartati, S.Sos. M.Sc.

Tembusan Yth.

1. Deputi Bidang KB-KR BKKBN
2. Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat
4. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua
5. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat



Nomor : 3855 /KB.09.01/J3/2019
 Lampiran : -
 Perihal : Rencana Realokasi
 Kontrasepsi Pil dan Suntik

3 Oktober 2019

Yth.
 Sekretaris Utama BKKBN
 Cq. Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN
 di -
 Jakarta

Dengan hormat,

Menyusuli surat kami nomor 3630/KB.09.01/J3/2019 tanggal 17 September 2019 Perihal Rencana Realokasi Kontrasepsi Suntik dan Pil bahwa sedianya Perwakilan BKKBN DIY akan merealokasikan pil ke Provinsi Jawa Barat sebanyak 225.500 cycle, lengkap dengan biaya pengiriman dan bongkar muat. Akan tetapi, menindaklanjuti surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat nomor 1190/TU.05.02/J/2019 tanggal 2 Oktober 2019 Perihal Permohonan Ijin Studi Banding Kampung KB dan Mengambil Pil di Perwakilan BKKBN Provinsi DIY bahwa Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat bermaksud mengambil sendiri pil sebanyak 50.000 cycle dari Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi DIY pada tanggal 6-9 Oktober 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perwakilan BKKBN DIY yang sedianya akan merealokasikan pil ke Provinsi Jawa Barat sebanyak 225.500 cycle hanya mampu merealokasikan sebanyak 175.550 cycle lengkap dengan biaya pengiriman dan bongkar muat, pengiriman direncanakan pada tanggal 14 Oktober 2019. Sedangkan pil sebanyak 50.000 cycle akan direalokasikan ke Provinsi Papua Barat (sesuai surat nomor 1190/TU.05.02/J/2019). Untuk merealokasikan suntik sebanyak 327.000 vial ke Provinsi Papua tetap kami laksanakan dan rencana pengiriman tanggal 15 Oktober 2019.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Pit. Kepala

Rondhiana Sumartati, S.Sos. M.Sc.

Tembusan Yth.

1. Deputi Bidang KB-KR BKKBN
2. Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat
4. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua
5. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
 Daerah Istimewa Yogyakarta

LAPORAN
KONSULTASI PROGRAM KBKR TINGKAT PROVINSI DALAM BANGKA THE 1st
INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDONESIA FAMILY PLANNING AND
REPRODUCTIVE HEALTH

I. PELAKSANAAN

Hari / tanggal : Senin-Rabu / 30 September – 2 Oktober 2019
 Tempat : Sahid Jaya Hotel Yogyakarta

II. PESERTA

1. Ratna Anita Sari, S.Si, M.Sc.
2. dr. MZ. Fathurrahman, M.Sc.
3. Umi Lutfiah, S.K.M.
4. Sudarti, S.Si.T, M.PH.
5. Dr. Pande Made Kulanegara, M.Si.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Konsultasi Program KBKR Tingkat Provinsi dalam rangka *The 1st International Conference on Indonesia Family Planning and Reproductive Health*

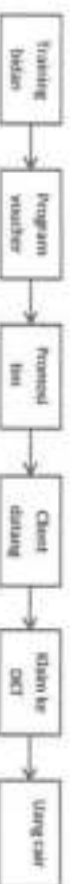
IV. KEGIATAN**Hari Pertama**

1. Konferensi dibuka dengan opening speech dari Prof Sutowo, Jr. Panut, dr. Krana Pritasari, dan dr.Hasto Wardoyo. Prof Sutowo menyatakan pentingnya keterlibatan beberapa pihak dalam meningkatkan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Prof Sutowo juga menyatakan bahwa keterlibatan generasi muda dalam konferensi ini menunjukkan bahwa generasi muda sudah mulai dapat mengambil peran dalam Meningkatkan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
2. Rektor UGM, Jr. Panut menekankan bahwa pengetahuan tidak akan berarti jika tidak diimbangi dengan realisasi.
3. Perwakilan Kementerian Kesehatan diwakili oleh dr.Krana Pritasari, MQIH selaku Direktur Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI menyampaikan mengenai beberapa tantangan dalam Program KB dan Kespro, antara lain: penurunan TFR, ASFR 15-19 tahun, unmet need, angka putus pakai kontrasepsi,

- pertakaban anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, HIV/AIDS, stunting, IMR, MMR, dan anemia pada ibu hamil. Kementerian Kesehatan melalui Rencana Pemerintah Jangka Menengah 2020-2024 telah menyusun rencana strategi peningkatan KB dan Kespro. Beberapa tantangan yang telah disebutkan tersebut membutuhkan komitmen tidak hanya dari pemerintah, namun juga dari sector swasta, NGO, professional, akademis, masyarakat, dan pemerintah daerah.
4. Mr. Bjorn Anderson, Direktur Asia Pasifik UMFPA juga menyampaikan terkait tantangan 25 tahun ICD0, perspektif regional dan global.
 5. Sesi selanjutnya adalah sesi tentang inovasi untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses KB dan Kespro, termasuk terkait teknologi kontrasepsi terketil. Sesi ini membahas mengenai teori dan aplikasi untuk inovasi, inovat teknologi kontrasepsi, dan kemajuan platform digital dalam sektor kesehatan (halodoc). Untuk teori dan aplikasi untuk inovasi, dipaparkan mengenai proyek Filhanu yang telah dilakukan John Hopkins University dengan PPK UL. Filhanu merupakan *ekaton* yaitu cara berpikir baru yang mampu untuk mempengaruhi perilaku individu. Sedangkan perilaku sendiri dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, cara diri, pemertnaan risiko, norma, self efficacy, emosi, pengaruh sosial, dan personal advocacy. Dalam Filhanu ini menggunakan pemetaan kognitif, di mana pertemuan ini mampu merepresentasikan bagaimana orang/individu membangun persepsi mereka atas isu sosial di lingkungan sekitarnya. Pada fase awal penelitian tahun 2015 didapatkan informasi bahwa kontrasepsi yang diinginkan oleh informan adalah kontrasepsi yang mudah digunakan, mudah didapatkan, efektif, jangka panjang, dan tidak ada efek samping. Dari beberapa kriteria yang disebutkan tersebut, IUD dan Implan merupakan 2 jenis metode kontrasepsi yang paling mendekati.
 6. Sedangkan Alice menyatakan bahwa 33,2% angka putus pakai di Indonesia berdasarkan SDCI 2017 dikarenakan takut efek samping. Sebanyak 12% menyatakan tidak akan menggunakan alat kontrasepsi akibat takut efek samping. Gate Foundation memiliki fokus untuk menciptakan teknologi baru kontrasepsi dalam rangka mengurangi efek samping alat kontrasepsi, salah satunya dengan implant chip.
 7. Halodoc Indonesia telah bekerjasama dengan lebih dari 40.000 bidan di 25 kota di Indonesia dan bekerjasama dengan apotek untuk memberikan harga yang terjangkau bagi para bidan. Selain itu, kerjasama dengan apotek juga untuk memastikan bahwa bidan-bidan tersebut tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan logistic medis mereka. Namun, pertanyaan yang muncul terkait halodoc ini adalah mekanisme penegakan diagnosis penyakit gessen yang

hanya berdasarkan chat online pasien dengan dokter. Hal ini bertentangan dengan diagnose dokter pada umumnya yang juga harus dibarengi dengan pemeriksaan fisik. Feedback dari feedback menyatakan bahwa beberapa kasus jika membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut maka akan dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan atau ke laboratorium.

8. Soal sebelumnya adalah soal Saletine 2. Soal yang dibuat adalah soal "Marketing Contraceptive Seder, A Social Marketing Approach of Contraceptive Promotion in Indonesia oleh DKT, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna produk DKT terbanyak, yaitu 9 juta pada tahun 2018. DKT saat ini juga telah menerapkan social marketing di mana DKT memanfaatkan infrastruktur komersial yang ada untuk membatu perubahan di masyarakat. DKT juga memubli maasret penggunaan kontrasepsi khususnya kondom menjadi progressive, love, benefit, enjoyable, practical, peace of mind, dan responsible. Setai yang dimaksud dalam kontrasepsi tidak hanya fisik yang terbuka namun juga terkait aspirasi, kecermatkan, bagaimana merubah perempuan dari objek menjadi subjek, dan bagaimana program kb dapat mengedukasi generasi milenials dan generasi Z. Program Social Enterprise yang dilakukan DKT antara lain program nakh masalah, pebalikan bidan CTU, NU, konseling, dan postpartum IUD. Tahun 2018 DKT memiliki program dukungan HKJP dengan era JKN di 11 area. Berikut alur program DKT dengan sesaran bidan-bidan.



Voucher yang diberikan kepada masyarakat ada yang sepenuhnya gratis, ada juga yang dibayar dengan peningkatan kualitas layanan. Dari 23.097 yang dikonseling oleh bidan terlatih, sebanyak 12.085 mendapatkan voucher, dan 10.944 datang ke praktik bidan. Dari jumlah tersebut, 62% memilih menggunakan implant setelah dilakukan konseling. Hanya 6% yang memilih menggunakan suntik. Sebanyak 62% akseptor yang dulunya memilih suntik, setelah dikonseling memilih implant, dan sebanyak 29% memilih IUD. Akseptor yang dulunya memilih pi sebanyak 60% memilih implant setelah dilakukan konseling dan 37% memilih IUD. Banyak bidan mau bergabung dengan program ini karena system retribusemen yang cepat, yaitu 14 hari cair dari tanggal klaim. Padahal nominal yang dibelikan sama dengan nominal BPJS Kesehatan, yaitu 100 ribu untuk implant dan 75 ribu untuk IUD. Tahun 2019 program DKT

berubah dari sasaran bidan ke sasaran kader KBL. Kader-kader ini juga melakukan konseling ke masyarakat.

Hari Kedua

1. Kebutuhan gender juga dialami oleh laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang berbeda. Perempuan mengalami putus sekolah dini, perkawinan anak dan suntik perempuan, kekerasan berbasis gender, dan tingkat kesetresan yang tinggi. Sedangkan laki-laki mengalami kekerasan personal, putus sekolah dini, kecemasan berendam, rokok, alcohol, obat-obatan terlarang, dan harapan hidup yang rendah.
2. Hasil penelitian juga menyatakan bahwa anak laki-laki menghabiskan waktu lebih banyak dengan teman sebayanya, memiliki kebebasan lebih untuk melakukan percobaan. Sedangkan perempuan lebih banyak diantarai dan melapor kepada pengasuh/orang tua.
3. Anak perempuan cenderung memiliki kepercayaan yang rendah terhadap tetangga. Anak laki-laki cenderung merasa lebih aman dengan tetangga dan di sekolah, namun lebih cenderung merasakan kekerasan interpersonal dibandingkan dengan perempuan.
4. Anak perempuan juga memiliki keinginan mendapatkan pendidikan yang tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki.
5. Anak laki-laki lebih banyak mengalami kekerasan dalam bentuk body dibandingkan dengan perempuan, lebih banyak yang terpapar rokok dan alcohol. Namun, perempuan lebih banyak yang mengalami gejala depresi dibandingkan anak laki-laki.
6. Baik anak perempuan dan laki-laki yang memiliki pengasuhan body di masa kecil menunjukkan gejala depresi dibandingkan teman sebayanya, namun gejala depresi ini lebih banyak pada perempuan daripada anak laki-laki.
7. Beberapa informasi yang didapatkan dari GEAS (Global Early Adolescent Study) antara lain: kesehatan seksual dan reproduksi, pubertas, pengendalian kepribadian, kesehatan mental, hubungan antar remaja, kebebasan untuk berbicara, persepsi tubuh, norma gender, kebebasan untuk bersikap, serta media.
8. Responden GEAS 93% berusia 12-13 tahun, 63% bergama Islam, 33% Hindu, dan 2% Kristen. Sebanyak 79,8% sering menghadiri acara keagamaan, 59% memiliki orang tua berpendidikan menengah dan 94% orang tua mereka bekerja.

9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 dari 6 remaja merasa terancam di sekolah dan lebih dari sepertiganya merasa terancam di lingkungan rumah mereka. Ancaman itu datang dari teman sebayanya mereka. Sebanyak 2/5 remaja membawa senjata sebagai bentuk perlindungan diri. Anak laki-laki lebih banyak mengalami ACEs (Adverse Childhood Experiences) dibandingkan anak perempuan, menunjukkan anak laki-laki mengalami perundungan, melakukan perundungan, atau menyaksikan perundungan lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan.
10. Anak perempuan lebih banyak yang menyatakan bunya dipukul atau diancam, dipukul secara seksual oleh orang dewasa, dan dipaksa melakukan hubungan seksual oleh orang dewasa.
11. 1 dari 6 anak merasa tidak aman berada di sekolah. Sebanyak 76,6 persen merasa terancam oleh teman di kotanya, 16,4 persen merasa tidak aman oleh guru atau orang dewasa lainnya.
12. Pengetahuan anak perempuan lebih rendah daripada laki-laki dalam topik kesehatan reproduksi. Sebanyak 44,7 persen rumpud mengetahui bahwa perempuan bisa hamil saat berhubungan seksual pertama kali. 38 persen merasa bahwa berliman dan berpelekan bisa mengakibatkan perempuan hamil, 31,5 persen percaya bahwa kondom dapat mencegah kehamilan, 15,5 persen tahu di mana akses kondom, 33,2 persen laki-laki dan perempuan mengetahui mereka dapat terinfeksi HIV/AIDS ketika berhubungan seksual, 31,2 persen mengetahui PKPR (Pelayanan Kespri Peduli Remaja), 32,1 persen pernah mengunjungi PKR, hanya 14 persen remaja yang sedang memiliki pacar dan semua tidak berekspektasi untuk menjadi seksual aktif.
13. Baik anak laki-laki maupun perempuan merasa tidak PD dengan perubahan pada tubuhnya. Atas perubahan ini anak laki-laki lebih enggan mencari bantuan dan lebih merasa tidak dibongkar, serta merasa tidak dekat dengan orang yang mengasuhnya. Perempuan lebih dapat merencanakan masa depannya dengan baik dibandingkan anak laki-laki. Anak perempuan lebih mengungkapkan anak pada usia yang lebih tua dibandingkan dengan anak laki-laki. Rata-rata anak perempuan ingin menikah pada usia 21 tahun dan memiliki anak pada 25 tahun.
14. Berikutnya hasil sesi paralel pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua merasa takut untuk membicarakan seksualitas karena merasa anak belum dilatih untuk memahami seksualitas serta belum sahnya diberikan informasi terkait seksualitas. Orang tua merasa bingung bagaimana menyampaikan informasi seksualitas. Anak perempuan lebih berani bercerita atau bertanya tentang

- seksualitas dibandingkan dengan anak laki-laki. Mayoritas remaja tidak sadar bahwa mereka sedang menjadi pelaku bahkan korban pelecehan seksualitas. Norma tidak berani membicarakan diri untuk memberikan pendidikan seksual bagi remaja. Oleh sebab itu, diperlukan pembekalan kespri komprehensif bagi orang tua, anak, dan guru di lingkungan sekolah.
15. Sebanyak 47,7 persen anak laki-laki dan 18 persen anak perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan psikologis. Kekerasan yang dialami oleh remaja pada usia dini, akan menyebabkan toxic stress pada usia 15-19 tahun yang lebih banyak dialami oleh remaja perempuan daripada remaja laki-laki. Mayoritas responden mengalami tanda stress di atas median. Mayoritas responden mengalami minimal 1 gejala yang tidak enak di masa kanak-kanak. Namun, justru mereka yang mengalami yang tidak memiliki pengalaman tidak enak di masa kecil justru berisiko mengalami tanda-tanda depresi.
16. Terkait kedekatan orang tua dengan anak, anak laki-laki dan perempuan lebih dekat dengan ibu daripada dengan ayah karena merasa lebih nyaman dan karena ibu memiliki waktu yang lebih banyak di rumah daripada ayah. Anak laki-laki cenderung tidak mau berbicara dan mencari informasi tentang pubertas, orang tua mengetahui tanda-tanda pubertas dari pengamatan sehari-hari. Terkait inhibitor pembicaraan tentang pubertas adalah dari pihak anak dengan memulai menanyakan persoalan pubertas. Orang tua merespon pertanyaan pubertas dengan baik, namun mereka tidak menyampaikan informasi dengan baik tentang pubertas secara menyeluruh (bagaimana dan apa risikonya). Selanjutnya, diperlukan edukasi kepada orang tua tentang bagaimana melakukan komunikasi yang baik dengan anak mereka tentang pemberian informasi pubertas.
17. Sebagian besar keluarga tidak menyadari jika anak menggunakan obat-obatan terlarang, perilaku anak dipandang normal. Orang tua yang mengetahui anaknya menggunakan obat-obatan terlarang merasa malu dan menyalahkan diri dari lingkungan. Mereka cenderung akan menyembalkan satu sama lain, merasa khawatir, cemas, dan putus asa. Orang tua akan fokus kepada 2 hal, yaitu emosional fokus dan problem fokus. Emosional fokus lebih banyak berpengaruh kepada ibu. Problem fokus akan berorientasi pada pemecahan masalah, sumber informasi, dan sumber dukungan.
18. Peningkat kesadaran berakrab dengan HIV/AIDS dan abortif. Tahun 2018 terdapat 640.000 penderita HIV namun hanya 53 persen dari mereka yang mengetahui status HIV mereka. Di Indonesia terdapat 23.000 anak muda usia 15-24 tahun yang berstatus sebagai HIV positif, di mana angka itu merupakan

angka tertinggi di Asia Pasifik. Setiap harinya, 63 anak muda di Indonesia terinfeksi HIV. Pencegahan HIV harus fokus kepada perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan semakin rentan dengan HIV dan mereka merupakan populasi kunci karena merupakan pasangan dari pelaku seksual aktif; sebanyak 15 persen perempuan hamil dengan status HIV positif, di mana persen pun yang hamil dengan HIV mengalami banyak disrimasi, tidak hanya dari keluarga dan masyarakat namun juga dari petugas kesehatan.

19. Kesehatan reproduksi dan seksualitas merupakan sebuah paradigma baru, di mana hal ini merupakan hak terpuhinya kebutuhan dasar laki-laki dan perempuan, tidak hanya fokus terhadap target demografi saja. MMR menunjukkan tingginya abortus yang tidak aman, terkait regulasi, sudah dilakukan Amendemen UU No. 23 Tahun 1992, di mana negara memberikan akses yang aman dan legal tentang layanan abortus. Judicial review UU No.1 tahun 1974 pasal 7 terkait meningkatkan usia minimal perkawinan dari 16 tahun menjadi saat ini 19 tahun. Proses ini juga mengupayakan abortus yang aman untuk keselamatan ibu dan korban pemerkosaan, di mana proses ini harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tersertifikasi. Namun, sampai saat ini belum ada layanan kesehatan yang secara legal ditunjuk untuk melakukan abortus tersebut.

20. IDHS 2007-2012 menunjukkan penurunan kelahiran tidak diinginkan. Obat abortus banyak terjual bebas di pasaran tanpa label apapun, bahkan obat abortus misoprostol justru banyak dijual sebagai obat magh. Kandungan yang aman digunakan dengan obat ini maksimal usia 12 minggu. Kehamilan usia lebih dari 12 minggu harus diturunkan dosasinya jika menggunakan obat ini. Namun, obat ini beredar luas di masyarakat tanpa label, tanpa petunjuk pemakaian, tanpa dosis, dan jelas ilegal. Dampak sangat besar akan dialami oleh perempuan sebagai pengguna jenis obat ini. Karena obat ini termasuk ilegal, yang harusnya mengetahui bahayanya, cara pakai, dosis, dan komposisi obat adalah petugas farmasi/apoteker, perijaga apotik atau toko obat. Rata-rata apoteker, perijaga apotik, atau toko obat berusia muda, berjenis kelamin perempuan, mayoritas belum pernah mendapatkan training, rata-rata berpendidikan menengah, 85 persen lebih tidak tahu dosis dan cara pakai obat tersebut. Ternyata, bahkan sebagai salah satu pemegang obat tersebut juga tidak memiliki pengetahuan yang cukup baik daripada petugas apotik/toko obat.

21. Memandang kontrasepsi dari segi agama jangan didesain secara mentah-mentah. Kita harus kritis dalam membaca, mencermati, dan menakarai hadist-hadist yang ada. Islam juga secara terang-terang melarang kita meninggalkan generasi yang

terbelakang, terbelakang dari segi pengetahuan, pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi. Tantangan terbesar kemajuan program kependudukan dalam hal ini program kontrasepsi adalah norma agama yang banyak disalahkan oleh sebagian besar pemuka agama. Memang ada sebagian kecil dari pemuka agama yang sudah bercerahkan tentang kontrasepsi ini, namun rata-rata dari mereka menilai tidak vocal karena mereka adalah minoritas. Ke depan perlu dilakukan kolaborasi antar instansi bagaimana membagi peran masing-masing instansi namun tetap terus bersinergi.

22. Perhatian dari di Kabupaten Kulonprogo sendiri banyak terjadi aborsi aborsi budiye, paparan media sosial, telah memiliki lekash, perspektif perkawinan dini yang lebih, untuk menjaga dari perbuatan yang tidak diinginkan, putus sekolah, dan kurangnya mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Masih ada yang berasal dari orang tua dan noda yang berasal dari diri anak sendiri. Remaja tidak mendapatkan dukungan dari orang tua untuk melakukan perubahan terhadap perkawinan anak dari pengambilan keputusan terakhir untuk perkawinan adalah orang tua, dalam hal ini ayah.

23. Alasan terjadinya perkawinan anak adalah faktor kemiskinan. Kemudian menyebabkan anak mengalami kekerasan fisik, psikologi, ketergantungan dengan suami karena tidak memiliki kemandirian, dan juga kelahiran atau tidak hamil. Selain alasan kemiskinan, terdapat pula alasan pendidikan. Pendidikan di sini tidak hanya menjadi alasan, namun juga menjadi akibat. Kondisi antara pendidikan dan kesehatan membentuk sebuah siklus. Perempuan korban perkawinan anak tidak akan mendapatkan hak suara di dalam rumah tangganya atau pun di masyarakat. Regulasi yang ada sangat timpang tidak, di mana UU tahun 1974 menyatakan bahwa usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun, sedangkan untuk laki-laki adalah 18 tahun. Sedangkan UU tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa mereka yang berusia di bawah 18 tahun adalah anak-anak. UU Peradilan juga menyatakan bahwa wajib belajar anak adalah 12 tahun. Hukum di Indonesia merupakan hukum pluralistik, di mana hukum negara digabungkan dengan hukum adat dan Islam. Banyak dari aturan UU tersebut yang boleh dilakukan pengecualian, misalnya usia belum memenuhi batas minimum namun karena orang tua menginginkan maka dapat dilakukan pengecualian. Sampai saat ini, telah dilakukan perbaikan dari UU yang ada, seperti batas minimal menikah menjadi minimal 19 tahun pada 16 September 2019. Di sisi lain, juga telah dilakukan seks edukasi di sekolah-sekolah.

24. Terkait bully, remaja yang pernah mengalami bully berkisar 1,4 kali untuk mengalami depresi dibandingkan dengan remaja yang tidak pernah mengalami bully. Remaja yang mengalami bully ini juga rata-rata berasal dari keluarga yang kurang perhatian dengan ekonomi rendah.
25. Pelecehan seksual terjadi lebih banyak pada perempuan daripada laki-laki (13 kali lebih tinggi). Sebanyak 60 persen mengalami pelecehan verbal, 24 persen pelecehan fisik, dan 15 persen pelecehan visual.

Hari Ketiga

1. JKN adalah prioritas nasional dan global. JKN harus fokus kepada layanan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi dan program keluarga berencana.
2. Era JKN menuju Universal Health Coverage dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan harus dilakukan integrasi pelayanan primer dan sekunder.
3. BKKBN merupakan instansi pemerintah di mana program KB dan Kespro didanai oleh pemerintah. JKN merupakan paket manfaat, di mana dana berasal dari premi yang dibayarkan tiap bulan oleh peserta. Saat ini kepesertaan JKN mencapai 84 persen, terdiri dari 49 persen perempuan dan 51 persen laki-laki. Sampai Agustus 2019, sebanyak 10 provinsi dan 205 kabupaten/kota sudah mencapai Universal Health Coverage. Sebanyak 60,6 persen FKTP belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Maksimal pelayanan KB masih dilayani di FKRTL, yaitu RS tipe C dan D. Tantangan drop out merupakan tantangan yang harus diteliti bersama.
4. 57 persen peserta JKN adalah PUS, sebanyak 71 persen FKTP belum melayani program KB. Dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan untuk program KB dan Kesehatan Reproduksi sebanyak 2,8 triliun. Rata-rata pemanfaatan layanan KB dalam sehati terdapat 2,87.
5. Sebanyak 58,2 persen persalinan dilakukan di FKRTL, dengan persalinan SC sebanyak 45 persen dari total persalinan di FKTP dan FKRTL. BPJS Kesehatan mengeluarkan 5,7 T untuk klaim biaya persalinan SC.
6. Sebanyak 36,996 bidan tersebar di 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 18.885 bidan delima tersebar di 30 provinsi. Pertumbuhan jumlah bidan dengan jumlah fasilitas kesehatan adalah 9 dibanding 1, artinya di dalam satu fasilitas kesehatan setidaknya terdapat 9 bidan. Tugas bidan sendiri adalah melakukan KIE, konseling, dan layanan KB.

7. Layanan ANC yang dilakukan yang dilakukan oleh bidan menurun dari 2013 ke 2018. Tahun 2013 sebanyak 87,8 persen bidan melayani ANC, sedangkan tahun 2018 hanya 41 persen yang melayani layanan ANC.
8. Persalinan yang ditangani oleh bidan juga menunjukkan tren menurun. Data menunjukkan bahwa 1 bidan delima dalam 1 bulan rata-rata memiliki pasien layanan KB sekitar 89 layanan. Sebanyak 30 persen bidan delima sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
9. Program KB berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan ibu (MKMI). Data tahun 2012 menunjukkan bahwa jika CRR di angka 64,2 persen, maka MKMI akan menurun 44 persen. Sedangkan jika urinet need 0 persen, atau CRR 100 persen, maka akan menurunkan 70 persen kemiskinan tidak ditangani, menurunkan 74 persen abortif yang tidak aman, menurunkan 25 persen MMR, dan menurunkan 18 persen JMR.
10. Beberapa tantangan yang dihadapi terkait program layanan KB di Era JKN antara lain: mekanisme klaim pada puskesmas non-RLUD, distribusi dari tenaga kesehatan, distribusi alat dan obat kontrasepsi, integrasi program antara BPJS Kesehatan dengan BKKBN, biaya pelayanan KB, KIE untuk meningkatkan kesertaan KB.
11. Tahun 2012, Indonesia menilai komitmen terhadap FP 2020 yang diselaraskan atas kondisi urinet need yang tinggi. Kondisi ini akan menyebabkan kelahiran tidak ditangani tinggi dan di satu sisi mendorong hak-hak dasar reproduksi. Tahun 2017, Indonesia mempertahankan komitmen ini sampai tahun 2020. Terdapat 6 komitmen yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia, antara lain: (1) menyediakan dana sebesar USD 1,6 miliar untuk program KB antara tahun 2015-2019; (2) pelayanan KB melalui BPJS Kesehatan menuju UHC; (3) meningkatkan metode mix kontrasepsi dengan meningkatkan jumlah pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang; (4) menjamin ketersediaan, kualitas, dan manajemen rantai pasok dari kontrasepsi; (5) menyediakan kebutuhan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan oleh kaum muda; (6) mengintegrasikan pertukaran pengalaman dalam Program South-South. Dari 6 komitmen, 1 komitmen yaitu komitmen ketersediaan dana sudah tercapai bahkan melebihi target. Lima komitmen lainnya berstatus on track.
12. Beberapa mitra kerja FP 2020 Indonesia antara lain: urifa, pkel, Camellian Erhaasy, Yayasan Cipta, JHCCP, JSI, IPAS, DKT Indonesia, Fulgens WPF, Yayasan Kusuma Bangsa, ThinkWell, dan JHPTEGO.

DOKUMENTASI KEGIATAN





SURAT TUGAS

Nomor : 3766 /RT.01/J.3/2019

Memberikan tugas kepada :

1. Nama :
 1. Ratna Anita Sari, S.Si, M.Sc.
 2. dr. MZ. Fathurachman, M.Sc.
 3. Umi Lutfiah, S.K.M.
 4. Sutarti, S.Si, T.MPH.
 5. Dr. Pande Made Kutanegara, M.Si.
2. Jabatan :
 1. Kasubbid Bina Kesertaan KB Jalpemswa
 2. Kasubbid Kespro
 3. Staf Bina Kesertaan KB Jalpemswa
 4. PD IBI DIY
 5. Koalisi Kependudukan DIY
3. Tujuan : Sahid Raya Hotel, Yogyakarta
4. Isi Tugas : Konsultasi Program KBKR Tingkat Provinsi dalam rangka 1st *International Conference on Indonesia Family Planning and Reproductive Health (ICIFPRH)*
5. Waktu/Lamanya : 30 September 2019 – 2 Oktober 2019 / 3 (tiga) hari
6. Kendaraan yang dipakai : Umum
7. Dengan pengemudi : -
8. Anggaran : DIPA Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2019

Demi kelancaran tugas yang bersangkutan mohon dapat difasilitasi.

Kepada yang ditugaskan diwajibkan untuk membuat dan memberi laporan tertulis.

Yogyakarta, 27 September 2019



Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan Kenari Nomor 58 (Timoho) Yogyakarta Telp. (0274) 561215, 513422. Fax 0274 549225-562938
email : yogy@BKKBN.go.id

**Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Daerah Istimewa Yogyakarta**



CERTIFICATE OF PARTICIPATION

This Certificate is awarded to:

Umi Lutfiah, S.K.M.

As an active participant of

**THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF INDONESIA
FAMILY PLANNING AND REPRODUCTIVE HEALTH**

Yogyakarta, 30 September-2 October, 2019

Prof. dr. Siswanto Agus Widiopo, SU, MSc, ScD

Chair of the Conference

Prof. dr. Meiwita Budiharsana, MPA, PhD

Chair of Scientific Committee

*This conference is awarded 15 credit points (SKP) based on the Indonesian Doctors Association (IDI)'s decree on professional credit points No 09228/P/BA.4/09/2019

*This conference is awarded 5 credit points (SKP) based on the Indonesian Public Health Association (IAKMI)'s decree on professional credit points No 594/IAKMI/PUSAT/SKP

*This conference is awarded 4 credit points (SKP) based on the Indonesian Midwives Association (IBI)'s decree on professional credit points No 6065/S/SKP-IBI/02/2019



Umi Lutfiah, S.K.M.

PARTICIPANTS

Output Peningkatan Kompetensi Sosialisasi Aplikasi MONIKA (Bukti Form 11)

PERTEMUAN VICON MONIKA

Kapan	8 Oktober 2019
Siapa	PD IBI DIY, PD IBI Kabupaten/Kota
Apa	Pertemuan Vicon MONIKA
Mengapa	Sertifikasi Bidan
Di mana	Ruang Kencana Lt. 2 Perwakilan BKKBN DIY
Bagaimana	<ul style="list-style-type: none">• Sertifikasi bidan penting di era JKN• Bidan yang telah melakukan insersi 3 IUD dan 3 Implan berhak mendapatkan 2 sertifikat. Jika hanya memenuhi 1 insersi saja, misal implant/IUD saja, maka sertifikat yang diberikan nanti juga hanya 1.• Setelah upload data, data masuk ke admin provinsi. Admin provinsi akan menyampaikan data ke verifikator. Verifikator berasal dari P2KS Provinsi (bagian dari tim pelatih P2KS). Ketika ada catatan saat verifikasi, verifikator akan mengembalikan lagi ke admin provinsi dan admin provinsi akan mengembalikan ke ybs. Jika sudah oke, maka akan diteruskan ke admin pusat (BKKBN dan JNPK). JNPK akan melakukan verifikasi kembali kemudian JNPK akan mengeluarkan notice berupa informasi kepada P2KS dan juga terdapat nomer. Jika notice sudah keluar, maka P2KS akan mendownload dan di print oleh provinsi dan ditandatangani oleh P2KS.• Admin nasional bertugas menginput data dan memberikan nomer sertifikat, admin provinsi memiliki wewenang input data dan hapus data, verifikator provinsi memberikan status kompetensi, dan verifikator nasional memberikan status kompetensi dan memberikan nomer sertifikasi.• Terdapat buku saku untuk mempermudah proses pemahaman aplikasi (cis.bkkbn.go.id/kbkr)• Jumlah dokter terlatih 7956, bidan 34312, namun yang sudah melakukan upload sebanyak 906, dan yang sudah mendapatkan sertifikat 807.• Strategi percepatan target: melalui vidcon, untuk provinsi yang belum pernah didatangi tim pusat maka tim pusat bersedia mendatangi provinsi ybs.• Tahapan: (1) dokter/bidan melakukan aktivasi, (2) user login, (3) melengkapi data profile, (4) unggah lengkapi dokumen, (5) lakukan submit dengan menekan tombol ya.• Admin provinsi akan mengecek data dari user, diterima jika lengkap, jika belum ditolak dilengkapi dengan kekurangannya apa. Data yang direview: NIK, NIP (jika PNS), STR, Sertifikat pelatihan periode 2011-2016 berlogo JNPK dan BKKBN.

DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan

: Video Conference dalam rangka Sosialisasi Aplikasi Monitoring Berkualitas (MONIKA)

Tanggal

: 8 Oktober 2019

NO	NAMA	JABATAN	GOL	TANDA - TANGAN
1	Eva Nurul Fianty	Bidan Pelaksana Gigi	III b	1
2	Rini Sunardi	Bidan Anestesi	IV a	2
3	Felisia Sri Astri	Bidan		3
4	Veny Wardani S	Bidan Gunungkidul		4
5	Dian Hadary S.	Bidan Gunungkidul		5
6	Rosika Pulkawati	Bidan Sleman		6
7	Suhani	Bidan Pelaksana Lanjut	III B	7
8	Stephanie L. A	Bidan K		8
9	Kusminati	PD 1001 B		9
10	Aldilla	PD 1001 Bantul		10
11	Mei Muhandah	PD 1001		11
12	Budi Sugiharti	IGDEL 1001		12
13	Tri Wahyuni	IBI Cawang Bantul		13
14	Indyana	IBI		14
15	Rizki	Bidan		15
16	Sulmiati	IBI		16
17	Umi Lutfiah	KB-KR		17
18	Retra Anita S	Jatraprima		18
19	Johananti	KB-KR		19
20	Widyadewi	KB-KR		20
21	Siti Nur	Jatraprima		21
22	Yuliana Ratih	Jatraprima		22
23	Sumarna			23
24				24
25				25

Output Peningkatan Kompetensi (Bukti Form 11)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN (RADALGRAM)

Kapan	9 Oktober 2019
Siapa	Pejabat Struktural dan Fungsional Perwakilan BKKBN DIY, OPD KB Kabupaten/Kota, PKB
Apa	Rapat Pengendalian Program dan Anggaran (Radalgram)
Mengapa	Realisasi capaian program dan serapan anggaran
Di mana	Ruang Kencana Lt. 2 Perwakilan BKKBN DIY
Bagaimana	<ul style="list-style-type: none">• Sampai tanggal 8 Oktober 2019, realisasi serapan anggaran BKKBN DIY baru 66.01 persen. Capaian ini masih di bawah rata-rata capaian nasional. Perkiraan realisasi sampai dengan Oktober 2019 adalah 90.00%• Capaian realisasi anggaran untuk bidang KB dari output 333.076 baru 22.42 persen, untuk output 331.080 baru 20.24 persen (pengadaan implant belum masuk), dan untuk output 3331.086 sebanyak 41.53 persen.• Ketersediaan alkon IUD untuk Kabupaten Bantul hanya dapat mencukupi kebutuhan 1.8 bulan (kurang dari 3 bulan), namun sudah dilakukan pengiriman 3.000 pcs ke Bantul.• Ketersediaan alkon kondom untuk Kabupaten Bantul hanya dapat mencukupi kebutuhan 1.9 bulan (kurang dari 3 bulan), namun OPD KB belum mengirimkan permintaan kondom ke provinsi.• Ketersediaan alkon suntik untuk Kabupaten Bantul hanya dapat mencukupi kebutuhan 0.8 bulan, namun sudah dilakukan pengiriman ke OPD KB Kabupaten Bantul sebanyak 5.000 vial.• Capaian PB DIY per Agustus 2019 baru mencapai 47.09 persen, di mana capaian Kabupaten Kulonprogo sebanyak 48.43 persen, Kabupaten Bantul 41.34 persen, Kabupaten Gunungkidul 46.56 persen, Kabupaten Sleman 47.91 persen, dan Kota Yogyakarta 70.34 persen.• Capaian PB IUD, MOW, Implan, Suntik terbanyak ada di Kota Yogyakarta, MOP di Kabupaten Bantul, Pil dan kondom di Kabupaten Gunungkidul.• Secara keseluruhan, capaian kesertaan KB pria terbanyak ada di Kabupaten Gunungkidul.• Capaian PA DIY terhadap KKP adalah 90.59 persen dengan capaian tertinggi ada di Kabupaten Sleman yaitu 101.27 persen, dan terendah di Kabupaten Bantul yaitu 84.68 persen.• Unmet need di DIY sebesar 10.87 persen, dengan angka tertinggi di Kota Yogyakarta yaitu 15.11 persen, dan terendah di Kabupaten Gunungkidul dengan 9.8 persen.• Bulan Agustus 2019 terdapat 2 kegagalan implant yaitu di Puskesmas Purwosari dan Puskesmas Samigaluh I, 1 kegagalan IUD di Faskes Banguntapan I, dan 1 Komplikasi Berat IUD di RSUP dr. Sardjito.

DAFTAR HADIR

Tanggal : 9 Oktober 2019
 Nama Kegiatan : Rapat Pengendalian Program dan Anggaran
 Pelaksana Kegiatan : Subbid. Data dan Informasi
 Tanda Tangan :

NO	NAMA	JABATAN / ASAL	TANDA TANGAN
1.	Subarni	IKB KP	1.
2.	Ana Ilmiyati	PKB KP	2.
3.	Sari Purwaning Rum	C PKB	3.
4.	Mahanti Sri M.	CPKB	4.
5.	Norany ES	CPKB	5.
6.	Nano Ewanto	CPKB	6.
7.	Veronita fora	CPKB	7.
8.	Kristian	CPKB	8.
9.	Bagus. SB	PUB GK	9.
10.	PATMURACHMAN	Kepros BBEK	10.
11.	Umi Lutfiah	Jalpemswa KB-KR	11.
12.	MUNARIN	PKB Sleman	12.
13.	Umi Wasriyati	PKB GK	13.
14.	Retni R.	PERKURAT/INAT	14.
15.	Uswah	PKA PUL	15.
16.	Kanthi Anyekh	Hukalilo	16.
17.	Marlene M.	PUS Cuta	17.
18.	Budi C.	PKB Kota YK	18.
19.	Pruf	BKIBEN	19.
20.	Ghi gwanryah	PKB Depok Sleman	20.

LAPORAN WORKSHOP PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) SEKOLAH SIKSA KEPENDUDUKAN (SKK)

I. PELAKSANAAN

Hari / tanggal : Sabtu / 12 Oktober 2019

Tempat : The Jayakarta Hotel Yogyakarta

II. PESERTA

1. Kepala Sekolah di 5 SKK level SMA
2. Bapak Ibu Guru
3. OPD KB Kabupaten/Kota
4. Perwakilan BKKB DIY

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RPP SKK

IV. KEGIATAN

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars KB. Setelah itu, panitia memberikan laporan penyelenggaraan acara yang disampaikan oleh Bapak Yusuf. Selanjutnya dilakukan penyerahan piagam penghargaan SKK Percontohan kepada SMA 1 BOPKRI, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Sekolah SMA 1 BOPKRI. Acara selanjutnya adalah Sambutan Plt. Kepala Perwakilan BKKB DIY, Ibu Rodhiana menyampaikan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM yaitu dengan adanya SKK. RPP yang akan dibuat nanti juga diharapkan tidak menjadi mata pelajaran terpisah, namun terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain. Selain itu, Ibu Rodhiana juga berharap bahwa anak usia 10-24 tahun memiliki pengetahuan tentang masalah kependudukan dan selanjutnya peduli terhadap masalah kependudukan.

Sambutan selanjutnya adalah dari Kepala Deskiyora DIY, dalam sambutannya Bapak Kepala Deskiyora DIY menyatakan bahwa RPP tidak masalah sama, asalkan sekolahnya sama, kelasnya sama, dan sama tipe sekolahnya. RPP hendaknya mengikutai siapa yang akan diberikan materi, bukan siapa yang memberikan materi. Dengan kata lain, RPP harus target oriented. RPP diharapkan juga tidak menambahi beban siswa dan guru. RPP bisa dilakukan jika sudah ada standar isi, standar proses, standar

pendidikan, dan juga standar kelulusan. Tujuan akhir dari RPP nantinya diharapkan tidak berhenti pada aspek pengetahuan saja, namun juga sikap dan perilaku para siswa terhadap isu-isu kependudukan.

Sesi selanjutnya adalah sesi panel dan Bapak Dody Hartanto (Wakil Dekan FKIP UAD) yang membahas tentang Wajah Baru Pendidikan Kependudukan. Pak Dody menyampaikan bahwa masalah kependudukan merupakan masalah kelangkaan dan harapan hidup. Remaja Indonesia memiliki gaya hidup yang berbeda dengan remaja di negara barat, namun tidak dibarengi dengan pengetahuan tentang dampak negatif tindakan tersebut. Beliau menyatakan bahwa Yogyakarta memiliki anomali dimana UHH tinggi yaitu 74,82, PM 78,89 (2017), namun angka kelahiran di atas rata-rata nasional. Pak Dody juga mengharapkan kita mampu belajar dari negara-negara lain terkait permasalahan kependudukan.

Pak Dody dalam paparannya menyatakan bahwa latar belakang pertanya pendidikan kependudukan adalah adanya kesenjangan antara kualitas dengan kualitas SDH kita, adanya motivasi, PM, tren pengetahuan masyarakat/keleuarga/remaja tentang kependudukan, serta terkait pemanfaatan data kependudukan. Berikut beberapa harapan beliau ke depan:

- Peningkatan peranannya kecermatan dalam RPP.
- Pentingnya pendidikan seksifik dalam pembelajaran, di mana remaja pada umumnya berhenti di tahap menghamil, bertanyanya, dan menular. Sedangkan remaja kesulitan dalam mencoba dan berkomunikasi.
- RPP dan modul nantinya diharapkan tersedia dalam bentuk digital, mengikut perkembangan kelengkapan remaja.
- Pendidikan kependudukan tidak hanya menargetkan remaja perempuan, namun juga remaja laki-laki.
- Materi pendidikan kependudukan harus berorientasi pada RUSKID agar remaja dapat lebih memahami bahwa jika mereka melakukan hal-hal negatif.
- SKK bisa menjadi blog terintegrasi dengan website sekolah.

Paparan selanjutnya dari Kepala Bidang Pengendalian Perilaku (Dabek) tentang Monev Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan di SKK DIY. Monev dilaksanakan di 5 SMA, antara lain:

- SMA N 1 Banguntane, mendapatkan peringkat **pertu peningkatan**, rekomendasi yang diberikan antara lain: (1) sosialisasi SKK untuk seluruh komponen sekolah, (2) pelatihan integrasi materi KKBP ke dalam mata

- pelajaran bagi guru yang mendapat pelatihan/sharing informatif, (3) penambahan materi kependidikan, (4) menggandeng instansi lain dalam sosialisasi.
- SMA N 2 Wonorejo, mendapatkan predikat **perlu peningkatan**. Rekomendasi yang diberikan antara lain: (1) sosialisasi SSX untuk seluruh komponen sekolah, (2) pelatihan integrasi materi KKGPk ke dalam mata pelajaran bagi guru yang mendapat pelatihan/sharing informatif, (3) penambahan materi kependidikan, (4) menggandeng instansi lain dalam sosialisasi.
 - SMA N 1 Pengasih, mendapatkan predikat **perlu peningkatan**. Rekomendasi yang diberikan antara lain: (1) sosialisasi SSX untuk seluruh komponen sekolah, (2) pelatihan integrasi materi KKGPk ke dalam mata pelajaran bagi guru yang mendapat pelatihan/sharing informatif, (3) penambahan materi kependidikan, (4) menggandeng instansi lain dalam sosialisasi.
 - SMA BOPKRI 1 Kota Yogyakarta, mendapatkan predikat **dapat dijadikan percontohan**. Rekomendasi yang diberikan antara lain: (1) sosialisasi SSX untuk seluruh komponen sekolah, (2) penambahan materi kependidikan, (3) menggandeng instansi lain dalam sosialisasi.
 - SMA N 1 Ngagati, mendapatkan predikat **perlu peningkatan**. Rekomendasi yang diberikan antara lain: (1) sosialisasi SSX untuk seluruh komponen sekolah, (2) pelatihan integrasi materi KKGPk ke dalam mata pelajaran bagi guru yang mendapat pelatihan/sharing informatif, (3) penambahan materi kependidikan, (4) menggandeng instansi lain dalam sosialisasi.

Selain itu, pihak SMA BOPKRI 1 Yogyakarta juga memaparkan bagaimana penerapan RPP dalam kurikulum sekolah. SMA BOPKRI memaparkan bagaimana menggandengkan kependidikan dalam RPP Mata Pelajaran Biologi, bagaimana pelaksanaan SSX di SMA BOPKRI, dan modul materi kependidikan.

Selanjutnya dilakukan penyusunan RPP oleh masing-masing guru mata pelajaran. Peserta melakukan FGD sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Adapun mata pelajaran tersebut adalah Agarna, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Bimbingan Konseling, Biologi, Fisika, Geografi, Ekonomi, Kimia, Matematika, PJKK, PPKn, Sejarah, Seni Rupa, dan Sosiologi. Setelah FGD dilaksanakan, masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya.

DOCUMENTASI KEGIATAN



DAFTAR HADIR

NAMA KEGIATAN : Workshop Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
TANGGAL : 12 Oktober 2019
TEMPAT : Hotel Jayakarta, Yogyakarta
JUMLAH PESERTA :
TTD.PELAKSANA : Sub Bidang Kerjasama Pendidikan Kependudukan

NO	NAMA	GOL	ASAL	TANDA TANGAN
1	Pasetto Susanto		SMA BOSA	1.
2	Lies R.		SMA BOSA YK	2.
3	Ikati		SMA BOST YK	3.
4	Tri Cahyo		SMAN Banguntapan	4.
5	Tya R.		SMA BOSA YK	5.
6	Wurfaulu		RMAN 1 BOSP	6.
7	Nurudini R		SMAN 1 WWS	7.
8	Andhika Pratomo I		SMA BOSA YK	8.
9	T Ambar N.K		BOSA YK	9.
10	BUDI S		SMAN 2 WWS	10.
11	Syair Rahayungr		SMAN 2 WWS	11.
12	Pattini		SMAN 1 Ngaglik	12.
13	Sumu Sulistyono		SMAN 2 WWS	13.
14	Niken Suprihandayani		SMAN 1 Banguntapan	14.
15	ERNINAH DAHAZATI		SMAN 1 Banguntapan	15.
16	Latia Pratiwi Wardani		SMAN 1 Banguntapan	16.
17	Sri Widati		SMAN 1 Banguntapan	17.
18	Esti Permata Sari		SMAN 1 Banguntapan	18.
19	J. Luthi Smiti Ihtan		SMAN 1 Ngaglik	19.
20	Umi Lutfiah		KB-KR	20.

PROMOSI DAN KONSELING KESEHATAN REPRODUKSI BERBASIS KOMUNITAS

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Oktober 2019

Waktu : 08.30 – selesai

Pukul : Bu-bu Komunitas Aliran Sungai Yogyakarta (Bungai Gajahwong, Weninggo, dan

Puserta : Codel, OPD KB Kabupaten/Kota

Materi 1, dr. Supriyastulungih, M.Kes., Sp.OG “Kejepo bayi Pasangge (Ulu Sabur dan Pongponon Metode Kontrasepsi sebagai Pilihan ber-KB”

- Generasi yang maju bertumbuh dari keluarga sebagai role model. Lingkungan berpengaruh besar, namun role model lah yang berperan sangat banyak dalam membentuk generasi yang baik.
- Kejepo: keadaan sejatara fisik, mental, sosial yang utuh dalam segala hal yang berhubungan dengan tenaga, peran, dan sistem reproduksi.
- Kejepo berhubungan dengan keluarga sederhana karena kesehatan itu berpengaruh besar terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.
- PUS: 15-49 tahun masih baik, atau <15 tahun sudah baik, >50 tahun masih baik.
- Berhubungan seksual bagi perempuan yang dilakukan terlalu dini sangat berisiko mengalami hanker severs, selain itu, jika terjadi kehamilan maka akan membahayakan dirinya sendiri dan bayi janin
- PUS adalah sasaran program KB, dengan usia paling aman melahirkan adalah 20-30 tahun, jarak kelahiran 2-4 tahun. Perhatian paling aman adalah pada persalinan kedua atau antara kedua dan ketiga. Oleh karena itu, kontrasepsi berperan penting bagi PUS.
- Masa reproduksi mode: 10-15 tahun (masa berbuah), organ reproduksi baru berkembang; masa reproduksi sehati: 20-30 tahun; masa reproduksi tua (jangan hamil kembali)
- Pilihan masalah sebatiknya sesuai dengan utangnya, kemampuan sosial ekonomi, dan sesuai tuntutan agamanya.
- keberhasilan program KB ditentukan oleh faktor yang diberikan sepanjang siklus usia reproduksi, termasuk 1)pendidikan dan konseling kesehatan reproduksi pada remaja dan calon 2)kemuning dan layanan KB pada PUS 3)promosi KB pasca persalinan pada bundi 4)apoboyoran KB pasca persalinan pada ibu bersalin dan nako 5)pelebaran KB interval. Pelayanan apapun terkait PUS harus dilakukan bersama, biri dan suami. Urutan kesehatan reproduksi menjadi tanggung jawab bersama.
- Semua alat kontrasepsi baik, makin kecil angka kegagalan makin efektif suatu metode. Angka kegagalan terendah adalah jenis hormonal, metode pi tambahan estrogen dan progesterone (dihubung secara teratur).
- Di luar negeri sudah dikembangkan toyo kontrasepsi yang dapat ditempatkan di bagian-bagian berbuah → maui
- Pp KB cantik (yasmin), membuat tidak gemuk, tidak jerawatan, kulit tambah halus → maui

- Manfaat pil KB: kulit halus, tidak membuat gemuk, menormalkan siklus haid, mengurangi risiko anemia, mengurangi gejala-gejala PMS, mengurangi risiko infertilitas, dan mengurangi risiko radang panggul.
- Pemangung IUD bisa dilakukan kapan saja, asal tidak sedang hamil. IUD Mirena, IUD yang mengandung hormonal namun maui.

Diskusi:

1. Salah baca slogan KB. Anak banyak, apakah menguntungkan terkena peswykt? Apa itu vasektomi?
2. Kenalati metode kontrasepsi
3. Meneliti teman 52 tahun, KB selamanya (IUD seumur hidup), IUD apakah nomor 2 badan berikutnya beliau hamil namun sudah tidak menstruasi.

Materi 2, Dra. Joehansani Christowandi! “Kejelasan Program KKBPK DYT”

- Nomenklatur BKKBN berubah, maka visi BKKBN juga berubah.
- Kegiatan prioritas BKKBN: 1)jalinanisasi implementasi kebijakan pemerintah dengan penda dalam rangka pendudukan penduduk 2)peningkatan akses dan kualitas pelayanan KIKR (penyediaan akses, promosi konseling KIKR, peningkatan pelayanan kesehatan kapabilitas tenaga medis dan penguatan tenaga ter lapangan yaitu pelatihan tenaga proofer, pendidikan tenaga pengelola dan penyuluh KB) 3)implementasi kebijakan dan jasaasana KKBPK 4) tugas kotakrg: kengamanan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, ekonomi, dan lingkungan, BKS, BKK, BKL, UPKWS, GEBOTE, PPK R/PA, KAKK, PUP, Laniah Tanggahi 4)lengkapakan mitra kerja dan stakeholder (kampong KB: memenuhi kebutuhan KB, meningkatkan angka putus pokak, meningkatkan angka partisipasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga, meningkatkan kesadaran remaja dalam PUP, terwujudnya lingkungan kampung yang bersih)
- BKKBN tidak melakukan pelayanan kontrasepsi, pelayanan kontrasepsi tetap dilakukan di fasilitas kesehatan.
- Keluarga adalah wahana utama dan pertama dalam penyempitan nilai-nilai kultur dan karakter. konsep keluarga berkeluarga, berbang, dan berberakati.

Diskusi:









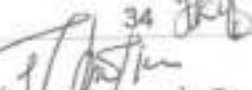

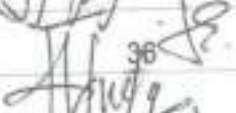
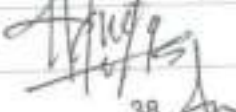
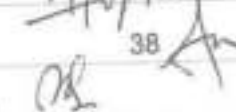


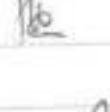
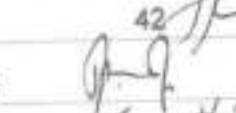
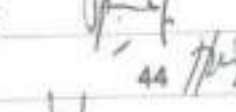

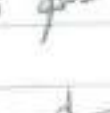

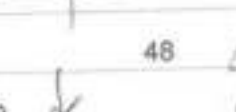



1. Yang, Lesbik Timoho, belum pernah mencirina sosialisasi tentang KII, mengundang untuk memberikan sosialisasi ke komunitas?
2. Komunitas Gajahwong, KB IUD bisa sampai teranga tahun? Pernah steril dan gagal.
3. Kader KB Barak, kampung KB di Pinedak, kampung KB sudah 2 tahun, kelengkapan rumah data belum maksimal karena masalah dana, saat ini memiliki dana desa, namun dana desa jika tidak ada wadah maka tidak bisa digunakan. Dana desa siapa yang sediadi, seram?

DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-hak Reproduksi Berbasis Komunitas

Tanggal : 18 Oktober 2019

NO	NAMA	NAMA KOMUNITAS / ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Widastutik	Gajahwang, Waringbato rt 38	1.
2	Haryani Sri S.	Gajahwang Waruybato RT 38	2.
3	SUKINI	Waring Bato RT 30	3.
4	Tupikawati	Waring Bato RT 34	4.
5	Mutia Sabrina	Gajahwang, Wrbato RT 34	5.
6	Yuni Nur Hartin	Gajahwang Wrbato RT 34	6.
7	Sri Wahyuli A	Narungbato RT 38 / 09	7.
8	Maxlani	Kuncen wis RT 38 / 08	8.
9	Makili	Jogoyudan Cade RT 2010	9.
10	Kiswari S	Gampingan RT 41 / RW 09	10.
11	Eka Darmayanti	Waringbato RT 38 / 09	11.
12	Gunarti Widyaningrum	Jogoyudan RT 39 RW 10 vk	12.
13	Widayati	Kuncen RT 38 / 08 - Winongo	13.
14	Sri Haryani	Ledhak Timoho, gajahwang	14.
15	Ngutinah	Ledhak Timoho, gajahwang	15.
16	DIANA SW	Ledhak Timoho jogoyudan	16.
17	ARDIANI ANIF	Winongo	17.
18	Mulyani	Winongo	18.
19	Hazizah Hasdoyanti	Winongo Radian	19.
20	Siti Rizkiah	WINONGO Radian	20.
21	Purwani	Sungai Gajahwang	21.
22	PARMIANI	Ledhak Timoho	22.
23	TARSIS	Ledhak Timoho	23.
24	Ulvi Asih	Wangbato RT 38 / 08	24.
25	Indri Harsanti	Sungai Winongo	25.

NO	NAMA	NAMA KOMUNITAS / ALAMAT	TANDA TANGAN
26	Mawarini	Gajahwang	26 
27	Desi Pulemityanti	Gajahwang	27 
28	Vini Lestari	Jogohwang	28 
29	Tatik Aswari	Gajahwang # 20	29 
30	Sri Widyuni Ekedayani	WB RT. 38 / RW 09	30 
31	Rubini	Wiryaboto RI 30	31 
32	Desi Haryanti	Jogoyudan Code	32 
33	Ivone Suspta Sari	Jogoyudan Code	33 
34	Prisyanita	Jogoyudan Code	34 
35	Ukeshri Maheswari	Jogoyudan Code	35 
36	Hesty Analisa	Jogoyudan Code	36 
37	Hardini DE	Jogoyudan Code	37 
38	Ana Sulistyani	Wiryaboto / Gajahwang	38 
39	Pratiwi	OPKKB KOTA 25	39 
40	NOVA SUSANTI	WARUNGBOTO	40 
41	Nunung Karantina	Bodran RW 11 Jk	41 
42	TANTI RUSMANI	WINONGO PAKUNCEN	42 
43	SRI SUPATMI	Winongo Pakuncen	43 
44	Maryati	Winongo Pakuncen	44 
45	Eka Sugiyanti	Winongo Pakuncen	45 
46	Inne Suparmawati	Winongo Pakuncen	46 
47	Tri Widarini	Gajahwang	47 
48	Patricia SM	Pringsa Winongo	48 
49	Kotini	Pringsa Winongo	49 
50	Sri Widarni	Gampingan Winongo	50 

NO	NAMA	NAMA KOMUNITAS / ALAMAT	TANDA TANGAN
51	Suratini	Gejah wong, warung beto	51 
52	chusnul aotimah	timoho / Gajah wong	52 
53	Sri Purwani	timoho / Gajah wong	53 
54	Sri Hartini	KUNCEN WBI/275 /WINONG	54 
55	Ratnyati	Badran winongo	55 
56	TITIS. Karyawati	Badran winongo	56 
57	Indriana Junistuti	Badran winongo	57 
58	Lazmi	Ledak timoho	58 
59	Sei Kalayu	Ledak timoho	59 
60	Siti Sholichah	OPD KB KP	60 
61	M. Z. Fathurachman	Kerabat Kopo BKKP	61 
62	WASNA	KESPRI	62 
63	Sihoro	Jalur	63 
64	Zainal Griffin	Jalur	64 
65	Yuliana Ratih	Jalur	65 
66	Rohdiana	pet	66 
67	Ratna Anita. S	hipernma.	67 
68	joenanti	KB-KR.	68 
69	Yuni	KOS-UN	69 
70	Umi Lutfiah	KB-KR	70 

NOTULENSI PENGUATAN PRE SERVICE TRAINING BAGI INSTITUSI PENDIDIKAN

I. PELAKSANAAN

Hari / tanggal : Kamis / 24 Oktober 2019

Tempat : Ruang Warda, Lt. Mezzanine, Indukore Hotel Jogjakarta

II. PESERTA

1. FK UJI
2. FK UKDW
3. FK UMY
4. OPD KB Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul
5. Auditor pendamping Bidang KBK

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Penguatan pre service training bagi institusi pendidikan perguruan tinggi, khususnya UMY, UJI, UKDW.

IV. KEGIATAN

- Kegiatan pre service training akan dilakukan dengan alkon dari BKKG, akseptor disedikan BKKG, namun pelaksanaan pendidikan di FK masing-masing.
 - Pre service training diharapkan bisa membantu meningkatkan capaian program BKKG.
 - Permintaan KI harus dilakukan oleh fakas melalui OPD KB, tidak dapat dilakukan langsung ke perguruan tinggi yang bersangkutan.
- Ide Puatika Seteman "Aerogelakan Standar Kompetensi Dokter dalam Layanan Kontrasep"
 - PMK No.97 tahun 2014 pasal 23: pemberian MKP non MKP dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
 - UU 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan: tenaga kesehatan harus dilakukan sesuai dengan kewenangan berdasarkan kompetensi. Perawat kewenangan melakukan asuhan keperawatan, Bidan memiliki kewenangan pelayanan kesehatan ibu dan keluarga berencana. Dalam keadaan darurat, nakes dapat melakukan pelayanan di luar kewenangannya dengan cara peningkatan tindakan/ task shifting modes.

- Peran pelugas dalam pelayanan KB di trefras kesehatan terdapat dalam PMK No.97 tahun 2014. Semua dokter diharapkan mampu memberikan jenis pelayanan kontrasepsi. Bidan tidak bisa melakukan pemasangan IUD dan implant tanpa pelatihan wewenang dari dokter. Hal ini menyebabkan klinik bidan tanpa dokter tidak dapat memberikan layanan pemasangan IUD dan implant. Perawat berdasarkan UU No.38 juga wajib memberikan konseling serta melaksanakan pelayanan sebagai bagian dari peningkatan wewenang.
- Kompetensi: → pengetahuan, keterampilan, sikap
- Ada keterkaitan antara PMK dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (dokter umum). Kompetensi bidan justru lebih banyak daripada dokter.
- Pelatihan kompetensi: tidak tahu tidak kompetensi → tahu tidak kompetensi → kompetensi → malar, dapat tercapai melalui kurban mawo (menentukan target), meso (determinasi outcome), dan mikro (detail).
- Prinsip pembuatan kurban harus dilakukan secara spiral, ada peningkatan.

Muhammad Nurhadi Rahman "Aran PT Pre Service Training KB Mahasiswa Kedokteran"

- Vasektomi bisa dilakukan oleh dokter umum yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi. Permasalahannya sampai saat ini dokter umum yang telah mendapatkan pelatihan justru belum melaksanakan vasektomi.
- BPJS Kesehatan memiliki tarif non-keptasi dengan syarat memiliki sertifikat kompetensi, bukan sertifikat kehadiran dalam pelatihan. Permasalahannya, dokter yang ada umumnya hanya melakukan task shifting bukan task sharing terkait pemasangan implant dan IUD. Di lapangan, dilakukan money sharing antara dokter dan bidan karena task shifting yang dilakukan dalam pemasangan IUD dan implant.
- Kompetensi dokter dalam SKDI tidak ada kompetensi dokter umum, tidak menjadi masalah karena dapat dipadatkan. Namun, jika vasektomi tidak ada di SKDI 2012 diwajibkan BPJS Kesehatan tidak mau membayar bayaran vasektomi yang dilakukan oleh dokter umum. Vasektomi sudah dimasukkan dalam tambahan kompetensi di SKDI yang baru.
- Pre service training membantu program pemerintah agar saat ini, dokter umum sudah mampu mengerjakan bayaran KB. Pre service akan lebih ekonomis daripada pelatihan yang dilakukan setelah dokter umum lulus baru mendapatkan pelatihan. Diharapkan, kurban bayaran KB bisa berjangka tidak langsung ke obyrn.

- Pre service juga telah menjadi kontinuen dengan FK seluruh Indonesia tanggal 7-9 Agustus 2019 di Serpong. BKKBN hanya memberikan 1x dukungan di awal.
- dr. Dianita Imanani ES, SpOG "Best Practice Fasilitas Pre Service Training FK-UMW LGM"
- Alur penguasaan Modul Pre Service: tim modul menyusun TOR dan Modul kegiatan-3 modul ditawarkan ke mahasiswa di tahun ke-1-3 modul kapasitas maksimal 60 orang
- Persiapan pelaksanaan pre service dilakukan h-2 bulan, persiapan tim, modul apakah ada perbaikan atau tidak, RAB
- Pelaksanaan dilaksanakan 3 minggu. Minggu pertama membahas tentang program KB di Indonesia, minggu kedua tentang metode kontrasepsi, minggu ketiga praktik di lapangan pelayanan KB. Hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat keparcayaan diri dokter meningkat setelah melaksanakan praktik lapangan.
- Konseling meningkatkan kepuasan pasien dan rasa nyaman pasien terhadap tenaga kesehatan.
- Evaluasi peketlhan: nilai pre test post test, praktik lapangan, evaluasi akhir.
- Anggaran kegiatan: persiapan kegiatan (cetak buku modul, calor), kegiatan (honor pengampu mata kuliah, lab, cleaning service, penguji OSCE, administrasi), dan praktik lapangan (pendamping, transport pasien, konsumsi, biaya kunjungan non praktik, transport pendamping, honor pasien, BR-PT), Total anggaran 1 kali kegiatan 60 juta.

Diskusi:

- FK UII, pelaksanaan pre service diikuti oleh calon dokter dan dokter. Kegiatan dilakukan 1 kali di tahun 2017, dilakukan di wilayah Dinkes Bantul. Praktik dilakukan dalam format workshop. Harapannya perpanjang MUI yang akan habis di Februari 2020. Pre service dilakukan setelah koas dan tidak berkelanjutan. Harapannya pelaksanaan pre service training di FK UII dapat lebih sistematis dan berkesinambungan. Apakah nanti dibuat program buku yang dapat dipelajari semua atau setiap institusi terbuka untuk memformulasikan sendiri sesuai kebutuhan sendiri?
- FK UMY, sejauh ini masih kesulitan untuk dibuat dalam 1 kegiatan rutin apakah dalam blok elektif atau wajib. Bagian obgyn sudah pernah melakukan dalam bentuk buku sosial di FKU Gamping. Setiap koas pada saat pendidikan melaksanakan kepar pasang implant, merasa lebih PD walaupun masih ada yang

- perlu pendampingan. Selama koas obgyn harapannya sudah melakukan minimal 1 kali pasang cabut implant, namun tidak dapat dipastikan bahwa hal tersebut benar-benar dilakukan. Harapan: BKKBN memberikan kegiatan/kejasama (MoU). Penguasaan penelitian -> apakah pelaksanaan pre service training bisa meningkatkan kompetensi dokter dan kepuasan klien?
- FK UKDW, menyatakan bahwa di buku log tidak ada kewilahan pemasangan IUD Implant. UKDW sudah memiliki MoU dengan BKKBN di tingkat universitas, perlu PKS. Pre Service Training akan dilaksanakan di Mera, tidak boleh dilaksanakan di level pre-linik. Bentuk kegiatan berupa bakson, setahun 2 kali, dilaksanakan per semester di Puskesmas Sinden dan Banturangipuro (seae IMW di 2 PGM tersebut). Tidak perlu pos khusus tentang pasang cabut implant karena selama ini sudah masuk dalam kurikulum. Pre service training akan diikuti oleh seluruh mahasiswa. Luasan dokter yang telah mengikuti Pre Service Training tidak perlu sertifikat kompetensi. Pertanyaannya bagaimana dengan dokter yang belum mengikuti Pre Service Training? Jika bertakunya hidden kurikulum maka diperlukan sertifikat untuk mengetahui dokter mana saja yang sudah memiliki kompetensi pasang cabut implant, surat dapat berupa surat keterangan pendamping (surat SKPT).

DOCUMENTASI KEGIATAN



DAFTAR HADIR SEMINAR KIT

Nama Kegiatan
Tanggal
Pelaksana

: Penguatan Pre Service Training Bagi Institut Pendidikan
: 24 Oktober 2019
: Kasubbid Bina Kesertaan KB Jalpemswa

NO	NAMA	JABATAN	GOL	TANDA - TANGAN
1	dr. Ivanna, Sp05 (K)	Cosgin UMY		1
2	Dwi Wiharyanti	Dinas P3AP2UB		2
3	Anita. S	BKKBN DIY	3	3
4	April Imam Prabowo	UKM/UM FKK UMY		4
5	Dr. RIZKA SP05	Kabag. DBS UKPW	5	5
6	dr. Amaze Grao Sin	FK UGM		6
7	dr. Jephri Dewi Pinda	FK UGM	7	7
8	- Pustiana	DPPKUBA 3000		8
9	Th. Bayani	OPDKO Kota	9	9
10	dr. Isnati M	Sesjur FKUI		10
11	a M Nurul Mubri	USJW FKKUM	11	11
12	D. Dianisa I. Sp05	---		12
13	a. Ica Pustaka MSc Sp05	FK UGM	13	13
14	jaehumanti	---		14
15	dr. Adesa	FK UMI	15	15
16	dr. Alana	FK UMY		16
17	Rohdiana	FK	17	17
18	dr. Oscar Gilang	FK UKW		18
19	Yan Alvin	PK UMY	19	19
20	Ratna Anita. S.	Jalpemswa		20
21	Wuryono	KB-KR	21	21
22	Umi Lutfiah	BKKBN DIY		22
23	daBurniah	BKKBN DIY	23	23
24	dr. Sunda	FK UMY		24
25	dr. Shinta	FK UGM	25	25